



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2022**



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

2022

KATA PENGANTAR

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan yang prima sehingga dapat mengemban tugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa ke arah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan di segala bidang kehidupan.

Pada masa periode Renstra 2020-2024 ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) mempunyai tugas penting Kementerian Perindustrian untuk membina dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri. Tugas berat namun sangat mulia ini harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, kreatif, efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk itu, diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian khususnya agar seluruh sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam berbagai dokumen perencanaan, dapat tercapai secara optimal.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri selama tahun 2022, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Tahun 2022 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan tiap pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Mudah-mudahan, penyajian Lakip ini menjadi cermin bagi aparatur khususnya aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif, dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, Januari 2022

Kepala BPSDMI



Arus Gunawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I P E N D A H U L U A N	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	5
1.4 Sistematika Penyajian.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Perencanaan Kinerja	8
2.1.1 Rencana Strategis Organisasi	8
2.1.2 Rencana Kinerja	32
2.1.3 Indikator Kinerja Utama BPSDMI.....	35
2.2 Dukungan Anggaran.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	42
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	42
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Jangka Menengah.....	42
3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	45
3.1.3 Capaian Kinerja Tahun 2022	49
3.2 Realisasi Anggaran 2022.....	132
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	146
3.4 Kendala dan Tindak Lanjut	150
3.4.1 Kendala.....	150
3.4.2 Tindak Lanjut	150
BAB IV P E N U T U P	151

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian selama tahun 2022. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri 2020-2024 pada intinya mengimplementasikan Kebijakan Industri Nasional serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Perindustrian khususnya dalam peningkatan kualitas SDM Industri dan peningkatan kualitas Pendidikan Vokasi Industri. Renstra memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta anggaran indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPSDMI.

Dalam melaksanakan tugas tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia industri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri pada tahun 2022 telah melakukan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri 2022. Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2022 sudah dapat dicapai oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Hal tersebut nampak pada tingkat persentase dari pencapaian target sasaran baik fisik maupun anggaran yang telah dijalankan selama periode tahun anggaran berjalan.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri tercapai dan telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri akan selalu berusaha mengembangkan secara berkelanjutan program diklat bermutu, pengelola diklat yang profesional, pelayanan diklat yang prima, widyaiswara yang kompeten, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), tidak terlepas dari perjalanan panjang sejarah Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Perindustri membawa negara Indonesia menjadi negara industri tangguh di dunia. Sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian di bidang pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) aparatur dan sumber daya manusia (SDM) industri, BPSDMI memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM aparatur dan SDM industri di lingkungan Kementerian Perindustrian. Peran penting tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu BPSDMI dituntut untuk selalu mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan SDM aparatur dan SDM industri berbasis kompetensi, sehingga dapat menyiapkan SDM industri yang kompeten serta SDM aparatur yang handal, profesional serta mampu melaksanakan tugasnya dengan baik pada unit kerjanya masing-masing.

Untuk melaksanakan tugas Kementerian Perindustrian, di bidang pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) aparatur, BPSDMI senantiasa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil, yang mengamanatkan bahwa diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan aparatur industri; diklat memiliki keterkaitan dengan pengembangan karir aparatur; sistem diklat meliputi proses analisis kebutuhan, desain program, penyelenggaraan, dan evaluasi diklat; mempersiapkan aparatur industri agar memenuhi persyaratan jabatan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kaderisasi. Sedangkan dalam rangka pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan SDM industri, senantiasa berdasarkan kebijakan pembangunan industri nasional, dan renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024 dimana salah satu programnya adalah program peningkatan kemampuan SDM industri.

Dalam upaya mempersiapkan dan mewujudkan SDM Aparatur yang memiliki

kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mampu mendorong peningkatan produktifitas SDM Industri dan daya saing sektor industri. Pada tahun anggaran 2022, telah dilakukan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan baik bagi SDM aparatur maupun SDM industri.

Sesuai dengan amanah Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Negara/ Lembaga yang mencakup entitas Kementerian Negara/ Lembaga, Unit Organisasi sampai dengan Satuan Kerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPSDMI Kementerian Perindustrian Tahun 2022, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

LAKIP BPSDMI ini disusun secara komprehensif, objektif, jujur, akurat, dan transparan, sesuai dengan lingkup tanggung jawab, prioritas, dan manfaat diklat bagi aparatur perindustrian. LAKIP ini disusun bersifat rutin sekali dalam setahun, dan disampaikan secara bertahap dan berjenjang pada setiap akhir tahun anggaran. Sehingga dengan demikian LAKIP ini selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BPSDMI juga dapat dijadikan bahan oleh Pimpinan untuk mengambil keputusan, utamanya dalam upaya peningkatan mutu SDM aparatur perindustrian melalui diklat.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, tugas BPSDMI adalah menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas, BPSDMI menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan sumber daya manusia industri;
- b) Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan sumber daya manusia industri;

- d) Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dengan optimalisasi pelaksanaan fungsi tersebut, diharapkan penyelenggaraan tugas-tugas Kementerian dalam pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia industri dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, setiap Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renja-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPSDMI menetapkan visi **“Menjadi vokasi industri bertaraf global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh”**.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, telah dirumuskan berbagai kebijakan sebagai arah/tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, yang tertuang ke dalam Rencana Strategis BPSDMI 2020-2024. Arah kebijakan tersebut meliputi:

- 1) Arah Kebijakan dan penguatan kelembagaan vokasi industri
 - a) Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Dual System bertaraf global sebagai referensi model pendidikan vokasi nasional
 - b) Pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri.
 - c) Pembangunan Balai Diklat Industri sebagai Center of Excellences pembangunan Tenaga Kerja Industri
 - d) Pembangunan Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) sebagai HUB dan Ecosystem Center Industri 4.0

- e) Pengembangan kelembagaan inkubator bisnis industri pada lembaga pendidikan dan pelatihan industri
 - f) Pembangunan Digital ASN and Knowledge Management Center sebagai Pusat Pembinaan ASN Pembina Industri
 - g) Pembangunan pusat pengembangan (Development Center) infrastruktur kompetensi Industri
 - h) Pembangunan wadah (HUB Center) sinergi, kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder nasional dan global dalam mengembangkan vokasi industri
- 2) Penguatan Kelembagaan Politeknik dan Akademi Komunitas Industri
- a) Pengembangan pendidikan dual system dengan STEM Learning Model
 - b) Melaksanakan Penelitian Terapan problem solving leading sector industri prioritas
 - c) Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pengembangan ekosistem IKM
 - d) Mengembangkan kompetensi industri 4.0 melalui pembangunan satelit PIDI 4.0
 - e) Membangun kelembagaan Inkubator bisnis industri yang terintegrasi.
 - f) Mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi LSP.
 - g) Mengembangkan kelas industri
- 3) Penguatan Kelembagaan SMK Industri
- a) Penyelenggaraan pendidikan dual system dengan STEM learning model berstandar internasional
 - b) Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pengembangan ekosistem IKM.
 - c) Mengembangkan kompetensi industri 4.0 melalui pembangunan satelit PIDI
 - d) Mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi LSP
 - e) Mengembangkan kelas industri.
- 4) Penguatan Kelembagaan Balai Diklat Industri
- a) Mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi jenis pelatihan yang sesuai

dengan kebutuhan industri.

- b) Mengembangkan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi
- c) Menyelenggarakan Pelatihan berbasis kompetensi (skilling, upskilling, dan reskilling) tenaga kerja industri dengan sistem 3 in 1.
- d) Mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP.
- e) Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional.
- f) Membangun sinergi serta menumbuhkan wirausaha industri melalui penyelenggaraan inkubator bisnis.
- g) Membangun smart training facility.
- h) Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai, BPSDMI telah melaksanakan 2 program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Program Dukungan Manajemen.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, BPSDMI dipimpin oleh Kepala Badan BPSDMI yang membawahi 4 unit Eselon II yang terdiri atas:

a) Sekretariat Badan

Memiliki tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;

b) Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur

Memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan jabatan fungsional bidang industri dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur;

c) Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri

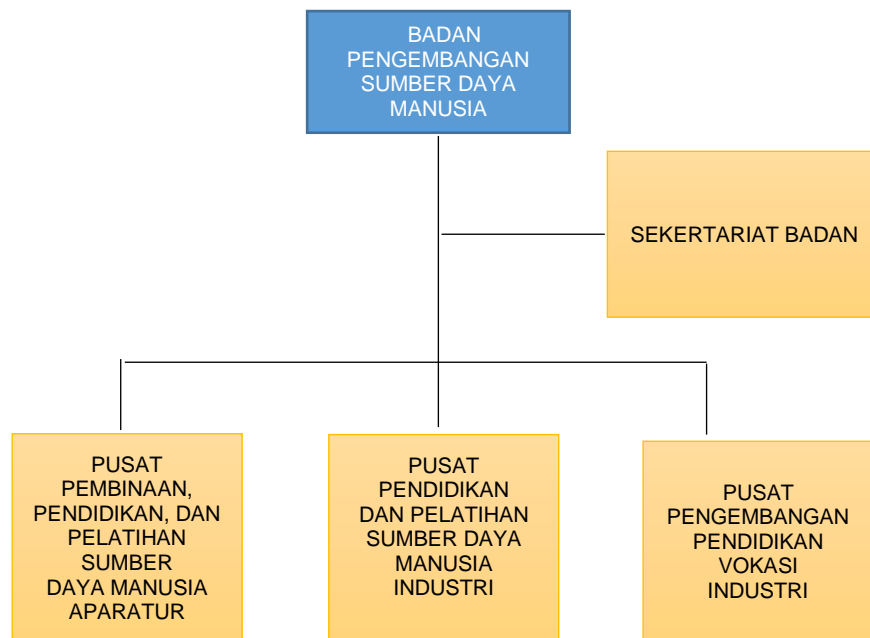
Memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan serta

fasilitasi infrastruktur dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia industri;

d) Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri

Memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pendidikan vokasi industri.

Struktur organisasi BPSDMI Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2022, dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini:



1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja BPSDMI selama tahun 2022. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja BPSDMI Kementerian Perindustrian tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, arah kebijakan dan struktur organisasi BPSDMI.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran BPSDMI tahun 2022 meliputi Renstra BPSDMI 2020-2024, Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja BPSDMI dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2022.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP BPSDMI tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis Organisasi

Rencana strategis (Renstra) BPSDMI 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah BPSDMI yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh BPSDMI beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra BPSDMI telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan kebijakan pengembangan industri nasional khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya manusia industri. Secara ringkas substansi Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dapat diilustrasikan sebagai berikut:

A. Visi

Visi BPSDMI adalah **“Menjadi vokasi industri bertaraf global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh”**.

Sejalan dengan visi tersebut, BPSDMI juga senantiasa menjunjung nilai-nilai yang telah ditetapkan bagi pegawai Kemenperin untuk menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan semangat bergotong royong yang diharapkan berdampak positif bagi pertumbuhan industri di Indonesia. Nilai-nilai tersebut terdiri dari integritas, profesional, inovatif, produktif, dan kompetitif. Lima nilai ini disebut INSAN OKE yang harus diketahui, dipahami, dan dijamin oleh semua aparatur Kemenperin ketika bekerja, bersikap, dan berkontribusi dalam pengembangan industri nasional.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan BPSDMI sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan vokasi industri dual system bertaraf global sebagai

- referensi model pendidikan vokasi nasional;
2. Mengembangkan dan menyelenggarakan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;
 3. Membangun Balai Diklat Industri sebagai Center of Exellences pembangunan tenaga kerja industri;
 4. Membangun Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) sebagai hub dan ecosystem center industri 4.0;
 5. Mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri pada lembaga pendidikan dan pelatihan industri;
 6. Membangun Digital ASN Talent Pool and Knowledge Management Center sebagai Pusat Pembinaan ASN Pembina Industri;
 7. Membangun pusat pengembangan (development center) infrastruktur kompetensi industri;
 8. Membangun wadah (hub center) sinergi, kolaborasi, dan kerja sama dengan seluruh stakeholder nasional dan global dalam mengembangkan vokasi industri.

C. Tujuan

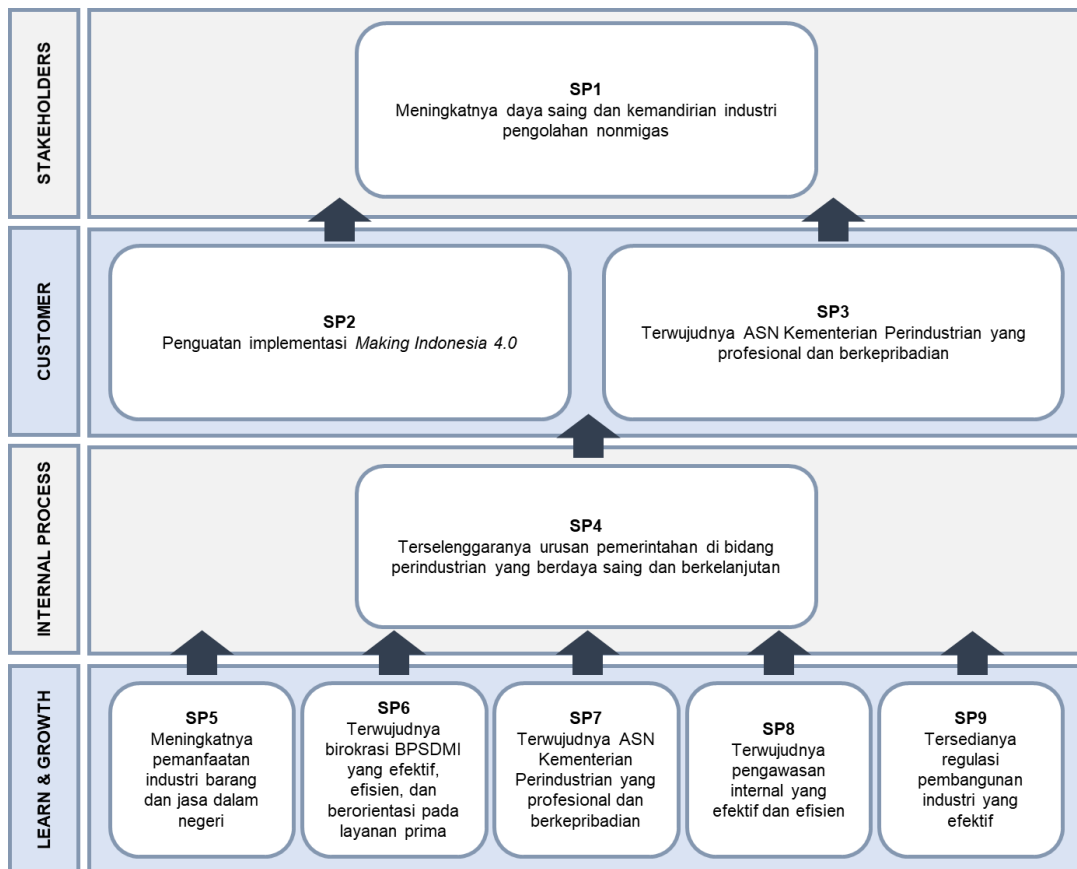
Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan SDM industri seperti disebutkan di atas, BPSDMI menetapkan tujuan pembangunan SDM industri 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

“Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh.”

D. Sasaran Program BPSDMI 2020-2024

Sasaran program pembangunan SDM Industri BPSDMI merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BPSDMI sebagai suatu *impact/outcome* dari rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSDMI. Dalam penyusunannya, BPSDMI menjabarkan masing-masing sasaran program dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran program tersebut diukur

melalui indikator kinerja program. Peta strategi BPSDMI dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar Peta Strategi BPSDMI Tahun 2020-2024

Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)

- **Sasaran program pertama (SP1)** yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas”, dengan indikator kinerja:
 1. Jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas
 2. Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja
 3. Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas
 4. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi meningkat
 5. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan

Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)

- **Sasaran program kedua (SP2)** yang akan dicapai adalah “Penguatan implementasi *Making Indonesia 4.0*”, dengan indikator kinerja:
 1. Jumlah SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya
 2. Jumlah implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi meningkat
 3. Persentase utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0
- **Sasaran program ketiga (SP3)** yang akan dicapai adalah “Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian”, dengan indikator kinerja:
 1. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik
 2. Efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional

Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran program pada perspektif proses internal merupakan sasaran yang dicapai melalui proses yang dilakukan oleh BPSDMI.

- **Sasaran Program keempat (SP4)**, yaitu “Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:
 1. Infrastruktur kompetensi industri (SKKNI) di bidang industri
 2. Jumlah fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri
 3. Jumlah asesor kompetensi dan lisensi
 4. Jumlah perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat
 5. Nilai minimum akreditasi program studi di politeknik
 6. Jumlah penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional
 7. Jumlah inkubator bisnis industri yang tumbuh

Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas,

dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output, outcome*, maupun *impact* dari kinerja BPSDMI. Terdapat 5 (lima) sasaran program yang akan dicapai, yakni:

- **Sasaran program kelima (SP5)**, yaitu “Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri”, dengan indikator kinerja:

1. Persentasi nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI

- **Sasaran program keenam (SP6)**, yaitu: “Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima”, dengan indikator kinerja:

1. Nilai laporan keuangan BPSDMI
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPSDMI
3. Nilai kearsian BPSDMI

- **Sasaran program ketujuh (SP7)**, yaitu “Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian”, dengan indikator kinerja:

1. Nilai rata-rata Indeks Kompetensi profesional ASN BPSDMI

- **Sasaran program kedelapan (SP8)**, yaitu “Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”, dengan indikator kinerja:

1. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti
2. Level Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) meningkat dari level 3

- **Sasaran program kesembilan (SP9)**, yaitu “Tersedianya regulasi terkait SDM industri yang efektif”, dengan indikator kinerja:

1. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI

E. Arah Kebijakan dan Strategi BPSDMI

Dalam rangka mewujudkan visi BPSDMI 2020-2024, yaitu menjadi vokasi industri bertaraf global yang mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh, BPSDMI menetapkan arah kebijakan BPSDMI 2020-2024 yang terbagi ke dalam empat bagian, yaitu:

- 1) Penguatan kelembagaan vokasi industri.

- 2) Penguatan kelembagaan politeknik dan akademi komunitas industri
- 3) Penguatan kelembagaan SMK industri
- 4) Penguatan kelembagaan Balai Diklat Industri

Dengan rincian sebagai berikut:

1) Penguatan Kelembagaan Vokasi Industri

Untuk menguatkan kelembagaan vokasi industri, BPSDMI memiliki delapan arah kebijakan, yaitu:

1. Mengembangkan pendidikan vokasi industri *dual system* bertaraf global sebagai referensi model pendidikan vokasi nasional.

Dalam upaya mendukung industrialisasi di Indonesia, pendidikan vokasi diharapkan dapat menerapkan pendidikan sistem ganda (*dual system education*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri. Pada implementasinya, penyelenggaraan pendidikan vokasi perlu berkolaborasi dengan industri dengan menitikberatkan proses pembelajaran di dua tempat, yaitu di sekolah/kampus dan di industri. Penyelenggaraan pendidikan sistem ganda dapat mendorong pelaku dunia usaha dan dunia industri untuk turut mengambil tanggung jawab yang lebih besar, serta mengisi lapangan kerja industri dengan profil lulusan yang terampil dan berpengetahuan tinggi (*high skilled & know how*).

2. Mengembangkan dan menyelenggarakan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri.

Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja industri saat ini dihadapkan pada tantangan besar dan aneka ragam kebutuhan pelatihan kerja di berbagai sektor industri. Hal ini terutama terkait dengan kebutuhan untuk merespons terjadinya disrupsi di berbagai bidang pekerjaan. Pada saat yang sama, upaya yang dilakukan juga harus merespon ledakan penduduk usia produktif (bonus demografi) yang perlu disiapkan kompetensinya agar dapat siap kerja. Belakangan bahkan ditambah dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dan setengah pengangguran.

Kondisi ini menuntut perlunya dikembangkan jenis dan sistem pelatihan yang dapat mengakomodasi kebutuhan industri, salah satunya dengan mengembangkan jenis pelatihan *triple skilling* mencakup:

- a. Pelatihan *skilling* yang bertujuan untuk memberikan kompetensi kepada calon tenaga kerja industri.
- b. Pelatihan *up-skilling* ditujukan bagi para tenaga kerja industri untuk meningkatkan keahlian teknis mereka ke level yang lebih tinggi dari keahlian yang sudah dimiliki.
- c. Pelatihan *re-skilling* bertujuan untuk menambah keahlian baru bagi para angkatan kerja untuk bidang keahlian lain sesuai dengan kebutuhan industri.

Untuk dapat menyelenggarakan pelatihan yang profesional, perlu dikembangkan sistem yang mencakup: perencanaan pelatihan yang terstruktur dan sistematis, penyediaan SDM penyelenggara dan instruktur yang kompeten, penyiapan fasilitas sarana dan prasarana yang modern dan memadai, pemanfaatan sistem informasi pelatihan yang terintegrasi, serta melakukan *monitoring* dan evaluasi pelatihan.

3. Membangun Balai Diklat Industri sebagai *center of excellences* pembangunan tenaga kerja industri.

Pengembangan SDM industri, utamanya tenaga kerja industri, pada era yang dinamis dan fleksibel ini memaksa adanya penguasaan keterampilan dan keahlian sesuai kebutuhan industri. Oleh sebab itu, pelatihan vokasi industri di Balai Diklat Industri (BDI) menyelenggarakan pelatihan jenis *triple skilling* yang mencakup pelatihan *skilling*, *up-skilling*, dan *re-skilling*. Sistem penyelenggaraan pelatihan vokasi industri ditetapkan menggunakan sistem *3-in-1*, meliputi: pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja bagi lulusan pelatihan. Pelatihan dilakukan dengan menggunakan kurikulum dan modul yang mengacu pada kompetensi yang dibutuhkan industri agar terbentuk *link-and-match* antara lembaga pelatihan dengan perusahaan industri agar menghasilkan lulusan pelatihan yang kompeten dan siap kerja.

Selain tenaga kerja industri, BDI juga diarahkan untuk menyiapkan wirausaha industri melalui inkubator bisnis dan menjalin kemitraan pengelolaan inkubator bisnis dengan pihak lain seperti: politeknik, asosiasi industri, komunitas industri, serta kementerian/lembaga terkait. BDI juga diarahkan untuk menyelenggarakan pelatihan/diklat bagi pembina industri, khususnya pelatihan jabatan fungsional yang jumlahnya meningkat seiring peralihan jabatan struktural menjadi fungsional pada akhir tahun 2020. Untuk menjalankan perannya, BDI harus dapat menjadi *center of excellences* dalam pembangunan SDM industri khususnya melalui jalur pelatihan vokasi industri. Pengelolaan manajemen dan fasilitas pelatihan pada BDI harus diarahkan agar mampu mendukung pencapaian visi dan tujuan BDI.

4. Membangun Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) sebagai *hub* dan *ecosystem center* industri 4.0.

Pembangunan Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) merupakan bagian dari implementasi peta jalan *Making Indonesia 4.0*. PIDI 4.0 menerapkan lima pilar dalam mendukung transformasi industri 4.0, yaitu:

- *Showcase center* yang berfungsi untuk meningkatkan *awareness* industri terhadap pentingnya penerapan industri 4.0.
- *Capability center* untuk membangun keahlian teknologi industri 4.0.
- *Ecosystem center* yang menghubungkan para *stakeholder* industri.
- *Delivery center* untuk transformasi perusahaan industri dalam penerapan teknologi 4.0.
- *Innovation center* dalam berbagai proyek uji coba dan *brokerage* di sektor industri.

Untuk memperluas jangkauan dan manfaat PIDI 4.0, serta penguatan peran unit pendidikan Kemenperin dalam penyediaan tenaga kerja industri yang adaptif terhadap revolusi industri 4.0, pembangunan satelit PIDI 4.0 dengan teknologi kunci yang berbeda dan spesifik di beberapa politeknik. Satelit PIDI 4.0 akan menjalankan setidaknya dua pilar layanan PIDI 4.0, yaitu sebagai *showcase center* dan *capability center* sesuai dengan spesialisasi industri di masing-masing

politeknik.

5. Mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri pada lembaga pendidikan dan pelatihan industri.

Saat ini tingkat kewirausahaan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, yaitu berada di angka 3,47%, di bawah Singapura (hampir 9%) atau Malaysia dan Thailand (hampir 5%). Untuk menjadi negara maju, dibutuhkan setidaknya 4% jumlah wirausaha. Oleh karena itu, pembentukan dan pengembangan wirausaha industri memerlukan intervensi dan dukungan dari pemerintah, tidak hanya dalam bentuk fasilitasi peralatan dan pendanaan, tetapi juga pembentukan SDM wirausaha yang berdaya saing.

Peran pembentukan SDM wirausaha industri dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi industri di politeknik/akademi komunitas Kemenperin. Keduanya telah dilengkapi dengan laboratorium dan *teaching factory* yang dapat digunakan sebagai sarana inkubasi. Sehingga, selain meluluskan tenaga kerja kompeten, politeknik dan akademi komunitas juga perlu membentuk wirausaha. Pengembangan peran sebagai inkubator bisnis tersebut tentunya perlu dilakukan dengan membangun kolaborasi dengan para *stakeholder* terkait, antara lain: Ditjen IKMA Kemenperin, BDI, lembaga pembiayaan, serta asosiasi industri.

6. Membangun *Digital ASN* dan *Knowledge Management Center* sebagai pusat pembinaan ASN pembina industri.

UU No. 3/2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa pembangunan SDM industri meliputi pembangunan pembina industri, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi di bidang industri. ASN bidang industri merupakan pemeran utama dalam pembangunan industri yang berdaya saing global di era revolusi industri 4.0. Untuk itu, pembangunan ASN pembina industri sebagai *Digital ASN* perlu disiapkan dan diprioritaskan untuk mendukung transformasi birokrasi digital di era revolusi industri 4.0.

Dalam rangka mendukung pembangunan *Digital ASN* yang inovatif, adaptif, dan progresif, membutuhkan program pengembangan dengan pendekatan yang lebih strategis serta mengintegrasikan optimalisasi sistem informasi dan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat diakomodasi dengan mewujudkan *Corporate University* Kemenperin. Strategi untuk mendukung terwujudnya *Corporate University* BPSDMI Kemenperin antara lain:

1. Mengembangkan kompetensi pejabat administratif dan fungsional melalui:
 - 1) Pengembangan kompetensi pejabat administratif melalui program pelatihan dan pendidikan.
 - 2) Pengembangan kompetensi pejabat fungsional melalui *job formation mapping*, *talent mapping*, sistem elektronik Daftar Usulan Perhitungan Angka Kredit (DUPAK), dan pola pengembangan jabatan fungsional.
2. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan ASN yang berbasis kompetensi melalui:
 - 1) Pengembangan program pendidikan dalam dan luar negeri.
 - 2) Pengembangan pelatihan ASN industri berbasis kompetensi
 - 3) Pengembangan infrastruktur pendidikan dan pelatihan SDM aparatur bidang industri.
3. Menyelenggarakan *smart training* dan sertifikasi kompetensi bagi ASN melalui:
 - 1) *e-Self learning*
 - 2) *Classical learning*
 - 3) *Blended learning*
4. Mengembangkan sinergi pembinaan jabatan fungsional melalui kerja sama antar satuan kerja dan unit pembina teknis jabatan fungsional di lingkungan Kemenperin.
5. Mengembangkan *Knowledge Management Center* ASN pembina industri.

7. Membangun pusat pengembangan (*development center*) infrastruktur kompetensi industri.

UU No. 3/2014 mengamanatkan pembangunan SDM industri dilakukan untuk menghasilkan SDM yang kompeten. Amanat tersebut dapat diartikan bahwa untuk mengukur capaian kinerja pembangunan SDM industri perlu dikembangkan infrastruktur kompetensi. Infrastruktur kompetensi meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan tenaga asesor kompetensi. Kompetensi-kompetensi yang sudah distandarkan dalam SKKNI pun perlu dikualifikasikan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) agar memudahkan penerapan baik dalam hal pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

Upaya pembangunan infrastruktur kompetensi tidak dapat dilakukan hanya oleh BPSDMI, tetapi juga kolaborasi dari seluruh pihak, terutama: industri, asosiasi industri, K/L terkait, serta setiap direktorat pembina industri di Kemenperin. Guna mengkoordinasikan kegiatan penyusunan dan pengembangan standar kompetensi dan kualifikasi kompetensi sektor industri, telah dibentuk Komite Standar Kompetensi melalui Kepmenperin No. 1456/2019. Melalui keberadaan komite tersebut, masing-masing direktorat pembina industri di Kemenperin memiliki peran yang sama dalam membangun infrastruktur kompetensi, khususnya SKKNI dan KKNI, di lingkup industri binaannya di bawa koordinasi ketua komite (Kepala BPSDMI) dan sekretariat komite (Pusdiklat SDM Industri). Komite Standar Kompetensi akan dikembangkan menjadi pusat pengembangan infrastruktur kompetensi di BPSDMI.

8. Membangun wadah (*hub center*) sinergi, kolaborasi, dan kerja sama dengan seluruh *stakeholder* nasional dan global dalam mengembangkan vokasi industri.

Arah kebijakan ini dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan sinergi kolaborasi dan kerja sama dengan *stakeholder*.

Kemenperin melalui BPSDMI memimpin inisiatif pengembangan *link and*

match antara dunia industri dengan dunia pendidikan dengan mengkoordinasikan dan menjadi inspirasi untuk mendorong peran aktif sektor terkait.

2) Penguatan kerja sama luar negeri bidang vokasi industri.

Kerja sama dengan mitra luar negeri bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik institusi dan SDM yang kompetitif dalam membangun kebersamaan regional dan internasional untuk pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

2) Penguatan Kelembagaan Politeknik dan Akademi Komunitas Industri

Untuk memperkuat kelembagaan politeknik dan akademi komunitas industri, BPSDMI memiliki tujuh arah kebijakan, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan *dual system* dengan *STEM learning model* berstandar global.

Strategi implementasi arah kebijakan ini akan menyorot tiga aspek, yaitu:

- 1) Pendidikan sistem ganda (*dual system education*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri. Untuk mewujudkan pendidikan sistem ganda, tahapan yang wajib dilakukan antara lain:
 - a. peningkatan kerja sama dengan dunia uaha dan dunia industri (DUDI);
 - b. penerapan kurikulum *link and match* dengan industri;
 - c. revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran;
 - d. penerapan *teaching factory/teaching industry*;
 - e. peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi;
 - f. penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi;
 - g. pengembangan laboratorium *teaching factory* dan lokakarya (*workshop*) terintegrasi;
 - h. pengembangan *smart* dan *cyber campus*; dan
 - i. pengembangan program studi baru.

- 2) Model pembelajaran STEM (*science, technology, engineering, and mathematics*) yang mengintegrasikan empat bidang dalam sekali pengalaman belajar. Model ini diterapkan dalam perkuliahan/pembelajaran agar dapat mendorong mahasiswa untuk mendesain, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi; mengasah kognitif, manipulatif dan afektif; serta mengaplikasikan pengetahuan. Pembelajaran berbasis STEM dapat melatih mahasiswa dalam menerapkan pengetahuannya untuk membuat desain sebagai bentuk pemecahan masalah terkait lingkungan dengan memanfaatkan teknologi.
- 3) Pengembangan pendidikan berstandar global dengan mendorong politeknik/akademi komunitas untuk mendapatkan akreditasi internasional dari ASIIN (*the Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics*) melalui empat tahapan, yaitu:
 - a. evaluasi dan sertifikasi institusional;
 - b. *workshop* dan pelatihan; dan
 - c. sertifikasi; serta
 - d. pasca-akreditasi/sertifikasi (pemeliharaan).

2. Melaksanakan penelitian terapan *problem solving* di *leading sector* industri prioritas.

Arah kebijakan ini diimplementasikan melalui enam strategi, yaitu:

- 1) Penelitian terapan *problem solving* pada tujuh sektor industri prioritas, yaitu:
 - 1) industri pangan; 2) industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan; 3) industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka; 4) industri alat transportasi; 5) industri elektronika dan telematika; 6) industri pembangkit energi; 7) industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri.
- 2) Implementasi hasil penelitian di industri dengan tujuan meningkatkan daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas, serta meningkatkan kemampuan industri dalam negeri. Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan inovasi teknologi;
 - b. peningkatan mutu dan diversifikasi produk/proses;
 - c. implementasi hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa industri untuk IKM; dan
 - d. komersialisasi hasil litbang teknologi industri dan perlindungan terhadap pemanfaatan hasil inovasi teknologi.
- 3) Perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan paten hasil penelitian.
 - 4) Publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional.
 - 5) Kompetisi nasional untuk inovasi vokasi industri.

3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pengembangan ekosistem IKM.

Implementasi arah kebijakan ini dilakukan dengan dua strategi, yaitu:

- 1) Mengembangkan ekosistem industri kecil menengah.
- 2) Membangun kemitraan.

Adapun jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan di politeknik/akademi komunitas antara lain:

- a. pendampingan teknologi;
- b. pelatihan;
- c. pelayanan konsultasi industri; dan
- d. penyuluhan.

4. Mengembangkan kompetensi industri 4.0 melalui pembangunan satelit PID 4.0.

Pengembangan pendidikan vokasi harus mampu mengadaptasi perubahan melalui penyiapan politeknik dan akademi komunitas sebagai *showcase center* dan *capability center* industri 4.0 khususnya untuk industri kecil dan menengah.

Arah kebijakan ini diselenggarakan dengan dua strategi, yaitu:

- 1) Pembangunan satelit PID 4.0.
- 2) Implementasi kurikulum dan modul pembelajaran 4.0.

5. Membangun kelembagaan inkubator bisnis industri yang terintegrasi.

Unit pendidikan tinggi di Kemenperin memiliki tugas tidak hanya untuk menciptakan tenaga kerja kompeten, tetapi juga menghasilkan wirausaha industri. Untuk mewujudkan ini, maka perlu dibangun inkubator bisnis yang terintegrasi. Program Inkubator Bisnis merupakan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada peserta inkubasi (*tenant*). *Tenant* inkubator bisnis di perguruan tinggi adalah mahasiswa tingkat akhir yang telah memiliki prospektif usaha. Dalam penyelenggaraannya, politeknik/akademi komunitas perlu berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, BDI, asosiasi industri, dan pihak terkait lainnya.

Saat ini seluruh politeknik pendidikan vokasi Kemenperin memiliki program inkubator bisnis dengan beragam spesialisasi komoditi industri yang dikembangkan. Selain itu, berbagai K/L juga memiliki program penyiapan wirausaha yang dapat dikolaborasikan. Di Kemenperin sendiri, upaya penciptaan wirausaha baru banyak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka dalam bentuk bimbingan, pendampingan dan bantuan peralatan. Penyelenggaraan inkubator bisnis yang mencakup fase pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi dapat dilakukan berkolaborasi dengan pihak-pihak tersebut.

6. Mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi LSP.

Saat ini hampir seluruh politeknik dan akademi komunitas telah memiliki LSP Pihak 1 dengan skema sertifikasi sesuai dengan bidang keahlian yang diselenggarakan. Seiring perkembangan kondisi dan kebutuhan, skema sertifikasi perlu terus dikembangkan. Hal-hal yang perlu dilakukan politeknik dan akademi komunitas dalam mengembangkan perangkat sertifikasi kompetensi adalah:

- 1) Pengembangan skema sertifikasi.
- 2) Mengembangkan Materi Uji Kompetensi (MUK).
- 3) Penguatan asesor kompetensi dari segi teknis dan metodologi.
- 4) Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

7. Mengembangkan kelas industri.

Kelas industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis sesuai standar industri tertentu yang akan langsung bekerja pada industri. Penyiapan kelas industri dilakukan melalui program pendidikan setara D1/D2 dan kelas khusus program pendidikan D3/D4.

3) Penguatan Kelembagaan SMK Industri

Untuk memperkuat kelembagaan SMK industri, BPSDMI memiliki lima arah kebijakan, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan *dual system* dengan *STEM learning model* berstandar global.

Strategi implementasi arah kebijakan ini akan menyorot tiga aspek, yaitu:

- 1) Pendidikan sistem ganda (*dual system education*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri. Untuk mewujudkan pendidikan sistem ganda, tahapan yang wajib dilakukan antara lain:
 - a. peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
 - b. penerapan kurikulum *link and match* dengan industri;
 - c. revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran;
 - d. penerapan *teaching factory/teaching industry*;
 - e. peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi;
 - f. penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi;
- 2) Pengembangan laboratorium *teaching factory* dan lokakarya (*workshop*) terintegrasi melalui:
 - a. kemitraan strategis dengan DUDI;
 - b. penataan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. lingkungan kampus.
- 3) Model pembelajaran STEM (*science, technology, engineering, and mathematics*) yang mengintegrasikan empat bidang dalam sekali

pengalaman belajar. Model ini diterapkan dalam perkuliahan/pembelajaran agar dapat mendorong siswa untuk mendesain, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi; mengasah kognitif, manipulatif dan afektif; serta mengaplikasikan pengetahuan. Pembelajaran berbasis STEM dapat melatih mahasiswa dalam menerapkan pengetahuannya untuk membuat desain sebagai bentuk pemecahan masalah terkait lingkungan dengan memanfaatkan teknologi.

- 4) Pengembangan pendidikan bertaraf internasional. Pengembangan pendidikan bertaraf internasional sangat diperlukan sebagai “*proof of concept*” yang menegaskan bahwa pendidikan nasional telah setara dengan dunia internasional agar dapat membangun reputasi dan bagian upaya “*international alignment*”. Pengembangan pendidikan bertaraf internasional juga merupakan salah satu media strategis karena langsung menunjukkan kualitas *outcome* pendidikan.
- 5) Pengembangan *smart* dan *cyber school*, yaitu komunitas pengetahuan yang kreatif dan berjiwa wirausaha (*creative-entrepreneurial knowledge community*), sehingga komunitas sekolah menjadi cerdas dalam mencapai tujuan akademisnya berkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui *smart school*, komunitas, program dan aktivitas, fasilitas fisik, dan sumber daya berada dalam fungsi *cyber*. Dalam fungsi *cyber* ini, diharapkan dapat menyediakan layanan informasi, komputasi, dan komunikasi secara terintegrasi pada semua anggota komunitas sekolah.

2. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pengembangan ekosistem IKM.

Dalam upaya pengembangan kompetensi, SMK diharapkan dapat terlibat pengembangan ekosistem IKM. Kerja sama dengan IKM dilakukan dengan pola saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kerja sama diselenggarakan dalam rangka:

- menggali dan memahami kebutuhan dan permasalahan masyarakat yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan;
- melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan diutamakan berupa pemanfaatan hasil penelitian secara konkret;
- mendapatkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang memadai.

Jenis kerja sama yang dapat diterapkan di SMK adalah sebagai berikut:

- 1) Pendampingan teknologi
- 2) Pelatihan
- 3) Pelayanan konsultasi industri
- 4) Penyuluhan

3. Mengembangkan kompetensi industri 4.0 melalui pembangunan satelit PIDI 4.0.

Pengembangan pendidikan vokasi harus mampu mengadaptasi perubahan melalui penyiapan politeknik dan akademi komunitas sebagai *showcase center* dan *capability center* industri 4.0 khususnya untuk industri kecil dan menengah.

Arah kebijakan ini diselenggarakan dengan dua strategi, yaitu:

- 1) Pembangunan satelit PIDI 4.0.
- 2) Implementasi kurikulum dan modul pembelajaran 4.0.

4. Mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi LSP.

Saat ini hampir seluruh SMK telah memiliki LSP Pihak 1 dengan skema sertifikasi sesuai dengan bidang keahlian yang diselenggarakan. Seiring perkembangan kondisi dan kebutuhan, skema sertifikasi perlu terus dikembangkan. Hal-hal yang perlu dilakukan SMK dalam mengembangkan perangkat sertifikasi kompetensi adalah:

- 1) Pengembangan skema sertifikasi.
- 2) Mengembangkan Materi Uji Kompetensi (MUK).
- 3) Penguatan asesor kompetensi dari segi teknis dan metodologi.
- 4) Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

5. Mengembangkan kelas industri.

Kelas industri merupakan kelas khusus yang diselenggarakan bekerjasama dengan industri dengan tujuan membekali calon tenaga kerja atau lulusan dengan keahlian terapan atau keterampilan teknis yang diperlukan untuk bidang pekerjaan tertentu.

4) Penguatan Kelembagaan Balai Diklat Industri

Untuk memperkuat kelembagaan Balai Diklat Industri (BDI), BPSDMI memiliki delapan arah kebijakan, yaitu:

1. Mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri

Sejalan dengan perkembangan industri nasional dan global serta mempertimbangkan tugas pokok BDI, maka kompetensi BDI dalam menyelenggarakan diklat bagi SDM industri perlu terus dikembangkan. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan kompetensi tenaga kerja industri dari sisi jenjang/level/jabatan (okupasi) serta jumlah tenaga kerja. Langkah pemetaan tersebut dilakukan untuk:

- mendapatkan potret kebutuhan tenaga kerja Industri dari 7 (tujuh) sektor industri prioritas serta pola peningkatan kualitas SDM industri yang dibutuhkan.
- mengetahui potret kekuatan internal BDI dalam melaksanakan pelatihan untuk menjawab potret kebutuhan tersebut.

2. Mengembangkan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) merupakan salah satu model program pengembangan SDM industri dilaksanakan sejak tahun 2016 BDI. PBK dilakukan untuk meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kerja industri agar sesuai dengan kebutuhan pada sektor industri terkait. Sehingga, tercipta *link and match* antara *supply* tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri. PBK menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap berdasarkan standar kompetensi yang diharapkan mampu menghasilkan

tenaga kerja industri yang kompeten dan berdaya saing. Dengan ditetapkannya ruang lingkup dan spesialisasi BDI, masing-masing BDI harus melengkapi program dan modul pelatihan berbasis kompetensi agar dapat melaksanakan amanah pelatihan vokasi industri dengan sistem *3-in-1* (pelatihan, uji kompetensi, dan penempatan pada sektor industri).

3. Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi (*skilling, upskilling, dan re-skilling*) tenaga kerja industri dengan sistem *3-in-1*

Penyelenggaraan pelatihan vokasi industri di BDI dilakukan dengan sistem *3-in-1*, yaitu pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi dan penempatan lulusan pelatihan. Untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi industri dengan sistem *3-in-1*, langkah yang perlu dilakukan BDI yaitu:

- 1) *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama dengan industri
- 2) Rekrutmen peserta pelatihan
- 3) Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi
- 4) Penempatan kerja
- 5) *Tracer study* alumni peserta pelatihan

4. Mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP

Saat ini seluruh BDI telah memiliki LSP Pihak 1 dengan skema sertifikasi sesuai jenis diklat yang dilakukan. Seiring perkembangan kondisi dan kebutuhan diklat, skema sertifikasi perlu terus dikembangkan. Hal-hal yang perlu dilakukan BDI dalam mengembangkan perangkat sertifikasi kompetensi antara lain:

- 1) Pengembangan skema sertifikasi
- 2) Mengembangkan Materi Uji Kompetensi (MUK)
- 3) Penguatan asesor kompetensi dari segi teknis dan metodologi
- 4) Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 5) Sistem digitalisasi uji kompetensi

5. Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional

Selain menyelenggarakan sertifikasi kompetensi melalui LSP yang telah dilisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) seperti yang selama ini dilakukan, BDI

perlu melakukan peninjauan kerja sama dengan sertifikasi yang berlaku di negara lain ataupun diakui secara internasional. Ke depan, BDI diharapkan dapat menjadi *Authorized Training Body* (ATB) pada sektor-sektor industri sesuai spesialisasi kompetensinya. Langkah yang dapat dilakukan BDI untuk mencapai hal tersebut, yaitu:

- 1) Identifikasi standar kompetensi internasional
- 2) Identifikasi lembaga sertifikasi internasional
- 3) Kerjasama dengan lembaga sertifikasi internasional

6. Membangun sinergi serta menumbuhkan wirausaha industri melalui penyelenggaraan inkubator bisnis

Selain fokus pada penyiapan tenaga kerja industri kompeten, BDI juga berperan dalam penyiapan wirausaha industri melalui jalur inkubator bisnis. Penyelenggaraan inkubator bisnis di BDI harus tetap mempertimbangkan spesialisasi kompetensi serta kompetensi inti yang terdapat di wilayahnya. Tahapan pengembangan inkubator bisnis yang dapat dilakukan BDI adalah:

- 1) Menjalinkan kemitraan dengan asosiasi, pelaku industri, politeknik, dan K/L terkait sebagai akselerator pengembangan inkubator bisnis vokasi industri.
- 2) Mendorong peserta pelatihan menjadi wirausaha.
- 3) Memfasilitasi kemitraan dengan industri besar.
- 4) Pengembangan fasilitas inkubator bisnis.
- 5) Pengembangan SDM inkubator bisnis (*coach, trainer, pengelola*).

7. Membangun *smart training facility*

Pelatihan yang diselenggarakan bagi para SDM industri sudah sepatutnya perlu disesuaikan dengan era industri 4.0 yang menjadi tren global maupun nasional. Untuk menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan bagi industri 4.0, dimulai dengan membangun fasilitas pelatihan yang cerdas (*smart training facility*). *Smart training facility* memanfaatkan teknologi terkini sebagai fasilitas penyelenggaraan pelatihan. Ragam komponen *smart training facility* yang dimaksudkan mencakup *smart infrastructure* (perangkat), *smart classroom*, dan

smart monitoring peserta pelatihan. Dalam membangun *smart training facility*, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh BDI, yaitu:

- 1) Mengembangkan infrastruktur berbasis *smart*/industri 4.0.
- 2) Mengembangkan model *smart training*.
- 3) Mengembangkan *Learning Management System* (LMS) yang terintegrasi.

8. Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian

Pembina industri merupakan salah satu unsur SDM industri selain tenaga kerja industri dan wirausaha industri. Kebijakan peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang telah diambil pemerintah berdampak pada peningkatan kebutuhan pelatihan pada setiap jenjang jabatan fungsional. Arah kebijakan pengembangan dan pembinaan pembina industri baik di tingkat pusat maupun daerah telah disusun oleh Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan (Pusbindiklat) SDM Aparatur Kementerian Perindustrian. Sebagai unit kerja pelatihan yang dimiliki Kemenperin, BDI juga mendapatkan mandate untuk menyelenggarakan pelatihan bagi pembina industri pusat dan daerah, khususnya bagi jabatan fungsional yang berada di lingkungan Kemenperin. Langkah yang dilakukan BDI sebagai penyelenggara pelatihan bagi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian yaitu:

- 1) Rekrutmen peserta
- 2) Penyiapan tenaga pengajar
- 3) Penyiapan sarana prasana
- 4) Penyiapan Tempat Uji Kompetensi bagi pejabat fungsional

F. Program dan Kegiatan

BPSDMI kementerian perindustrian menetapkan 2 program yang dilaksanakan yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Program Dukungan Manajemen melalui 5 kegiatan yaitu Pelatihan Vokasi Industri, Pendidikan Tinggi Vokasi Industri, Pendidikan Menengah Kejuruan Industri, Peningkatan Kompetensi ASN, dan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pembangunan Sumber Daya

Manusia Industri.

Adapun kegiatan rincian output (KRO) BPSDMI yang dilakukan untuk mencapai kegiatan dan program tersebut:

1. Pelatihan Vokasi Industri (4957)

- a. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (BDB)
 - Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Industri
- b. Pelatihan Bidang Industri (DCH)
 - Asessor Lisensi dan Asessor Kompetensi
- c. Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan (FAI)
 - Dokumen Pendidikan Non Formal Industri Berbasis Kompetensi
- d. Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (PBK)
 - Rancangan SKKNI Sektor Industri
- e. Sertifikasi Profesi dan SDM (PDI)
 - Tenaga Kerja Industri Kompeten yang Tersertifikasi
- f. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (QDC)
 - Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri
- g. Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan (RBL)
 - Bangunan/Gedung Pelatihan Vokasi Industri
 - Peralatan Pelatihan Vokasi Industri
- h. Pelatihan Bidang Industri (SCH)
 - Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1
 - Tenaga Kerja Industri 4.0

2. Pendidikan Tinggi Vokasi Industri (4958)

- a. Perizinan Lembaga (ACD)
 - Lembaga Pendidikan Baru Yang Didirikan di Dalam WPPI dan KI
- b. Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan (FAI)
 - Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi
- c. Kerja sama (PEC)
 - Pendidikan Tinggi yang Link and Match dengan Industri

- d. Sarana Bidang Industri dan Perdagangan (RAH)
 - Pilot Project Learning Factory 4.0
- e. Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi (RBJ)
 - Bangunan/Gedung Pendidikan Tinggi Vokasi Industri
 - Peralatan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri
- f. Pendidikan Vokasi Bidang Industri (SAG)
 - Mahasiswa dan Lulusan Program DIII dan DIV Berbasis Kompetensi
 - Mahasiswa dan Lulusan Program D I dan D II Berbasis Kompetensi

3. Pendidikan Tinggi Vokasi Industri (4959)

- a. Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan (FAI)
 - Dokumen Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi
 - Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bidang Industri yang Terbentuk dan Beroperasi
 - Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Industri yang Terbentuk dan Beroperasi
- b. Kerja sama (PEC)
 - SMK yang Link And Match dengan Industri
- c. Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (RBI)
 - Bangunan/Gedung Pendidikan Vokasi Industri
 - Peralatan Pendidikan Menengah Vokasi Industri
- d. Pendidikan Vokasi Bidang Industri (SAG)
 - SDM yang Mengikuti Pendidikan Menengah Kejuruan Industri

4. Peningkatan Kompetensi ASN (4960)

- a. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal (EAM)
 - SDM Aparatur Lulusan Diklat Struktural, Fungsional, dan Teknis Industri
 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan

5. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (6043)

- a. Layanan Perkantoran (EAA)

- Layanan Perkantoran BPSDMI Pusat
- Layanan Perkantoran Politeknik Industri
- Layanan Perkantoran SMK Industri
- Layanan Perkantoran Balai Diklat Industri
- b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (EAB)
 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal BPSDMI Pusat
 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Politeknik Industri
 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal SMK Industri
 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Balai Diklat
- c. Layanan Sarana Internal (EAC)
 - Layanan Sarana dan Prasarana BPSDMI Pusat
 - Layanan Sarana dan Prasarana Politeknik Industri
 - Layanan Sarana dan Prasarana SMK Industri
 - Layanan Sarana Prasarana Balai Diklat industri
- d. Bantuan Produk (QEC)
 - Bantuan Masker Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PPKM

2.1.2 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahun 2022 ini merupakan pembabakan dan penjabaran dari Renstra BPSDMI, dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan BPSDMI selama satu tahun. Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Kinerja Tahun 2022, BPSDMI menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja.

Pada tahun 2022 Kementerian Perindustrian melakukan revisi perjanjian kinerja sehingga BPSDMI selaku unit di lingkungan Kementerian Perindustrian juga melakukan penyesuaian dengan melakukan revisi rencana strategis dan rencan kinerja 2022 dengan indikator sebagai berikut:

- **Tujuan**

Sasaran Tujuan Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional, dengan Indikator Tujuan Tersedianya SDM Industri yang kompeten sebanyak 30.000

orang.

- **Perspektif Stakeholder**

- **Sasaran Program 1** Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas, dengan indikator kinerja:

1. Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas 20,84 Juta Orang
2. Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja sebanyak 14,96%
3. Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas sebesar 115,77 Rp Juta/orang/tahun
4. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi 25.700 orang
5. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan sebesar 79%

- **Perspektif Customer**

- **Sasaran Program 2** Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0, dengan indikator kinerja:

1. SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya sebanyak 400 orang
2. Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi sebanyak 5 Implementasi
3. Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 sebesar 70%

- **Sasaran Program 3** Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian, dengan indikator kinerja:

1. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik sebesar 85%
2. Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional sebesar 75%

- **Perspektif Internal Process**

- **Sasaran Program 4** Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan, dengan indikator kinerja:

1. Infrastruktur kompetensi industri sebanyak 10 SKKNI
2. Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industry sebanyak 20 LSP

3. Asesor kompetensi dan lisensi sebanyak 300 orang
4. Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat sebanyak 8 perusahaan
5. Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik senilai 331 (B)
6. Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional sebanyak 150 penelitian
7. Inkubator Bisnis industri yang tumbuh sebanyak 50 tenant

- **Perspektif Learn & Growth**

- **Sasaran Program 5** Meningkatkan Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri, dengan indikator kinerja:
 1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI sebesar 60%
- **Sasaran Program 6** Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja:
 1. Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 74
 2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 74
 3. Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri senilai 77
- **Sasaran Program 7** Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian, dengan indikator kinerja:
 1. Rata-rata Indeks Kompetensi, professional ASN BPSDMI senilai 73
- **Sasaran Program 8** Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja:
 1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sebesar 92%
 2. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) selevel 3
- **Sasaran Program 9** Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif, dengan indikator kinerja:
 1. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI sebesar 76%

2.1.3 Indikator Kinerja Utama BPSDMI

Dari sasaran program dan indikator kinerja diatas, BPSDMI menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi dengan target 25.700 orang
2. Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi dengan target 5 Implementasi
3. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan target 79%
4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI dengan target 60%

2.2 Dukungan Anggaran

Untuk mewujudkan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, tahun anggaran 2022 alokasi anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (Pusat) sendiri adalah sebesar 258.262.889.000. Sedangkan untuk anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan Satuan Kerja di Lingkungan BPSDMI adalah Rp. 945.299.536.000 yang digunakan untuk membiayai kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan Satuan Kerja yang berada di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Pagu
019.10	<u>BPSDMI</u>	945.299.536.000
579331	<u>POLITEKNIK AKA BOGOR</u>	40.274.610.000
579332	<u>SMAK BOGOR</u>	23.858.668.000
579333	<u>POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA</u>	32.455.971.000
579334	<u>SMTI YOGYAKARTA</u>	19.253.783.000
579335	<u>POLITEKNIK ATI MAKASSAR</u>	27.720.371.000
579336	<u>SMTI MAKASSAR</u>	18.103.360.000
579337	<u>SMAK MAKASSAR</u>	17.826.142.000
579338	<u>POLITEKNIK STTT BANDUNG</u>	35.549.966.000
579339	<u>BDI YOGYAKARTA</u>	34.661.180.000

Kode	Uraian	Pagu
579340	BDI MEDAN	18.132.882.000
579341	BDI MAKASSAR	28.806.130.000
579342	BDI DENPASAR	26.014.520.000
579343	BDI PADANG	18.834.340.000
579344	BDI SURABAYA	31.802.948.000
579345	SMTI BANDA ACEH	17.028.434.000
579346	POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN	29.250.485.000
579347	POLITEKNIK INDUSTRI LOGAM MOROWALI	13.164.203.000
579348	AKOM BANTAENG	12.281.607.000
579349	POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU KENDAL	13.404.240.000
579350	POLITEKNIK STMI JAKARTA	35.388.365.000
579351	POLITEKNIK APP JAKARTA	30.762.857.000
579352	AKOM SURAKARTA	16.499.827.000
579355	SMTI PADANG	18.780.408.000
579356	SMTI BANDAR LAMPUNG	19.400.851.000
579357	SMTI PONTIANAK	17.960.260.000
579358	SMAK PADANG	23.254.577.000
579359	POLITEKNIK ATI PADANG	30.583.579.000
579360	BDI JAKARTA	35.982.083.000
579361	BPSDMI	258.262.889.000

Dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pengembangan sumber daya manusia industri. BPSDMI pada tahun 2022 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 945.299.536.000 yang dialokasikan untuk membiayai satu program yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Terdapat tambahan pagu dari hibah luar negeri, BLU (Politeknik AKA Bogor), dan pengurangan pagu dari penarikan blokir automatic adjustment sehingga pagu mengalami perubahan dari pagu awal tahun 2022 sebesar Rp. 982.000.000.000 menjadi Rp. 945.299.536.000 pada akhir tahun 2022 (data bersumber dari SatuDJA) yang dialokasikan untuk membiayai dua program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Program Dukungan Manajemen.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri di dasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Nomor SP DIPA-019.10-0/2022 tanggal 17 November 2021. Selama periode berlangsung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusiai Industri melakukan 5 (lima) kali perubahan anggaran dengan detail sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perubahan Pagu

Kode	Uraian	Jan (Awal)	Apr	Sep	Nov	Des (Akhir)
019.10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	982.000.000.000	982.338.623.000	985.889.103.000	942.325.272.000	945.299.536.000
4957.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
4957.BDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	1.900.000.000	1.900.000.000	2.352.900.000	2.198.454.000	2.198.454.000
4957.DCH	Pelatihan Bidang Industri	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
4957.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	1.398.965.000	1.398.965.000	1.398.965.000	1.398.374.000	1.398.374.000
4957.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
4957.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
4957.RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	52.408.889.000	52.408.889.000	47.728.889.000	47.728.889.000	47.728.889.000
4957.RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	801.035.000	801.035.000	801.035.000	304.998.000	304.998.000
4957.SCH	Pelatihan Bidang Industri	181.700.000.000	181.700.000.000	179.592.500.000	169.469.499.000	169.469.499.000
4958.ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	0	435.000.000	0	435.000.000	435.000.000
4958.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	13.723.658.000	14.371.061.000	14.355.416.000	14.221.877.000	14.842.877.000
4958.RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	4.096.065.000	4.096.065.000	12.796.545.000	13.705.313.000	13.705.313.000
4958.SAG	Pendidikan Vokasi Bidang Industri	94.956.118.000	94.212.338.000	93.392.162.000	87.735.844.000	87.735.844.000
4959.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	5.748.518.000	5.748.518.000	5.832.753.000	5.197.681.000	5.962.145.000
4959.PEC	Kerja sama	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000

4959.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	76.258.414.000	76.258.414.000	76.934.257.000	76.934.257.000	77.520.349.000
4959.SAG	Pendidikan Vokasi Bidang Industri	36.904.115.000	36.904.115.000	36.681.340.000	34.192.556.000	35.040.319.000
4960.EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000
6043.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	38.212.974.000	38.212.974.000	37.940.611.000	31.840.863.000	31.843.043.000
6043.EAD	Layanan Sarana Internal	4.380.420.000	3.626.420.000	4.054.210.000	4.666.124.000	4.666.124.000
6043.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	443.510.829.000	443.510.829.000	442.888.920.000	423.591.943.000	423.744.708.000
6043.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	0	754.000.000	754.000.000	2.703.600.000	2.703.600.000
Keterangan		(Pagu Awal)	Hibah Luar Negeri di STTT Bandung untuk penyelenggaraan Kegiatan Hibah Smartex - Erasmus	Penambahan pagu BLU AKA Bogor	Penarikan blokir AA oleh kementerian keuangan	Penambahan pagu BLU AKA Bogor (Pagu Akhir)

Dengan anggaran DIPA Induk BPSDMI tersebut kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Program Dukungan Manajemen BPSDMI Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

a) Pelatihan Vokasi Industri

Pelatihan Vokasi Industri memiliki pagu anggaran sebesar Rp 231.100.214.000 dengan output:

1. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (LSP) sebesar Rp. 2.000.000.000
2. Fasilitasi dan Pembinaan Start Up (Inkubator Bisnis) sebesar Rp. 2.198.454.000
3. Pelatihan Bidang Industri (Diklat assessor dan RCC asessor) sebesar Rp. 2.000.000.000
4. Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan (Peningkatan kelembagaan BDI) sebesar Rp. 1.398.374.000
5. Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (RSKKNi/RKKNi) sebesar Rp. 3.000.000.000
6. Sertifikasi Profesi dan SDM (Sertifikasi Kompetensi) sebesar Rp. 3.000.000.000
7. Sarana Bidang Industri dan Perdagangan (PIDi 4.0) sebesar Rp. 47.728.889.000
8. Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan (Belanja modal BDI) sebesar Rp. 304.998.000
9. Pelatihan Bidang Industri (Diklat 3 in 1 dan Diklat 4.0) sebesar Rp. 169.469.499.000

b) Pendidikan Tinggi Vokasi Industri

Pendidikan Tinggi Vokasi Industri memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 116.719.034.000 dengan output:

1. Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (RSKKNi Politeknik ATI Makassar) sebesar Rp. 435.000.000
2. Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan (Peningkatan Kelembagaan Politeknik/Akademi Komunitas) sebesar Rp. 14.842.877.000
3. Sarana Bidang Industri dan Perdagangan (Belanja modal Politeknik/Akademi Komunitas) sebesar Rp. 13.705.313.000
4. Pendidikan Vokasi Bidang Industri (Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi) sebesar Rp. 87.735.844.000

c) Pendidikan Menengah Kejuruan Industri

Pendidikan Menengah Kejuruan Industri memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 121.522.813.000 dengan output:

1. Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan (Peningkatan Kelembagaan SMK) sebesar Rp. 5.962.145.000
2. Kerja sama (Kerjasama SMK yang Link and Match) sebesar Rp. 3.000.000.000
3. Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (Belanja modal SMK) sebesar Rp. 77.520.349.000
4. Pendidikan Vokasi Bidang Industri (Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Vokasi) sebesar Rp. 35.040.319.000

d) Peningkatan Kompetensi ASN

Peningkatan Kompetensi ASN memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 13.000.000.000 dengan output:

1. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal (Diklat ASN, Latsar CPNS, Rintisan Gelar) sebesar Rp. 13.000.000.000

e) Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 462.957.475.000 dengan output:

1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal sebesar Rp. 31.843.043.000
2. Layanan Sarana Internal sebesar Rp. 4.666.124.000
3. Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp. 423.744.708.000
4. Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 2.703.600.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Jangka Menengah

BPSDMI sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Perindustrian, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri (Pasal 218). Sejalan dengan pelaksanaan tersebut dan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian, maka disusunlah Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri 2020-2024 yang pada intinya mengimplementasikan Kebijakan Industri Nasional serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kementerian khususnva dalam peningkatan kualitas SDM industri dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi industri. Rencana strategis (renstra) memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta anggaran indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPSDMI.

Tabel Target Kinerja Renstra BPSDMI 2020-2022

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK	Satuan	Target Baru				
			2020	2022	2022	2023	2024
Tj	Meningkatnya peran SDM industri dalam perekonomian nasional						
	Tersedia SDM industri yang kompeten	orang	29000	54000	36000	123000	128000
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas						
	1 Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94
	2 Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Persen	13,58	13,96	14,96	15,26	15,65
	3 Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	Rp Juta /orang/ tahun	111,66	115,46	115,77	120,38	124,73
	4 Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	17000	43000	27600	95000	100000

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru				
				2020	2022	2022	2023	2024
	5	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan	Persen	50	77	79	81	83
SP2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>							
	1	SDM industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Orang	400	400	400	400	400
	2	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Implementasi	1	3	5	7	9
	3	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	Persen	30	50	70	90	95
SP3	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian							
	1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Persen	80	82	85	87	90
	2	Efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional	Persen	0	70	75	80	85
SP4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan							
	1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	SKKNI	8	8	10	10	10
	2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri	LSP dan TUK	5	6	20	20	20
	3	Asesor kompetensi dan lisensi	Asesor	144	154	300	310	320
	4	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Perusahaan	4	6	8	10	12
	5	Nilai minimum akreditasi program studi di politeknik	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)
	6	Penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Penelitian	100	120	150	170	200
	7	Inkubator bisnis industri yang tumbuh	Tenant	41	34	50	60	70
SP5	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri							
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	Persen	-	50	60	70	80
SP6	Terwujudnya Birokrasi BPSDMI yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima							
	1	Nilai laporan keuangan BPSDMI	Nilai	70	72	74	76	78
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) BPSDMI	Persen	70	72	74	76	78
	3	Nilai kearsipan BPSDMI	Nilai	0	75	77	79	80
SP7	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian							
	1	Rata-rata Indeks Kompetensi, profesional ASN BPSDMI	Indeks	70	71	73	76	80
SP8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Persen	91	91,5	92	92,5	93
SP9	Tersedianya Regulasi terkait SDM Industri yang Efektif							
	1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	Persen	-	72	74	78	78

Rencana anggaran BPSDMI 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis /	Satuan	Alokasi (dalam milyar rupiah)						Unit Terkait	
	Sasaran Program /		2019	2020	2022	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan / IKU / IK									
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri										
SP1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas									
	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Juta Orang	0	0	0	0	0	0	Set. BPSDMI
	2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Persen	0	0	0	0	0	0	Set. BPSDMI
	3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	Rp Juta /orang/ tahun	0	0	0	0	0	0	Set. BPSDMI
	4	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	139.021403	13.741571	8.351605	27	35	35	Pusdiklat SDM Industri dan BDI
	5	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan	Persen	5	3.728	4.6699	9.25622	10	12	PPPVI, SMK, dan Politeknik
SP2	Penguatan implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>									
	1	SDM industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Orang			0.487395	4.2	10	10	Pusdiklat SDM Industri
	2	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Implementasi	1.7	0	0	0	0	0	PPPVI, SMK, dan Politeknik
	3	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	Persen	211.5558	47.154287	167.193984	52.408889	160	80	Pusdiklat industri dan PPPVI
SP3	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian									
	1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Persen	17.406716	13.488987	7.584581	11.28339	44.334366	50	Pusbindiklat SDM Aparatur
	2	Efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional	Persen	0	0.282655	2.388029	1.71661	10	10	Pusbindiklat SDM Aparatur
SP4	Terseleenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan									
	1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	SKKNI	8.82845	2.685414	2.711667	3	8	8	Pusdiklat SDM Industri
	2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri	LSP dan TUK	0.4619	0.5	0.532116	2	3	3	Pusdiklat SDM Industri
	3	Asesor kompetensi dan lisensi	Asesor	3.36675	1.88295	2	2	9.5	9.5	Pusdiklat SDM Industri
	4	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Perusahaan	26.087333	6.338215	2.874704	4.354584	5	5	PPPVI

5	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Nilai	2.759595	3.85636	3.165052	4.010146	5	5	PPPVI
6	Penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Penelitian	2.430973	2.077421	0.955018	2.4	3	3	PPPVI dan Politeknik/
									Akom
7	Inkubator bisnis industri yang tumbuh	Tenant	0	0	0	0	0	0	Pusdiklat SDM Industri dan Politeknik/
									Akom
SP5	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri								
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	Persen	217.38549	35.965637	97.868034	81.6096	96.806909	51.903456	Semua Unit Eselon II dan satker daerah di BPSDMI
SP6	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima								
1	Nilai laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	0.936334	1.442173	1.100342	3.3615	4	4	Set. BPSDMI
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	4.013321	2.545148	3.834002	5.887707	5.25	5.25	Set. BPSDMI
3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	Nilai	0.15838	0.13385	0.602531	0.806035	1	1	Set. BPSDMI
SP7	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian								
1	Rata-rata Indeks Kompetensi, profesional ASN BPSDMI	Indeks	2.109735	1.17487	1.054132	2.343612	2.5	2.5	Set. BPSDMI
SP8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien								
1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Persen	0.429971	0.335406	0.372643	0.367578	0.5	0.5	Set. BPSDMI
2	Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Level	0	0.08216	0.173149	0.12638	0.25	0.25	Set. BPSDMI
SP9	Tersedianya regulasi terkait SDM industri yang efektif								
1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	Persen	0	0.480327	0.581068	1.386388	1.5	1.5	Set. BPSDMI
1	Tenaga kerja industri yang mendapatkan fasilitas Sertifikasi Kompetensi	Orang	8.9462	2	2.599852	3	15	15	Pusdiklat Industri
1	Gaji, Tunjangan, dan Operasional		31.124763	30.695201	32.371346	42.573278	47	69.8	Set. BPSDMI

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran kinerja dilakukan dengan sistematis dan berkesinambungan yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggung jawab. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi BPSDMI yaitu **"Menjadi vokasi industri bertaraf global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh"**.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri tahun 2022 dengan realisasinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2022 sudah dapat dicapai oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Hal tersebut nampak pada tingkat persentase dari pencapaian target sasaran baik fisik maupun anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini sebagaimana pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang harus dilakukan oleh pimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan merupakan tolok ukur akuntabilitas kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri pada akhir tahun 2022 yang disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan rincian tabel sebagai berikut:

Kode	Tujuan/Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan	Capaian 2022	%	
TJ	Tersedianya SDM Industri yang kompeten	Tersedianya SDM Industri yang kompeten	30.000	Orang	40.382	135%	
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	20,84	Juta Orang	19,11	92%
		2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	14,96	Persen	14,13	94%
		3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	115,77	Rp Juta /orang/ tahun	114.33	99%
		4	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	25.700	Orang	27.769	108%
		5	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	79%	Persen	100%	127%
SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	400	Orang	483	121%
		2	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	5	Implementasi	37	740%
		3	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	70	Persen	93,88	134%
SP3	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	85	Persen	96,91	114%
		2	Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional	75	Persen	93.15	124%
SP4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	1	Infrastruktur kompetensi industri	10	SKKNI	9	90%
		2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri	20	LSP dan TUK	26	130%

		3	Asesor kompetensi dan lisensi	300	Asesor	192	64%
		4	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	8	Perusahaan	200	2500%
		5	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	331	Nilai	332.29	104%
		6	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	150	Penelitian	222	148%
		7	Inkubator Bisnis industri yang tumbuh	50	Tenant	76	152%
SP5	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	60	Persen	70,33	117%
SP6	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	74	Nilai	79,15	107%
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	74	Nilai	76,21	103%
		3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	77	Nilai	69	90%
SP7	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI	73	Indeks	54.99	75%
SP8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	92	Persen	88.66	96%

		2	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	3	Level	2,85	95%
SP9	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	76	Persen	81	107%

3.1.3 Capaian Kinerja Tahun 2022

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri tahun 2020, terdapat 4 (empat) Prespektif, 9 (sembilan) Sasaran Progran, dan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja. Pada capaian kedua puluh lima indikator tersebut, terdapat beberapa indikator yang realisasi dibawah target dikarenakan keterbatasan anggaran yang diperoleh serta penarikan blokir automatic adjustment oleh kemenkeu di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang berakibat pada kurang maksimalnya output yang dihasilkan, detail capaian tersebut berikut:

- **Tujuan**

Sasaran Tujuan Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional, memiliki indikator tujuan:

1. Tersedianya SDM Industri yang kompeten

Indikator Tersedianya SDM Industri yang kompeten merupakan jumlah lulusan dari Persentase Lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan, jumlah orang SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya, jumlah orang yang mengikuti diklat Latihan dasar cpns, diklat teknis, diklat fungsional, rintisan gelar, dan diklat infrastruktur, jumlah orang dalam seluruh tenant inkubator bisnis, dan jumlah Tenaga kerja industri yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi Kompetensi.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Tersedianya SDM Industri yang kompeten pada 2022 sebesar 40.382 orang atau 135% dari target 30.000 orang. Indikator Kinerja Tersedianya SDM Industri yang kompeten telah memenuhi target yang ditetapkan. Dengan rincian sebagai berikut:

Indikator	Jumlah Orang
Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	27.769
Lulusan tahun 2022	6.274

SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	483
Latsar	810
Diklat Teknis	160
Rintisan gelar	87
Inkubator Bisnis industri yang tumbuh	409
Tenaga kerja industri yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	4.390
TOTAL INDIKATOR TUJUAN BPSDMI	40.382

Realisasi Indikator Tujuan

SP	IK	2019			2020			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional	Tersedianya SDM Industri yang kompeten	60300	29128	48.31	54000	59445	110.08	30000	40382	135	Orang

Capaian indikator tujuan Tersedianya SDM Industri yang kompeten pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 48.31% menjadi 135% pada tahun 2022.

Pencapaian ini dapat terwujud dikarenakan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BPSDMI maupun satuan kerja di lingkungan BPSDMI mampu berjalan dengan baik walaupun terdapat hambatan seperti pembatasan karena pandemi covid maupun adanya penarikan blokir automatic adjustment oleh kementerian keuangan yang dilaksanakan pada Kementerian Perindustrian.

- **Prespektif Stakeholder**

Sasaran Program 1 Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas memiliki 5 Indikator Kinerja yaitu:

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2020		2021		2022 TW IV			Keterangan	Satuan
			T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	1 Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Belum menjadi indikator kinerja		18,29	18,65	20,84	19,11	92	Data Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Sakernas Agustus 2022	Juta Orang

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2020		2021		2022 TW IV			Keterangan	Satuan
			T	R	T	R	T	R	C (%)		
		2 Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Belum menjadi indikator kinerja		13,96	14,23	14,96	14,13	94	Data Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Sakernas Agustus 2022	Persen
		3 Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	Belum menjadi indikator kinerja		115,46	111,6	115,77	114,33	99	PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas harga konstan Januari - Desember 2022 & Data Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Sakernas Agustus 2022	Rp Juta /orang/ tahun
		4 Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	35.000	18.919	43.000	47.752	25.700	27.769	108		Orang
		5 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Belum menjadi indikator kinerja		77	91	79	100	127		Persen

1. Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

Sektor industri merupakan kontributor terbesar dalam PDB, sektor industri pengolahan nonmigas diharapkan menjadi leading sector yang mampu mengungkit sektor lainnya serta membuka lapangan pekerjaan. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industry pengolahan nonmigas dihitung menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dipublikasikan oleh BPS berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan non migas dari Sakernas yaitu KBLI 10-18 dan 20-33. Data tersebut kemudian diolah oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian. Data pada indikator ini dihitung oleh Bappenas setiap bulan Februari dan Agustus dengan estimasi perilisan data 1-2 bulan setelah dihitung, sehingga data yang dilaporkan pada laporan ini merupakan data yang dihitung pada Agustus 2022.

Capaian atau realisasi pada Indikator Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas pada 2022 sebesar 19,11 juta orang atau 92% dari target 20.64 juta orang. Indikator Kinerja Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas belum memenuhi perjanjian kinerja yang ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Belum menjadi Indikator Kinerja			18,29	18,65	102	20.84	19.11	92	Juta Orang

Berdasarkan data yang dirilis oleh Sakernas Agustus 2022 jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas sebanyak 19,11 juta orang atau mencapai 92% dari target pada Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 20,84 juta orang. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 18,65 juta orang. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas sebanyak 21,94 juta orang. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 92% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 21,94 juta orang. Rincian Indikator Kinerja Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas sebagai berikut:

KBLI	Feb-20	Aug-20	Feb-21	Aug-21	Feb-22	Aug-22
10	4,780,725	4,817,440	4,806,673	5,016,316	5,211,127	5.218.967
11	361,188	392,936	402,663	425,037	370,373	506.398
12	338,164	405,178	327,766	514,019	352,138	439.730
13	1,260,753	1,101,206	1,034,251	1,129,954	1,056,405	1.107.639
14	2,713,868	2,329,274	2,316,969	2,522,691	2,577,137	2.705.414
15	872,586	669,185	726,967	759,471	1,065,283	962.760
16	1,872,891	1,616,546	1,512,928	1,689,993	1,895,932	1.696.590
17	261,268	241,651	267,387	286,758	206,017	261.578
18	398,793	286,392	306,526	282,050	200,007	347.392
20	401,946	333,023	453,483	401,583	361,470	381.164
21	136,449	134,651	178,301	152,411	122,081	157.872
22	468,151	567,748	589,262	569,787	546,765	611.730
23	1,201,016	1,106,089	1,069,858	1,151,438	1,021,226	924.880
24	290,121	239,398	219,084	259,290	210,305	235.566
25	638,052	601,535	709,999	667,333	535,336	615.650
26	137,150	151,687	157,154	160,632	125,722	154.997
27	136,725	179,934	192,008	230,936	166,411	190.408
28	161,934	178,219	195,336	201,808	128,830	212.284
29	208,773	200,386	266,902	190,454	193,991	210.479
30	289,462	208,106	242,275	196,748	257,302	253.311
31	885,307	740,480	844,722	843,940	1,053,028	878.487
32	655,122	718,236	721,201	771,423	762,512	843.132
33	205,795	220,289	194,123	224,012	213,975	197.585
Industri Pengolahan	18,709,441	17,482,849	17,823,568	18,694,463	18,671,926	19.172.397
Industri Pengolahan Non Migas	18,676,239	17,439,589	17,735,838	18,648,084	18,633,373	19.114.013
Total TK	133,292,866	128,454,184	131,064,305	131,050,523	135,611,895	135.296.713

*Data dihitung per Februari dan Agustus, rilis ± 2 bulan

Sumber: BPS, diolah pusdatin

Belum tercapainya target tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas diantaranya dipengaruhi oleh kinerja sektor manufaktur, PDB, realisasi investasi, capaian ekspor, serapan tenaga kerja, dan Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur. Selain itu sepanjang tahun 2022 terjadi banyak PHK yang dipicu imbas kondisi pandemi covid-19 yang masih berlangsung serta menurunnya kinerja ekspor. PHK yang terjadi secara tidak

langsung juga dipengaruhi oleh kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang mengakibatkan banyak perusahaan terpaksa melakukan efisiensi dan berakibat pada turunnya jumlah tenaga kerja.

BPSDMI selalu berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyediakan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja industri yang kompeten. Di antara upaya yang dilakukan adalah dengan perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menjembatani kebutuhan SDM industri, salah satunya dengan peluncuran Industrial Vocational Year 2023 di Jakarta pada November 2022 yang melibatkan 144 perusahaan industri, 127 peserta dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Kadin Daerah, para mitra lainnya, serta 947 dari SMK dan politeknik secara offline, online, dan hybrid dengan total sebanyak 1.730 peserta. Kegiatan tersebut berjalan selama empat hari dari tanggal 21-24 November 2022. Penganjangan Industrial Vocational Year 2023 merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Joko Widodo untuk melakukan perubahan mendasar pada Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, melalui orkestrasi penyelenggaraan yang harus mengacu pada kebutuhan penggunaannya atau demand driven.

BPSDMI juga berupaya untuk menjembatani para stake holder melalui pendidikan vokasi melalui Pendidikan SMK (SMAK-SMTI), Politeknik, Akademi Komunitas (Program S2/D4/D3/D2/Setara D1), pelatihan vokasi melalui penyelenggaraan Diklat 3 in 1, serta Penguatan Revitalisasi Link and Match SMK dan Industri guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Selain itu, BPSDMI sebagai unit eselon I Kementerian Perindustrian telah melaksanakan program untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja diantaranya berupa pelaksanaan diklat dengan skema 3 in 1 (pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja di industry) dengan total diklat 3 in 1 pada tahun sebanyak 27.769 orang yang berupa 25.401 diklat skilling, 2.199 diklat up-skilling, dan 80 diklat re-skilling di 19 sektor industri pengolahan non-migas. Diklat dengan skema 3 in 1 telah memiliki perjanjian kerjasama antara Balai Diklat Industri dengan industri

perihal penempatan kerja bagi peserta diklat, sehingga peserta diklat yang lulus dapat terserap atau mendapatkan pekerjaan.

- **Kendala:**

1. Data tidak keluar secara real time serta waktu rilis data tidak pasti \pm 1-2 bulan

- **Tindak Lanjut:**

1. Berkoordinasi dengan pusdatin terkait data capaian

2. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap Total Pekerja

Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan kemandirian dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri nasional. Semakin tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor industri nonmigas merupakan salah satu indikasi bahwa industri nasional semakin mandiri, maju, dan berdaya saing.

Indikator ini merupakan turunan dari renstra kementerian perindustrian yang sumber datanya berasal dari Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja dihitung menggunakan data Sakernas yaitu Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri pengolahan nonmigas dari Sakernas (yaitu KBLI 10-18 dan 20-33) dibagi Total Tenaga Kerja dikali 100%. Data tersebut kemudian diolah oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian. Data pada indikator ini dihitung oleh Bappenas setiap bulan Februari dan Agustus dengan estimasi perilis data 1-2 bulan setelah dihitung, sehingga data yang dilaporkan pada laporan ini merupakan data yang dihitung pada Agustus 2022.

Capaian atau realisasi pada Indikator Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap Total Pekerja pada 2022 sebesar 14.13% atau 94% dari target 14.9%. Indikator Kinerja Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap Total Pekerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Belum menjadi Indikator Kinerja			13.96	14.23	101.93	14.9	14.13	94	Persen

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2022, persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja adalah sebesar 14,13% atau telah mencapai 94% dari target pada Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 14,96%. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang 14,23%. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja sebanyak 15,65%. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 94% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 15,65%. Rincian

Indikator Kinerja Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap Total Pekerjasebagai berikut:

	Feb-20	Aug-20	Feb-21	Aug-21	Feb-22	Aug-22
Industri Pengolahan	18,709,441	17,482,849	17,823,568	18,694,463	18,671,926	19.172.397
Industri Pengolahan Non Migas	18,676,239	17,439,589	17,735,838	18,648,084	18,633,373	19.114.013
Total TK	133,292,866	128,454,184	131,064,305	131,050,523	135,611,895	135.296.713
Persentase TK IP Non Migas (%)	14.01	13.58	13.53	14.23	13.74	14.13

*Data dihitung per Februari dan Agustus, rilis \pm 1 bulan

*Perhitungan produktivitas tenaga kerja pada umumnya dilakukan setelah angka full year terpenuhi

Sumber: Pusdatin (diolah)

Di tahun 2020 indikator ini belum menjadi indikator kinerja BPSDMI namun telah memiliki capaian pada level kementerian. Secara keseluruhan, ketenagakerjaan sector industry pengolahan nonmigas semakin membaik seiring dengan menguatnya perekonomian Indonesia jika dibandingkan dengan masa awal pandemi Covid-19 yang juga ditunjukkan oleh peningkatan pekerja sector industry pengolahan nonmigas dibanding Februari 2020 sebesar 0,12 persen poin. Namun peningkatan ini belum mampu untuk mencapai target yang telah ditetapkan mengingat penyusunan target dilakukan sebelum masa pandemic covid.

Belum tercapainya target tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas diantaranya dipengaruhi oleh kinerja sektor manufaktur, PDB, realisasi investasi, capaian ekspor, serapan tenaga kerja, dan Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur. Selain itu sepanjang tahun 2022 terjadi banyak PHK yang dipicu imbas kondisi pandemi covid-19 yang masih berlangsung serta menurunnya kinerja ekspor. PHK yang terjadi secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang mengakibatkan banyak perusahaan terpaksa melakukan efisiensi dan berakibat pada turunnya jumlah tenaga kerja.

- **Kendala:**

1. Data tidak keluar secara real time serta waktu rilis data tidak pasti \pm 1-2 bulan

- **Tindak Lanjut:**

1. Berkoordinasi dengan pusdatin terkait data capaian

3. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja sektor industri, maka semakin tinggi efisiensi perusahaan dalam memproduksi barang/jasa. Untuk itu, maka penyediaan SDM industri yang terampil menjadi salah satu yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional. Nilai produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas merupakan pembagian antara nilai tambah sektor industri nonmigas dan jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas.

Indikator ini merupakan turunan dari renstra kementerian perindustrian yang sumber datanya berasal dari Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja dihitung menggunakan data Sakernas yaitu Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri pengolahan nonmigas dari Sakernas (yaitu KBLI 10-18 dan 20-33) dibagi Total Tenaga Kerja dikali 100%. Data tersebut kemudian diolah oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian. Data pada indikator ini dihitung oleh Bappenas setiap bulan Februari dan Agustus dengan estimasi perilsan data 1-2 bulan setelah dihitung, sehingga data yang dilaporkan pada laporan ini merupakan data yang dihitung pada Agustus 2022.

Capaian atau realisasi pada Indikator Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas pada 2022 sebesar 114.33 juta/orang/tahun atau 99% dari target 115.77 juta/orang/tahun. Indikator Kinerja Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	Belum menjadi Indikator Kinerja			115.5	111.6	96.62	115.7	114.33	99	Rp Juta /orang/ tahun

Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas pada tahun 2022 adalah sebesar Rp114,33 juta/orang/tahun atau mencapai 99% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022 sebesar Rp115,77 juta/orang/tahun. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang 111,6 juta/orang/tahun. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas sebesar Rp124,73 juta/orang/tahun. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 99% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 124,73 juta/orang/tahun. Rincian Indikator Kinerja Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas sebagai berikut:

Data	2020	2021	2022
PDB ADHK IP Non Migas (Rp Juta)	2.007.316.600	2.081.054.800	2.185.263.200
Tenaga Kerja (Orang)	17.439.589	18.648.084	19.114.013
Produktivitas TK (Rp Juta/Orang/Tahun)	115,1	111,6	114,33

*Perhitungan produktivitas tenaga kerja pada umumnya dilakukan setelah angka full year terpenuhi

Sumber: Pusdatin (diolah)

Realisasi yang belum tercapai namun telah mendekati target ini disebabkan karena tingkat kenaikan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan tingkat kenaikan PDB 2022, selain itu perhitungan tenaga kerja menggunakan perhitungan bulan agustus 2022 sehingga data yang dihasilkan belum real time realtime.

Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja nonmigas BPSDMI telah melakukan pelatihan tenaga kerja pada sector-sektor industri pengolahan non-migas (Alas Kaki, Animasi, Digital Marketing, Elektronika, Furnitur, Industri 4.0, Jaringan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kimia Analisis, Logam, Makanan dan Minuman, Mekanik Otomotif, Pengelasan, Pengolahan Agro, Plastik, Telematika, TPT) berupa diklat 3 in 1 yang memiliki jenis diklat berupa skilling, up-skilling, dan re-skilling.

Pelatihan skilling bertujuan untuk memberikan kompetensi kepada calon tenaga kerja industri. Sasaran peserta pada pelatihan skilling adalah para calon tenaga kerja yang sedang tidak bekerja dan pada umumnya adalah mereka yang baru lulus dari Pendidikan di SMK/SMA. Ruang lingkup jenis pelatihan skilling ini diutamakan pada peningkatan keahlian calon tenaga kerja di level pemula atau untuk jabatan operator di perusahaan industri.

Pelatihan up-skilling ditujukan bagi para tenaga kerja industri untuk meningkatkan keahlian teknis mereka ke level yang lebih tinggi dari keahlian yang sudah dimiliki. Pelatihan jenis ini diharapkan dapat membekali tenaga kerja untuk memperoleh kompetensi pada jenjang karier yang lebih tinggi dari posisi mereka saat ini di industri.

Pelatihan re-skilling bertujuan untuk menambah keahlian baru bagi para angkatan kerja ke bidang keahlian lain sesuai kebutuhan industri. Baik pelatihan up-skilling maupun re-skilling lebih fokus pada tenaga kerja yang sudah sudah bekerja pada perusahaan industri dan memiliki keahlian sebelumnya ataupun terdampak adanya pergeseran pekerjaan (job shifting).

- **Kendala:**

1. Data tidak keluar secara real time serta waktu rilis data tidak pasti \pm 1-2 bulan
2. Data PDB umumnya dihitung pada akhir tahun dan dirilis setelah tahun berjalan

- **Tindak Lanjut:**

1. Berkoordinasi dengan pusdatin terkait data capaian

4. Lulusan Pelatihan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi

Program pelatihan yang meliputi skilling, upskilling, dan reskilling dengan skema 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri, merupakan program penyiapan tenaga kerja industry melalui pelatihan berbasis kompetensi dan mengikuti sertifikasi kompetensi mengacu pada standard kompetensi serta lulusannya langsung ditempatkan bekerja pada perusahaan industri. Penyediaan SDM yang kompeten dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan pada 7 Balai Diklat Industri dan Pusdiklat SDM industri di lingkungan Kementerian Perindustrian. Capaian target ini merupakan jumlah peserta program pelatihan 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) yang terserap di dunia industri.

Target lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi pada perjanjian kinerja BPSDMI memiliki perbedaan dengan perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian, yaitu pada BPSDMI sebanyak 25.700 namun pada perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian sebanyak 27.600 orang. Perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh indeks pelatihan tahun 2022 yang mengalami peningkatan dari indeks pelatihan tahun 2021 sehingga target output tahun 2022 disesuaikan pada hasil trilateral meeting antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Bappenas.

Pada tahun 2021 pelaksanaan diklat 3 in 1 didominasi oleh diklat sektor TPT dan alas kaki yang memiliki harga bahan praktek dan peralatan penunjang yang tergolong murah (70% dari total diklat yang dilaksanakan

pada tahun 2021 adalah diklat sektor TPT dan alas kaki). Namun di tahun 2022 terdapat permintaan dari industri atas tenaga kerja lulusan diklat 3 in 1 dari sektor-sektor yang memiliki biaya praktek dan peralatan penunjang yang lebih mahal seperti digital marketing, elektronika, kimia analisis, logam, otomotif, pengolahan agro, telematika, dan furniture. Hal ini mendasari terjadinya peningkatan indeks biaya pelatihan 3 in 1 tahun 2022 dibandingkan dengan indeks biaya pelatihan 3 in 1 tahun 2021

Capaian atau realisasi pada Indikator Lulusan Pelatihan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi pada 2022 sebesar 27.769 orang atau 108% dari target 25.700 orang. Indikator Kinerja Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi telah memenuhi target yang ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	35.000	18.919	54,05	43.000	47.752	111,05	25.700	27.769	108	Orang

Pada tahun 2022, lulusan pelatihan vokasi berbasis kompetensi sebanyak 27.769 orang atau mencapai 108% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022 yaitu 27.600 orang. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 47.752 orang yang disebabkan adanya penurunan anggaran dari tahun 2021 sebesar Rp. 223.703.564.000 menjadi Rp. 165.269.499.000 di tahun 2022. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai lulusan pelatihan vokasi berbasis kompetensi sebanyak 100.000 orang. Target tersebut diharapkan dapat tercapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 108%

diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan diklat dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 100.000 orang.

Apabila dibandingkan dengan target RPJM 202-2024 maka capaian ini belum dapat memenuhi target RPJMN tahun 2022 yaitu sebanyak 42.000 orang (target RPJMN hingga 2022 sebanyak 113.000 orang sedangkan realisasi hingga 2022 sebanyak 94.440 orang), ketidaktercapaian tersebut disebabkan karena adanya ketidaksesuaian alokasi anggaran, total indikasi pendanaan indikator ini pada RPJM 2020-2024 sebesar 840,9 Miliar rupiah, namun hingga akhir tahun 2022, BPSDMI selaku pengampu hanya mendapatkan alokasi anggaran sebanyak 473.052.063.000 atau 56% dari indikasi pendanaan RPJMN. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, BPSDMI mengharapkan adanya penyesuaian anggaran yang akan dialokasikan khususnya pada tahun 2024 sehingga BPSDMI dapat melakukan lebih banyak diklat agar target RPJMN tahun 2022-2024 dapat tercapai.

Perlu kami sampaikan pula, di tahun 2022 pada indikator ini terdapat blokir *automatic adjustment* sebesar Rp. 1.889.434.000 di BDI Makassar, namun BPSDMI secara keseluruhan telah mencapai realisasi output sebesar 27.769 orang hingga akhir tahun 2022. Pada indikator ini juga terdapat diklat 4.0 yang menggunakan skema pelatihan 3 in 1 namun anggaran pelaksanaan diklatnya menggunakan anggaran diklat 4.0 sebanyak 863 orang yang dilaksanakan pada PIDI 4.0 Pusdiklat BPSDMI. Rincian capaian Lulusan Pelatihan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut

- **Berdasarkan penyelenggara diklat:**

Satuan Kerja	Jumlah
BDI Denpasar	2.150
BDI Jakarta	4.820

BDI Makassar	4.210
BDI Medan	2.140
BDI Padang	2.202
BDI Surabaya	3.529
BDI Yogyakarta	5.500
PIDI 4.0	863
Pusdiklat	2.355
TOTAL	27.769

- **Berdasarkan Sektor diklat:**

SEKTOR	Total
Alas Kaki	4.600
Animasi	1.402
Digital Marketing	742
Elektronika	25
Furnitur	257
Industri 4.0	863
Jaringan	24
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	40
Kimia Analisis	465
Logam	400
Makanan Dan Minuman	5.025
Mekanik	650
Otomotif	450
Pengelasan	1.015
Pengolahan Agro	1.555
Plastik	315
Telematika	1.222
TPT	8.719
Total	27.769

Tercapainya indikator Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi ini didukung dengan penyelenggaraan diklat baik secara onsite maupun offside sesuai dengan kondisi daerah dan sektor pelatihan yang ada.

- **Kendala:**

1. Terdapat satuan kerja yang terhambat Automatic Adjustment pada belanja

modalnya sehingga belum dapat melakukan diklat dengan maksimal

- **Tindak Lanjut:**

1. Melakukan diklat on-site/ di perusahaan terkait
2. Melakukan Kerjasama dengan LSP yang memiliki kompetensi dan peralatan yang dibutuhkan

5. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan

Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan prasyarat terwujudnya industri nasional yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Tantangan perkembangan ekonomi internasional tidak lagi terbatas pada perdagangan komoditi tetapi juga pasar bebas tenaga kerja. Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi serta pemagangan.

Pendidikan vokasi yang diadakan oleh BPSDMI meliputi Pendidikan tinggi (Politeknik dan Akademi Komunitas), program pendidikan setara D1, dan Pendidikan Menengah (SMK). Outputnya berupa jumlah lulusan. Lulusan yang terserap meliputi yang bekerja di industri, berwirausaha, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Persentase lulusan yang terserap ditargetkan untuk meningkat setiap tahunnya dengan strategi meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. Persentase lulusan yang terserap dihitung paling lama satu tahun setelah dinyatakan lulus pada tahun sebelumnya (tahun-1).

Indikator ini merupakan persentase hasil tracing lulusan tahun 2020 yang dilaksanakan pada akhir triwulan III tahun 2022 pada 9 SMK, 10 Politek dan 2 Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian. Indikator ini merupakan jumlah lulusan yang terserap (bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan studi).

Capaian Indikator Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan sebesar 100%

atau 127% dari target 79%. Indikator Kinerja Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Sebanyak 2.115 lulusan SMK Kementerian Perindustrian tahun 2021 telah terserap dari total 2.115 siswa SMK yang lulus tahun 2021 dan 3.534 lulusan politeknik dan akedemi komunitas jenjang D1/D2/D3/S2 telah terserap dari total 3.435 mahasiswa yang lulus tahun 2021.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Belum menjadi Indikator Kinerja			77	91	118,7	79	100	127	Orang

Pada tahun 2022, persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan adalah sebesar 100% atau telah mencapai 127% dari target 79%. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang 91,41%. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan sebesar 83%. Target tersebut diharapkan dapat tercapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 127% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai

target sebesar 83%. Rincian Indikator Kinerja Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan sebagai berikut:

- **Lulusan SMK Kementerian Perindustrian**

No	Unit Kerja	Jumlah Lulusan	Serapan keseluruhan				Persentase Terserap
			Kerja	Melanjutkan studi	Wirausaha	Dalam proses	
1	SMTI Makassar	232	140	74	18	0	100,00
2	SMTI Bandar Lampung	285	120	144	21	0	100,00
3	SMTI Padang	178	121	56	1	0	100,00
4	SMTI Yogyakarta	275	180	76	19	0	100,00
5	SMTI Pontianak	236	120	68	48	0	100,00
6	SMTI Banda Aceh	190	75	78	37	0	100,00
7	SMAK Makassar	193	114	75	4	0	100,00
8	SMAK Bogor	286	168	104	14	0	100,00
9	SMAK Padang	240	136	93	11	0	100,00
TOTAL LULUSAN		2115	1174	768	173	0	100,00

- **Lulusan Politeknik dan Akademi Komunitas Kementerian Perindustrian**

No	Perguruan Tinggi	Jumlah total lulusan	Jumlah Lulusan Per Program		Serapan Lulusan Keseluruhan				Persentase terserap
					Kerja	Melanjutkan studi	Wirausaha	Dalam proses	
1	PTKI Medan	333	D3	333	227	7	99		100,00
2	ATI Padang	495	D3	495	411	2	82		100,00
3	Politeknik STTT Bandung	394	D4	292	222	10	60		100,00
			Magister	15	12		3		100,00
			Setara D1	87	87				100,00
4	AKA Bogor	467	D3	398	347	13	38		100,00
			Setara D1	69	69				100,00
5	APP Jakarta	510	D3	378	359	2	17		100,00
			Setara D1	132	132				100,00
6	STMI Jakarta	257	D4	257	240	0	17		100,00
7	ATK Yogyakarta	237	D3	208	136	9	63		100,00
			Setara D1	29	29				100,00
8	ATI Makassar	325	D3	281	208	3	70	0	100,00
			Setara D1	44	44				100,00
9	PIL Morowali	84	D3	84	84	0	0	0	100,00
10	Akom Tekstil Surakarta	225	D2	225	225	0	0	0	100,00
11	Akom	98	D2	98	98	0	0	0	100,00

	Manufaktur Bantaeng								
12	PIFPK Kendal	109	D3	87	81	0	6	0	100,00
			Setara D1	22	22				100,00
	TOTAL LULUSAN	3534		3534	3033	46	455	0	100,00

Tercapainya indikator presentase lulusan Pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan di dukung oleh pemantauan capaian serapan setiap unit pendidikan dengan update data setiap bulannya, serta pada setiap unit pendidikan di lingkungan BPSDMI terdapat unit yang bertanggung jawab pada hal ini seperti *unit Carrer Development Center* yang memiliki kegiatan antara lain *Job fair*, membuat informasi pengembangan karir, pelatihan *soft skills* persiapan kerja, dan pengelolaan *tracer study*.

- **Kendala:**

1. Terdapat Automatic Adjustment sehingga kegiatan yang direncanakan belum dapat dilaksanakan dengan maksimal

- **Tindak Lanjut:**

1. Melakukan optimalisasi dan efisiensi dengan anggaran yang ada
2. Melakukan tracing study dan menjalin kerjasama industri lebih luas
3. Melakukan tracing alumni dan meningkatkan kerjasama dengan industri terkait rekrutmen alumni
4. Meningkatkan koordinasi dengan dunia industri

• **Perspektif Customer**

Sasaran Program 2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 memiliki 3 Indikator Kinerja yaitu:

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2020		2021		2022 TW IV			Keterangan	Satuan
			T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	100	347	400	430	400	483	121	Orang
		2	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Belum menjadi indikator kinerja		3	46	5	37	740	Implementasi

		3	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	40	46,05	50	65,77	70	93,88	134		Persen
--	--	---	--	----	-------	----	-------	----	-------	-----	--	--------

1. SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya

Making Indonesia 4.0 merupakan strategi dalam memasuki Industry 4.0 yang bertujuan untuk merevitalisasi sektor manufaktur nasional melalui pemanfaatan teknologi industri 4.0. Era revolusi Industri 4.0 telah menghasilkan teknologi yang mutakhir dalam penanganan teknologi perkapalan dan pelayaran, serta cara pembelajaran yang tidak dibatasi waktu, tempat dan ruang. Untuk itu, dalam menghadapi revolusi industri 4.0 diperlukan Sumber Daya Manusia yang dinamis, terampil, kreatif dan inovasi, serta memiliki soft skill komunikasi yang baik sehingga mampu berkolaborasi serta memiliki kompetensi industry 4.0.

Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang kompeten merupakan Tenaga Kerja Industri maupun ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang industri 4.0. Indikator ini merupakan jumlah dari seluruh peserta yang mengikuti diklat 4.0 sepanjang tahun 2022.

Capaian atau realisasi pada Indikator SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya sebesar 483 orang atau 121% dari target 400 orang. Indikator Kinerja SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya telah memenuhi target yang ditetapkan.

Pada indikator ini terdapat 863 orang yang mengikuti diklat 4.0 namun pelaksanaan diklatnya menggunakan anggaran diklat 3 in 1 sehingga output yang ada dimasukkan pada capaian output indikator kinerja Lulusan Pelatihan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi atau diklat skema 3 in 1.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2019			2020			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	100	347	347	400	430	107,5	400	483	121	Orang

Realisasi indikator ini adalah sebanyak 483 orang atau mencapai 121% dari target 400 orang yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 430 orang. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada akhir tahun 2024 adalah sebanyak 400 orang diperkuat kemampuannya melalui penerapan Making Indonesia 4.0. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 121% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan diklat dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 400 orang. Rincian capaian diklat 4.0 dapat dilihat sebagai berikut:

No	Nama Pelatihan	Partner	Total	Tanggal Pelaksanaan
1	LeMMI 4.0 Batch 2	JICA	17	21 - 25 Februari 2022
2	LeMMI 4.0 Batch 3	JICA	20	7 - 11 Maret 2022
3	UI/UX Adobe Illustrator dan XD Batch 1	PT Teknologika Utama	19	14 - 17 Juni 2022
4	Rekayasa Transformasi Industri 4.0	PT FESTO	15	15 - 17 Juni 2022
5	UI/UX Adobe Illustrator dan XD Batch 2	PT Teknologika Utama	23	4 - 7 Juli 2022
6	Pembuatan Digital Brand dengan Adobe Photoshop & Adobe Illustrator Batch 3	PT Teknologika Utama	19	8 - 11 Agustus 2022
7	Pembuatan Digital Brand dengan Adobe Photoshop & Adobe Illustrator Batch 4	PT Teknologika Utama	19	12 - 15 September 2022
8	Pembuatan Digital Brand dengan Adobe Photoshop & Adobe Illustrator Batch 5	PT Teknologika Utama	28	10 - 13 Oktober 2022

9	Transformasi Industri 4.0 Level Manager for ASN	PIDI 4.0	29	28 - 30 November 2022
10	Microcontrollers Arduino Batch 1	PT Jamiko	16	17 - 21 Oktober 2022
11	Data Analytics for ASN	House of Analytics	31	5 - 8 Desember 2022
12	Data Analytics for ASN Batch 2	House of Analytics	32	12 - 15 Desember 2022
13	Transformasi Industri 4.0	PIDI 4.0	22	19 - 22 Desember
14	Mekatronika Batch 1	PT FESTO	23	10 - 14 Oktober 2022
15	Mekatronika Batch 2	PT FESTO	30	17 - 21 Oktober 2022
16	Journey to Industry 4.0	PT Schneider	32	18 - 19 Oktober 2022
17	Microcontrollers Arduino Batch 2	PT Jamiko	20	24 - 28 Oktober 2022
18	Transformasi Industri 4.0 Level Manager	PIDI 4.0	24	31 Oktober - 4 November 2022
19	Data Analytics Batch 1	House of Analytics	31	31 Oktober - 3 November 2022
20	Perekayasaan Perangkat IoT	Floatway Systems	33	31 Oktober - 4 November 2022
TOTAL				483

Rincian Diklat 4.0 yang menggunakan anggaran diklat skema 3 in 1 dapat dilihat pada table berikut:

No	Nama Pelatihan	Partner	Total	Tanggal Pelaksanaan
1	Junior Electrical Technician Batch 1	BDI Jakarta	30	10 Oktober - 2 November 2022
2	Pembuatan Digital Brand dengan Adobe Photoshop & Adobe Illustrator Batch 6	PT Teknologika Utama	20	31 Oktober - 3 November 2022
3	Mekatronika Batch 3	PT FESTO	27	7 - 11 November 2022
4	Pneumatic (Infineon Batch 1)	PT FESTO	15	7 - 10 November 2022
5	Total Preventive Maintenance (Infineon Batch 2)	PT FESTO	15	14 - 17 November 2022
6	Pembuatan Digital Brand dengan Adobe Photoshop & Adobe Illustrator Batch 7	PT Teknologika Utama	19	14 - 17 November 2022
7	Microcontrollers Arduino Batch 3	PT Jamiko	19	14 - 18 November 2022
8	Basic Pneumatic and Programmable Logic Controller	PT SMC Automation	26	14 - 18 November 2022
9	Perekayasaan Aplikasi IoT Batch 1	Floatway Systems	31	14 - 18 November 2022
10	Perekayasaan Aplikasi IoT Batch 2	Floatway Systems	33	14 - 18 November 2022
11	Maintenance 4.0 to Optimize Rotating Equipment Performance	PT SKF	36	16 - 18 November 2022
12	Total Preventive Maintenance (Infineon Batch 3)	PT FESTO	16	16 - 18 November 2022
13	Transformasi Industri 4.0 Level Maintainer	PIDI 4.0	32	21 - 25 November 2022

14	Data Analytics Batch 2	House of Analytics	29	23 - 26 November 2022
15	Predictive Maintenance	AWASIN	30	22 - 23 November 2022
16	Pelatihan 4.0 untuk Asosiasi Industri Tembakau Garut	PIDI 4.0	89	28 - 29 November 2022
17	Pelatihan Solusi Digital Teknologi Manufaktur	Fablab Jababeka, OPEX, EPICOR, SIEMENS	30	1-2, 5 Desember 2022
18	Pelatihan Welding Inspector	Kampuh Welding Cikarang	30	1 - 10 Desember 2022
19	Data Analytics Batch 3	House of Analytics	22	5 - 8 Desember 2022
20	Pelatihan UpSkilling SPC LVL2, TCM & FMEA	Perhimpunan Praktisi Industri Semikonduktor Indonesia	30	5 - 9 Desember 2022
21	Operator Connecting Akt 1	PT Media Hati	50	6 - 8 Desember 2022
22	Operator Fitting Akt 1	PT Media Hati	50	6 - 8 Desember 2022
23	Pelatihan UpSkilling QCC, TCM, SPC & Problem Solving Akt 1	Perhimpunan Praktisi Industri Semikonduktor Indonesia	30	8 - 12 Desember 2022
24	Pelatihan UpSkilling QCC, TCM, SPC & Problem Solving Akt 2	Perhimpunan Praktisi Industri Semikonduktor Indonesia	30	11 - 15 Desember 2022
25	Operator Connecting Akt 2	PT Media Hati	50	10 - 12 Desember 2022
26	Sertifikasi Adobe Illustrator	PT Teknologika Utama	24	13-14 Desember 2022
27	Operator Connecting Akt 3	PT Media Hati	50	22-24 Desember 2022
TOTAL				863

Tercapainya indikator SDM Industry 4.0 di dukung oleh beberapa kegiatan diantaranya Launching PIDI, Pelatihan offline di PIDI, Pelatihan online PIDI, Pengembangan website PIDI dan layanan capability center di website PIDI, serta peran social media dalam menyebarkan informasi mengenai diklat 4.0 yang dilaksanakan.

Manfaat yang diharapkan dari terlaksananya diklat 4.0 adalah agar peserta diklat 4.0 dapat mengembangkan atau menerapkan keahlian-keahlian 4.0 yang didapatkan selama pelatihan sehingga dapat turut mempercepat penggunaan industri 4.0 pada industrinya masing-masing. Hal ini diukur dengan jawaban kuisisioner “form impact peserta pelatihan diklat 4.0” dari 469 orang peserta pelatihan diklat 4.0 yang mengisi kuisisioner

tersebut, hasil respon menunjukkan bahwa sebanyak 21% sedang mengimplementasikan hasil diklatnya dan 67% sedang merencanakan untuk mengimpementasikan hasil diklatnya.

- **Kendala:**

1. Pendaftar peserta diklat 4.0 di saring dengan beberapa kriteria salah satunya tenaga kerja industri namun saat dilakukan pemanggilan ada yang tidak hadir padahal banyak pendaftar lain yang berminat namun berasal dari kalangan dosen/guru.

- **Tindak Lanjut:**

1. Peserta diklat 4.0 tidak lagi harus tenaga kerja industri, namun guru/dosen juga dapat mengikuti diklat 4.0, dengan tetap mengutamakan peserta dari kalangan Tenaga Kerja.

2. Implementasi Industri 4.0 pada Pendidikan Vokasi

Implementasi industri 4.0 memiliki peluang berupa 20 juta lapangan pekerjaan baru serta tantangan re-skilling dan upskilling tenaga kerja mencapai 6 hingga 29 juta pekerjaan pada tahun 2030. Mengantisipasi hal ini, pengembangan Pendidikan vokasi harus mampu mengadaptasi perubahan melalui pengembangan dan implementasi kurikulum industri 4.0 dalam penyelenggaraan Pendidikan. Jenis-jenis implementasi industry 4.0 Pada Pendidikan vokasi adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Satelit PIDI
2. Implementasi Kurikulum industri 4.0
3. Pengaplikasian teknologi industri 4.0 pada Pendidikan
4. Pelatihan Industri 4.0 pada SDM Industri.

Indikator ini merupakan jumlah dari seluruh implementasi Industri 4.0 pada pendidikan vokasi seluruh unit pendidikan di lingkungan BPSDMI Kementerian Perindustrian yaitu 9 SMK, 10 Politeknik, dan 2 Akademi Komunitas.

Capaian atau realisasi pada Indikator Implementasi Industri 4.0 pada

Pendidikan Vokasi sebesar 740% dari 37 implementasi dari target 5 implementasi. Indikator Kinerja Implementasi Industri 4.0 pada Pendidikan Vokasi telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Belum menjadi Indikator Kinerja			3	46	1553	5	37	740	Implementasi

Realisasi indikator ini adalah sebanyak 37 implementasi atau mencapai 740% dari target 5 implementasi yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 46 implementasi, namun perlu dilihat pula bahwa capaian ini telah jauh melampaui target yang ditetapkan. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada akhir tahun 2024 adalah sebanyak 9 implementasi industry 4.0 pada unit Pendidikan BPSDMI Kementerian Perindustrian. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 740% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 9 implementasi. Rincian capaian diklat 4.0 dapat dilihat sebagai berikut:

Satuan kerja	Jumlah	Penjelasan Implementasi
--------------	--------	-------------------------

AKA Bogor	1	Implementasi alat sterilisasi telur dengan sinar UV berbasis 4.0 pada kegiatan perkuliahan dan pengabdian kepada masyarakat
APP Jakarta	2	1. Pelaksanaan Pelatihan Sistem Freight Forwarding Menggunakan Aplikasi Based PIWAR Sistem (BPS) Pada Industri 4.0 2. Dashboard Pengembangan Kompetensi Dosen (implementasi project dari dosen dimanfaatkan institusi)
ATI Makassar	2	Pembentukan kelas IoT dan Mini Wokrshop Robotic Unit Transformasi Digital 4.0
ATI Padang	4	pelaksanaan praktek kerja industri bagi mahasiswa di industri 4.0, Penempatan kerja lulusan di industri 4.0, Pelatihan dosen terkait penerapan industri 4.0, FGD dengan industri dalam penerapan kurikulum 4.0 dan mengundang praktisi untuk kuliah kompetensi terkait industri 4.0
ATK Yogyakarta	1	Pelatihan Industri 4.0 untuk IKM Persepatuan di Satelit PIDI Politeknik ATK Yogyakarta
STMI Jakarta	1	Pelaksanaan Pelatihan <i>Lean Manufacturing for Making Industry 4.0</i> (LEMMI 4.0)
PTKI Medan	3	1. Kurikulum Industri 4.0 (kurikulum tahun 2022) Program Studi Teknik Kimia serta modul-modul praktek: PLC, Pengenalan Interlock, Timer IoT, 2. Pengabdian Masyarakat 4.0, 3. Pilot Plant Pengolahan Minyak Merah Kelapa Sawit berbasis IoT
STTT Bandung	1	- Pengelolaan satelit digital - Sosialisasi dan Pelatihan transformasi 4.0 bagi IKM
Akom Tekstil Solo	1	Sistem Otomasi Pencahayaan Workshop AK-Tekstil Solo Menggunakan Photocell
PIL Morowali	4	1) Implementasi Kurikulum dasar - dasar 4.0, 2)Monitoring status mesin CV.CSM 3)PKM pemanfaatan teknologi 4.0 di industri manufaktur 4)Smart SCW
Akom Bantaeng	4	1) Implementasi kurikulum 4.0, 2) Pelaksanaan PkM melalui transfer ilmu terkait Monitoring Sistem Biogas Berbasis IoT, 3) Penelitian Dosen yang mengimplementasikan IoT, 4) Pelatihan pengembangan Dosen melalui keterlibatan dalam pelatihan IoT. 5) Pelaksanaan webinar series bersama PT.Schneider Indonesia terkait Implementasi Industri 4.0 di Industri
PFIPK Kendal	1	Proses development aplikasi mobile scanning QR code di mesin mesin workshop
SMAK Bogor	1	Implementasi Kurikulum 4.0 (Pembelajaran IoT menggunakan Halocode di kelas Informatika/Simulasi Digital)
SMAK Makassar	2	1) Materi Uji kompetensi dan proses asesmen LSP P1 Analis Kimia SMK-SMAK Makassar berbasis digital. 2) Remote gateway komputasi alat-alat instrumen laboratorium, komputer kelas, dan cctv
SMAK Padang	1	Implementasi kurikulum industri 4.0
SMTI Banda Aceh	1	Implementasi kurikulum industri 4.0
SMTI Bandar Lampung	1	penyusunan modul arduino dasar sebagai dasar teknologi IoT.dilakukan FGD dengan industri gula rafinasi yg tih mengimplementasikan industri 4.0(PT. Sugar Labinta)

SMTI Makassar	1	Implementasi kurikulum industri 4.0 berupa Modul Praktik (Sistem Monitoring dan Kendali Alat Listrik Berbasis IoT)
SMTI Padang	3	1. Penerapan <i>Smart Laboratory Controlling and Monitoring System</i> 2. Pemanfaatan teknologi 4.0 berupa mesin 3D Printing dalam pembelajaran Proyek Otomasi Terpadu (POT) Siswa Kelas XIII Teknik Otomasi Industri dengan proyek berupa : <i>Smart Controlling and Monitoring Laboratory System, Bottle Filling System With Outsheel PLC, Smart Belt Conveyor, Liquid Level and Mixing Control, Material Handling (Pick and Place Machine) and 3 Axis CNC Machine.</i> 3. <i>Smart Kontrol</i> Kumbung Jamur untuk otomatisasi pengaturan temperatur, kelembaban kumbung dan pertukaran Udara seta sosialisasi duplikasinay ke Petani Jamur
SMTI Pontianak	1	Penerapan smart workshop di jurusan teknik pemesinan
SMTI Yogyakarta	1	Pembelajaran eleftrifikasi dengan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia
TOTAL		37

Pada awal penyusunan target renstra BPSDMI masih melakukan pemetaan pada targetnya sehingga belum memiliki ekspektasi lebih untuk target yang ditetapkan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, realisasi yang dilakukan oleh satuan kerja telah jauh melebihi ekspektasi awal BPSDMI.

- **Kendala:**

1. Terdapat Automatic Adjustment pada belanja modal sehingga kegiatan yang direncanakan belum dapat dilaksanakan dengan maksimal

- **Tindak Lanjut:**

1. Melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang ada

- **Faktor pendukung:**

1. Target indikator ini pada awalnya meruapakan satelit dari PIDI 4.0, namun setelah dilakukan penyusunan pedoman kinerja pada rencana strategis BPSDMI, telah ditetapkan beberapa kriteria implementasi 4.0 sehingga satuan kerja dapat memasukkan beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai output sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan pada rencana strategis BPSDMI.

3. Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0

Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) memiliki visi menjadi one stop solution implementasi industri 4.0 dan jendela Indonesia 4.0 untuk dunia. Untuk mencapai visi tersebut PIDI 4.0 memiliki 5 layanan utama diantaranya :

1. Showcase Center, sebagai tempat untuk menyaksikan secara langsung implementasi Industri 4.0 melalui model factory & miniplant guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang industri 4.0
2. Capability Center, sebagai pusat peningkatan kompetensi SDM Industri 4.0 dari CxO, Manajer, Engineer, Frontliner bahkan ASN Pembina Industri
3. Ecosystem for Industry 4.0, sebagai wadah bagi stakeholder untuk saling berbagi dan bekerjasama dalam proses transformasi ke industri 4.0
4. Delivery Center, sebagai pusat pendampingan dan konsultasi bagi industri dalam bertransformasi ke industri 4.0
5. Engineering & AI Center, sebagai pusat riset dan testbed untuk mencari solusi dari pain point industri 4.0.

Indikator ini merupakan persentase Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 yang pengerjaannya dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang terdiri atas realisasi gedung, realisasi alat, dan realisasi kegiatan yang terencana.

Capaian atau realisasi pada Indikator Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 sebesar 93.88% atau 134% dari target 70%. Perhitungan pelatihan industry 4.0 yang digunakan merupakan seluruh pelatihan yang difasilitasi oleh PIDI 4.0 baik yang menggunakan anggaran diklat 4.0 maupun anggaran diklat 3 in 1. Indikator Kinerja Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	

Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	40	46,05	115	50	65,77	131,54	70	93.88	134	Persen
---	--	----	-------	-----	----	-------	--------	----	-------	-----	--------

Realisasi indikator ini adalah sebanyak 93,88% atau mencapai 134% dari target 70% yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 65,77. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada akhir tahun 2024 adalah sebanyak 95%. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 134% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 95%. Rincian perhitungan utilitas Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 dapat dilihat sebagai berikut:

	Nama Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase	Persentase Rata-Rata	Utilisasi PIDI 4.0
Realisasi Gedung	Fisik Bangunan dan Eksterior	1 Gedung	1 Gedung	100,00%	100,00%	
	Fisik Interior	Interior Lantai 1	Selesai	100,00%		
		Interior Lantai 2	Selesai	100,00%		
		Interior Lantai 3	Selesai	100,00%		
		Interior Lantai 4	Selesai	100,00%		
		Interior Lantai 5	Selesai	100,00%		
		Interior Lantai 6	Selesai	100,00%		
		Interior Lantai 7	Selesai	100,00%		
Interior Lantai 8		Selesai	100,00%			
Realisasi Alat	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 1	1 Paket Showcase Otomotif	Dalam Proses	75,00%	57,69%	93,88%
		1 Paket	Dalam	20,00%		

		Showcase F&B	Proses			
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 2	1 Paket Data Center	Tidak Ada	0,00%		
		1 Paket Command Center	Selesai	100,00%		
		1 Paket Furnitur	Dalam Proses	50,00%		
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 3	1 Paket Mesin Testbed	Tidak Ada	0,00%		
		1 Paket Furnitur	Tidak Ada	0,00%		
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 4	5 Paket Alat Lab	5 Paket Alat Lab	100,00%		
		5 Paket Furnitur Lab	Dalam Proses	75,00%		
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 5	4 Paket Furnitur Kelas	1 Paket Furnitur Kelas	100,00%		
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 6	1 Paket Furnitur Kantor	Dalam Proses	50,00%		
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 7	4 Paket Furnitur Kantor	1 Paket Furnitur Kantor	100,00%		
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Lantai 8	1 Paket Furnitur Kantor	Dalam Proses	80,00%		
Realisasi Kegiatan yang Terencana	Pelatihan Industri 4.0 di PIDI 4.0	400 Orang	1346 orang	336,50%	117,84%	
	Modul dan Kurikulum sesuai SKKNI	3 Modul	4 Modul	133,33%		
	Sertifikasi Kompetensi Industri 4.0	400 Orang	1346 orang	336,50%		
	Improvement Website Profil PIDI 4.0	1 Website PIDI 4.0	1 Website PIDI 4.0	100,00%		
	Improvement Website Capability Center	1 Website Capability Center	1 Website Capability Center	100,00%		
	Improvement Website Ecosystem Center	1 Website Ecosystem Center	1 Website Ecosystem Center	100,00%		
	Pendampingan Industri	9 Industri	0 Industri	0,00%		

	Workshop pendampingan	2 kegiatan	0 Kegiatan	0,00%		
	Jumlah Anchor Industry	2 Industri	2 Industri	100,00%		
	Kunjungan showcase	40 Industri	36 Industri	97,56%		
	Broker Riset	1 Proyek	2 Proyek	200,00%		
	Testbed	1 Proyek	0 Proyek	0,00%		
	Event Ekosistem Tahunan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	0,00%		
	Perjanjian Kerjasama dengan Mitra	24 MoU	35 MoU	145,83%		

Pembangunan fisik Gedung PIDI 4.0 dilaksanakan secara Multi Years dari tahun 2019 hingga 2022. Gedung PIDI 4.0 telah melaksanakan Soft Launching pada awal Desember 2021 yang kemudian juga menjadi salah satu tempat yang ditunjuk untuk Visitasi Delegasi Sherpa G20. Hingga Desember 2022, progress konstruksi fisik PIDI 4.0 sudah selesai (100%), pengerjaan interior pada tahun 2022 juga telah selesai pada 8 lantai (100%), realisasi alat pada 8 lantai gedung PIDI 4.0 (57.69%), dan realisasi kegiatan (117.84%).

- **Kendala:**

1. Terdapat pembatasan kriteria peserta pelatihan diklat 4.0

- **Tindak Lanjut:**

1. Peserta diklat 4.0 tidak lagi harus tenaga kerja industri, namun guru/dosen juga dapat mengikuti diklat 4.0 dengan tetap mengutamakan peserta dari kalangan Tenaga Kerja.

Sasaran Program 3 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu:

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2020		2021		2022 TW IV			Keterangan	Satuan
			T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP3	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan	1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Belum menjadi indikator	82	98,05	85	96,91	114		Persen

	Berkepribadian	2	Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional	Belum menjadi indikator	70	92,11	75	93,15	124		Persen
--	----------------	---	--	-------------------------	----	-------	----	-------	-----	--	--------

1. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik

Dalam rangka memenuhi kewajiban Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan professional. ASN Kementerian Perindustrian yang mengikuti program rintisan gelar/diklat fungsional/diklat teknis. Indikator ini merupakan persentase lulusan pendidikan dan pelatihan (Diklat Struktural (Latsar), dan Diklat Teknis) dengan predikat minimal baik.

Capaian atau realisasi pada Indikator Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik sebesar 96.91% atau 114% dari target 85%. Total peserta diklat 970 orang dengan 940 orang mendapatkan predikat minimal baik dan 30 orang mendapatkan predikat kurangbaik. Indikator Kinerja persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Belum menjadi Indikator Kinerja			80	98.05	122.56	85	96.91	114	Persen

Hingga akhir 2022, persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik adalah 96,91% atau mencapai 114% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022 yaitu 85%. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang 98,05%. Adapun target jangka menengah indikator ini

berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik sebanyak 90%. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 96,91% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 90%. Rincian perhitungan Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik dapat dilihat sebagai berikut:

Pendidikan dan Pelatihan ASN	Total Peserta	Min Baik	Kurang Baik
Infografis	80	73	7
Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 1-12	810	801	9
IELTS	80	66	14
Total	970	940	30

Tercapainya indikator Presentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan predikat minimal baik di dukung dengan beberapa kegiatan, diantaranya menyelenggarakan diklat Struktural yang dilaksanakan melalui pelaksanaan Diklat CPNS Tahun 2022, Diklat teknis industri melalui pelaksanaan diklat Infografis, IELST. Untuk menjaga kualitas dari penyelenggaraan diklat, BPSDMI sebagai penyelenggara diklat juga melakukan Akreditasi penyelenggara diklat yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara, serta Menyusun pedoman maupun kurikulum sesuai dengan kebutuhan diklat.

- **Kendala:**

1. Terdapat blokir automatic sehingga diklat bagi ASN tidak dapat berjalan

dengan maksimal.

- **Tindak Lanjut:**

1. Melakukan diklat menggunakan mekanisme hybrid (online dan offline)

2. Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional

Pembinaan terhadap jabatan fungsional pada hakikatnya tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi Pembina. Namun dalam hal pembinaan karir dan pengembangan kompetensinya menjadi tanggungjawab masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi pemerintah. PPK memiliki peran yang penting dalam hal perhitungan formasi kebutuhan akan Jabatan Fungsional, Pengadaan Jabatan Fungsional, Penilaian Kinerja Jafung, fasilitasi administrasi kepegawaian Jafung, perumusan rekomendasi pengembangan kompetensi sebagai narahubung antara jabfung di instansinya dengan instansi pembina.

Indikator ini merupakan tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional yang di dapatkan melalui nilai kuesioner yang disebar keseluruh Pejabat Fungsional Pengguna Layanan Pusbindiklat SDM Aparatur melalui website pusbindiklat BPSDMI.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional sebesar 93.15 atau 124% dari target 75. Indikator Kinerja efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional	Belum menjadi Indikator Kinerja			70	92.11	131.59	75	93.15	124	Persen

Pada akhir 2022, Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional adalah 93.15% atau mencapai 124% dari target Perjanjian

Kinerja BPSDMI tahun 2022 yaitu 75%. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang 92,11%. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik sebanyak 85%. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 124% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 85%. Rincian perhitungan efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional dapat dilihat sebagai berikut:

No	Indikator	Nilai
1	<i>Dimension</i> (Kualitas Layanan)	98.63
2	<i>Emphaty</i> (Tanggapan, Komunikasi, Penanganan keluhan)	94.52
3	<i>Tangible</i> (aspek Fisik Sarana dan Prasarana Layanan)	89.04
4	<i>Responsiveness</i> (Kecepatan, Kemampuan, dan Respon Petugas)	90.41
Rata-rata		93.15

- **Kendala:**

1. Terdapat relokasi anggaran untuk pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS tahun 2022 yang menjadi kegiatan prioritas di Pusbindiklat SDM Aparatur, sehingga kegiatan Pelatihan untuk Jabatan Fungsional Bidang Industri tidak dapat terlaksana.
2. Terbatasnya SDM untuk menangani Pembinaan Jabatan Fungsional di Pusbindiklat SDM Aparatur yang mencakup 3 JF yaitu PFPP, AMMI, dan Pembina Industri.

- **Perspektif Internal Process**

Sasaran Program 4 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan memiliki 7 Indikator Kinerja yaitu:

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2020		2021		2022 TW IV			Keterangan	Satuan	
			T	R	T	R	T	R	C (%)			
SP4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	1	Infrastruktur kompetensi industri	10	8	4	4	10	9	90	Terdapat perbedaan target pada RKAKL (8 SKKNI/KKNI)	SKKNI/KKNI
		2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Industri	20	7	6	8	20	26	130		LSP dan TUK
		3	Asesor kompetensi dan lisensi	290	208	154	161	300	192	64	Terdapat perbedaan target pada RKAKL (145 orang)	Asessor
		4	Perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat	Belum menjadi indikator kinerja		6	32	8	200	2500		Persen
		5	Nilai Minimum Akreditasi Program Studi di Politeknik	Belum menjadi indikator kinerja		316 (B)	320	331 (B)	332.29	100		Nilai
		6	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Belum menjadi indikator kinerja		120	126	150	222	148		Penelitian
		7	Inkubator Bisnis industri yang tumbuh	3	3	34	39	50	76	152		Tenant

1. Infrastruktur Kompetensi Industri

Infrastruktur Kompetensi Industri pada indikator ini adalah SKKNI/KKNI yang merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SKKNI/KKNI dibangun sesuai dengan kondisi di tempat kerja sehingga dapat menjadi acuan dalam

penyiapan SDM Industri melalui aktivitas pendidikan dan pelatihan serta dalam sertifikasi kompetensi. Keberadaan SKKNI/KKNI juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan kebutuhan rekrutmen tenaga kerjanya serta pengembangan karir pegawai. Penyusunan SKKNI/KKNI dilakukan oleh praktisi industri, asosiasi industri, asosiasi profesi dan pakar di bidang industri. Dalam proses perumusan tersebut dapat dibantu oleh akademisi dan perwakilan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Tahapan perumusan SKKNI mencakup: perumusan SKKNI, verifikasi internal, Prakonvensi SKKNI, Verifikasi Eksternal, Konvensi SKKNI.

Setelah Standar Kompetensi tersusun, perlu dilakukan pemaketan dan penjenjangan kompetensi-kompetensi yang ada pada suatu sektor atau bidang keahlian tertentu mengacu pada standar kualifikasi nasional yang ada. Di Indonesia terdapat 9 jenjang kualifikasi yang dapat diintegrasikan dari sisi pendidikan dan pelatihan serta dari sisi pengalaman kerja. Penjenjangan kualifikasi nasional tersebut dikenal dengan KKNI. Seperti halnya SKKNI, penyusunan KKNI juga dilakukan oleh praktisi industri, asosiasi industri, asosiasi profesi, pakar di bidang industri, akademisi dan perwakilan LSP. Tahapan penyusunan KKNI lebih singkat dibanding SKKNI yaitu Perumusan, Verifikasi dan Konvensi KKNI.

Penyusunan SKKNI yang telah melibatkan banyak pihak diharapkan dapat mengurangi permasalahan mismatch antara supply dan demand penyediaan SDM industri yang selama ini terjadi di Indonesia. Penetapan dokumen SKKNI akan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan dokumen KKNI akan dilakukan oleh K/L pembina sektor yang dalam hal ini adalah Menteri Perindustrian

Indikator ini merupakan jumlah Infrastruktur Kompetensi Industri atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Industri yang dilakukan penyusunannya oleh Pusdiklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri hingga tahap usulan pengesahan.

Capaian atau realisasi pada Indikator Infrastruktur kompetensi industri

telah disusun sejumlah 9 SKKNI (8 RSKKNI disusun oleh Pusdiklat dan 1 RSKKNI disusun PPVI) dari target perjanjian kinerja 10 SKKNI. Perlu kami sampaikan bahwa target SKKNI/KKNI pada DIPA-RKAKL (seuai dengan alokasi anggaran) adalah sebanyak 8 SKKNI/KKNI, namun pada target perjanjian kinerja BPSDMI belum dilakukan penyesuaian. Indikator Kinerja Infrastruktur kompetensi industri belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	Infrastruktur kompetensi industri	10	8	80	4	4	100	10	9	90	SKKNI

Hingga akhir 2022, jumlah infrastruktur kompetensi industri adalah sebanyak 9 SKKNI/KKNI atau mencapai 90% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022 yaitu sebanyak 10 SKKNI. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 4 SKKNI. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai jumlah infrastruktur kompetensi industri sebanyak 10 SKKNI. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 90% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 10 SKKNI/KKNI.

Apabila dibandingkan dengan target RPJM 202-2024 maka capaian

ini belum dapat memenuhi target RPJMN tahun 2022 yaitu sebanyak 20 SKKNI (target RPJMN hingga 2022 sebanyak 60 SKKNI) sedangkan realisasi hingga 2022 sebanyak 21 SKKNI), ketidaktercapaian tersebut disebabkan karena adanya ketidaksesuaian alokasi anggaran, total indikasi pendanaan indikator ini pada RPJM 2020-2024 sebesar 31,7 Miliyar rupiah, namun hingga akhir tahun 2022, BPSDMI selaku pengampu hanya mendapatkan alokasi anggaran sebanyak Rp. 8.432.081.000 atau 27% dari indikasi pendanaan RPJMN. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, BPSDMI mengharapkan adanya penyesuaian anggaran yang akan dialokasikan khususnya pada tahun 2024 sehingga BPSDMI dapat melakukan penyusunan SKKNI agar target RPJMN tahun 2022-2024 dapat tercapai.

Sepanjang tahun 2022 BPSDMI telah melakukan penyusunan terhadap 9 RSKKNI/RKKI yaitu:

1. RSKKNI Industri Otomotif Roda 4
2. RSKKNI Perawatan dan perbaikan kendaraan listrik
3. RSKKNI Industri furniture rumah sakit dan kesehatan
4. RSKKNI Industri sarung tangan kulit
5. RSKKNI Pembuatan Jigs & Fixtures
6. RKKNI Industri Perajutan Tekstil
7. RKKNI Industri Serat Sintetis Tekstil
8. RSKKNI Rekayasa Nanoteknologi Pangan
9. RSKKNI Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan

Penyusunan SKKNI/KKNI telah selesai dilaksanakan namun SKKNI/KKNI merupakan dokumen negara sehingga SKKNI perlu ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berbentuk Keputusan Menteri Ketenagakerjaan sedangkan KKNI ditetapkan oleh instansi pembina yaitu Kementerian Perindustrian yang berbentuk Peraturan Menteri Perindustrian. BPSDMI hanya berwenang dalam penyusunan dan pengusulan penetapan dokumen. Setelah SKKNI/KKNI diusulkan maka dilakukan pengalasan atas penetapan SKKNI/KKNI.

Hingga akhir 2022, seluruh SKKNI sudah dikonvensikan dan sedang menunggu proses penetapan di Kementerian Ketenagakerjaan sementara KKNi sudah dikonvensikan dan sedang menunggu proses harmonisasi dengan bagian hukum.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMN Tahun 2020-

- **Kendala:**

1. Anggaran yang didapatkan seharusnya hanya untuk 8 RSKKNI (sesuai output RKAKL), 7 pada KRO PBK dan 1 pada KRO ABK. Namun pada perjanjian kinerja BPSDMI belum dilakukan penyesuaian anggaran dari 10 SKKNI seharusnya menjadi 8 RSKKNI.

- **Tindak Lanjut:**

1. Melakukan penyesuaian target perjanjian kinerja dengan anggaran yang tersedia di tahun berikutnya.

2. Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Industri

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi dilakukan oleh LSP yang telah mendapat lisensi dari BNSP, suatu Badan Nasional yang memiliki wewenang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi (mengacu pada Perpres Nomor 10 Tahun 2018). LSP merupakan perpanjangan tangan BNSP untuk melakukan sertifikasi kompetensi sesuai ruang lingkupnya masing-masing. Secara umum, terdapat 3 jenis LSP yaitu: LSP Pihak Pertama (terdiri dari LSP P1 Industri dan LSP P1 Pendidikan dan Pelatihan), LSP Pihak Kedua dan LSP Pihak Ketiga. Untuk mendirikan LSP diperlukan beberapa persyaratan antara lain: skema sertifikasi, asesor kompetensi, materi uji kompetensi dan dokumen pendukung lainnya.

Tempat yang digunakan sebagai lokasi uji kompetensi disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK). Secara umum terdapat 3 (tiga) jenis TUK yaitu: TUK tempat kerja, TUK sewaktu dan TUK mandiri. Seluruh TUK yang akan digunakan oleh LSP dalam melakukan pengujian dan sertifikasi kompetensi

harus diverifikasi dan dipastikan telah merepresentasikan kondisi lingkungan kerja sesungguhnya. Pendirian dan pengembangan LSP dan TUK sektor industri dapat difasilitasi melalui kegiatan pada Pusdiklat SDM Industri BPSDMI.

Indikator ini merupakan jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Industri yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Capaian atau realisasi pada Indikator Fasilitas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Industri sejumlah 26 LSP yang dilakukan fasilitas oleh pusdikla BPSDMI atau 130% dari target 20 LSP. Indikator Kinerja Fasilitas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri	20	7	35	6	8	133,33	20	26	130	LSP dan TUK

Hingga akhir 2022, jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri yang difasilitasi BPSDMI sebanyak 26 LSP atau mencapai 130% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022 yaitu sebanyak 20 LSP. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 8 LSP. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri yang difasilitasi BPSDMI sebanyak 20 LSP. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Apabila dibandingkan dengan target RPJM 202-2024 maka capaian ini belum dapat memenuhi target RPJMN tahun 2022 yaitu sebanyak 20 LSP (target RPJMN hingga 2022 sebanyak 60 LSP) sedangkan realisasi hingga 2022 sebanyak 41 LSP), ketidaktercapaian tersebut disebabkan karena adanya ketidaksesuaian alokasi anggaran, total indikasi pendanaan indikator ini pada RPJM 2020-2024 sebesar 9,9 Miliar rupiah, namun hingga akhir tahun 2022, BPSDMI selaku pengampu hanya mendapatkan alokasi anggaran sebanyak Rp. 3.032.116.000 atau 31% dari indikasi pendanaan RPJMN. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, BPSDMI mengharapkan adanya penyesuaian anggaran yang akan dialokasikan khususnya pada tahun 2024 sehingga BPSDMI dapat memperbanyak fasilitasi LSP dan TUK agar target RPJMN tahun 2022-2024 dapat tercapai.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 130% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 20 LSP. Selama tahun 2022 BPSDMI telah melakukan fasilitasi terhadap 26 LSP yaitu:

No	Nama LSP	Bidang
1	CLSP Politeknik Morowali	Manufaktur Industri
2	CLSP PT Gisma	Manufaktur Industri (Pemesinan)
3	CLSP Sekar Jagad	Batik
4	CLSP Mold & Dies	Mold & Dies
5	CLSP GRK	Pendukung
6	CLSP Las Profesional Indonesia	Logam/Mesin
7	CLSP Manajemen Pelayanan Indonesia	Pendukung
8	CLSP IOI	Otomotif
9	CLSP Teknologi Informatika Indonesia	Teknologi Informasi
10	CLSP Enterpreneur Digital Indonesia	Teknologi Informasi
11	LSP BDI Jakarta	Otomotif, Garmen
12	LSP BDI Makassar	Agro, Pangan

13	LSP BDI Yogyakarta	Garmen, Pangan
14	LSP Batik	Batik
15	LSP Elektronika Indonesia	Elektronika
16	LSP Garmino Plus	Garmen
17	LSP Kopi Indonesia	Agro
18	LSP perkapalan	Logam/Mesin
19	LSP BDI Surabaya	TPT
20	LSP BDI Padang	Pengolahan Agro/ Pangan
21	LSP BDI Denpasar	Animasi/Kreatif
22	LSP BDI Medan	Pengolahan Agro/ Pangan
23	LSP SMK SMAK Bogor	Kimia Analisis
24	LSP SMK SMAK Padang	Kimia Analisis
25	LSP SMK SMAK Makassar	Kimia Analisis
26	LSP Teknik dan Manajemen Industri	Manajemen Industri

- **Kendala:**

1. Terdapat beberapa pihak pengusul yang memiliki komitmen kurang dalam pelaksanaan pembangunan atau pengembangan CLSP atau LSP.

- **Tindak Lanjut:.**

1. Meningkatkan motivasi pihak pengusul LSP.

3. Asesor Kompetensi dan Lisensi

Asesor Kompetensi adalah orang yang melakukan pengujian kompetensi. Seorang asesor kompetensi harus menguasai teknis sesuai bidang yang diujikan serta metodologi pengujiannya. Kompetensi metodologi tersebut diberikan melalui Diklat Asesor Kompetensi. Peserta Asesor Kompetensi dapat berasal dari unsur praktisi industri, asosiasi industri atau profesi, pakar, akademisi dan pihak lain yang berkaitan dengan lingkup LSP induk. Di akhir sesi diklat, peserta akan mengikuti Uji Kompetensi sebagai bukti kelayakan untuk direkomendasikan sebagai seorang Asesor Kompetensi. Masa berlaku sertifikat Asesor Kompetensi adalah 3 tahun. Seorang Asesor Kompetensi tidak dapat ditugaskan melakukan pengujian bila masa berlaku sertifikatnya sudah habis. Untuk itu, dapat dilakukan perpanjangan masa berlaku sertifikat Asesor Kompetensi melalui mekanisme Diklat Recognition Current

Competency (RCC) Asesor Kompetensi. Peserta Diklat RCC Asesor Kompetensi haruslah seorang Asesor Kompetensi yang sudah pernah melakukan pengujian kompetensi dan dibuktikan melalui portofolio uji kompetensi. Indikator ini merupakan jumlah orang yang mengikuti diklat assessor dan diklat RCC assessor oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Capaian atau realisasi pada Indikator Asesor Kompetensi dan Lisensi sejumlah 192 orang atau 64% dari target 300 orang yang terdiri dari 5 angkatan diklat assessor dan 4 angkatan diklat RCC assessor. Indikator Kinerja Asesor Kompetensi dan Lisensi belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2019			2020			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	Asesor kompetensi dan lisensi	290	208	71,72	154	161	104,54	300	192	64	Asesor

Hingga akhir 2022, jumlah diklat assessor kompetensi adalah sebanyak 192 asessor atau hanya mencapai 64% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022 yaitu sebanyak 300 SKKNI. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 161 asessor. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai jumlah diklat asesor kompetensi dan lisensi sebanyak 320 asessor. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Ketidaktercapaian ini diantaranya disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran yang diperoleh, dimana seharusnya target output DIPA-RKAKL hanya 145 asessor, namun pada target perjanjian kinerja BPSDMI belum dilakukan penyesuaian masih sebesar 300 asessor. Apabila capaian realisasi dibandingkan dengan target berdasarkan DIPA-RKAKL

maka capaian indikator ini sebesar 132%.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 64% berdasarkan target perkin BPSDMI dan 132% berdasarkan target DIPARKAKL diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target sebesar 320 asesor. Rincian diklat asesor kompetensi dan lisensi sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta KOMPETEN	Lokasi	Kepesertaan
1	Diklat Asesor Kompetensi I	7-11 Maret 2022	24	24	Harris kuta galleria, bali	Lsp bdi denpasar (19), lsp politeknik ati makassar (5)
2	Diklat Asesor Kompetensi II	21-25 Maret 2022	24	24	Santika premiere padang, sumatera barat	Lsp smti pontianak (3), smakbogor (1), atim (2), smti ygy (6), smak padang (9), smak ma (2), kimia industri (1)
3	Diklat Asesor Kompetensi III	6-10 Juni 2022	24	24	Grand dafam signature surabaya	Lsp perkapalan (10), lsp pal (10), smti pontianak (2), atim (2)
4	Diklat Asesor Kompetensi IV	20-24 Juni 2022	24	24	Grandhika setiabudhi medan	Lsp bdi medan (12), bdi padang(7), bdi makassar (5)
5	Diklat RCC Asesor Kompetensi I	23-24 Mei 2022	24	24	The zhm premiere hotel padang	Lsp bdi medan (2), smti banda aceh (1), smti padang (3), smti pontianak (3), potek atip (9), lsp ki (6)
6	Diklat RCC Asesor Kompetensi II	3-4 Agustus 2022	24	24	El royale hotel bandung	Lsp smti pontianak (2), lsp pal (4), bdi padang (4), poltek sttt (5), poltek app (4), lsp tekstil (5)
7	Diklat RCC Asesor Kompetensi III	3-4 Agustus 2022	24	24	El royale hotel bandung	Lsp to (16), lsp tptu (4), lsp elektronika indonesia (4)
8	Diklat RCC Asesor Kompetensi IV	1-2 Desember 2022	24	24	El royale hotel bandung	Lsp to (3), lsp et (4), lsp ki (3), lsp sdmtik (3), lsp lmi (2), lsp pengopi (7), lsp garmino plus (1), lsp tekstil (1)
9	Diklat Asesor Kompetensi (Poltek	11-15 Juli 2022	24	24	The rinra makassar	Politeknik industri logam morowali (24)

	Morowali)					
TOTAL				192		

- **Kendala:**

1. Anggaran yang didapatkan seharusnya hanya untuk 145 orang (sesuai output RKAKL pada KRO DCH. Namun pada perjanjian kinerja BPSDMI belum dilakukan penyesuaian anggaran dari 300 orang seharusnya menjadi 145 orang.

- **Tindak Lanjut:.**

1. Meningkatkan motivasi pihak pengusul LSP.

4. Perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat

Dalam upaya pengembangan kompetensi, unit pendidikan diharapkan dapat terlibat pengembangan ekosistem industri, dilakukan kerja sama dengan pola saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kerja sama ini menjadi kebijakan penting bagi unit pendidikan dalam rangka untuk:

1. Menggali dan memahami kebutuhan dan permasalahan masyarakat yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan;
2. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan diutamakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pemanfaatan hasil penelitian secara konkret;
3. Mendapatkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang memadai.

Jenis kerja sama dan pengabdian masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh industry pada Unit Pendidikan adalah Pendampingan teknologi, Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan konsultasi industry, Penyuluhan, dan Pemanfaatan Workshop/Laboratorium/Teaching Factory.

Indikator ini merupakan jumlah dari Perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat seluruh unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian (9 SMK, 10 Politeknik, dan 2 Akademi Komunitas).

Capaian atau realisasi pada Indikator perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat sebanyak 200 perusahaan dari target 8 perusahaan atau 2500%. Indikator Kinerja Perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat pada Pendidikan Vokasi telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	Perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat	Belum menjadi Indikator Kinerja			6	32	533	8	200	2500	Persen

Hingga akhir 2022, jumlah Perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat adalah sebanyak 200 perusahaan atau mencapai 2500% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022 yaitu sebanyak 8 perusahaan. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 32 perusahaan. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai jumlah diklat asesor kompetensi dan lisensi sebanyak 12 perusahaan. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 2500% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian

indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 12 perusahaan. Rincian capaian Perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat pada Pendidikan Vokasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Satuan Kerja	Jumlah	Perusahaan
AKA Bogor	69	Layanan Pengujian:
		1. The Jungle Waterpark (PT. Graha Andrasentra Propertindo)
		2. PT. Aloe Vera Indonesia
		3. PT. Arindo Pasific Chemicals
		4. PT. Tesso Tetra Chemika
		5. PT. Bali Sari
		6. PT. Infratama Yakti
		7. PT. TUV-Nord Indonesia
		8. (KSO) PT. Cipta Karya Kreasi dan PT. Sentosa Asri Propertindo Cluster Varana
		9. PT. Brosmedic Renal Indonesia
		10. PT. Anissa Belfa Persero
		11. PT. Polychemie Asia Pasific Permai
		12. PT. Sigma Utama
		13. PT. Trimitra Medika
		14. PT. Tri Guna Prakarsa
		15. PT. New Ecology Energy Indonesia
		Layanan Penelitian, Pelatihan/Pendidikan:
		1. PT Greenhope
		2. PT Packaging Development Federation
		3. PT Suri Tani Pemuka
		4. UMKM Dapoer Mamih
		5. Pemerintah Daerah Kota Bogor
		6. PT Kia Makmore Lestari
		7. PT Mandiri Fasha Analitika
		8. PT Indo Arunika Ranajaya
		9. PT Nipress Energi Otomotif
		Layanan Pengabdian:
		1. IKM Sangkara
		2. IKM Dapur Mysari
		3. IKM Batik Bogor Pancawati
		4. IKM Batik Panineungan
		5. UMKM HIMILK
		6. UMKM Kedai Kue Faradibba
		7. IKM Kota Manis
		8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa

		Barat
		9. IKM Cilok Denok CLDK
		10. IKM Sabaraya Telor Asin Rempah
		11. Koperasi Halal Karya Mandiri
		12. PT Bina Satria
		13. IKM Fathisyamkefir
		14. IKM Bulbil Fresh
		15. IKM Warisan Leluhur
		16. IKM Soya Manik
		17. IKM Kelompok Tani Empat Belas Mandiri
		18. PT Agro Boga Utama
		19. Pemerintah Daerah Kota Bogor (Disperdagin)
		20. Indo Arunika Ranajaya
		Layanan Penyewaan Alat:
		PT TUV Nord Indonesia
		Layanan Program D1:
		1. PT Indolakto
		2. PT Mahatex Indonesia Jaya
		3. PT Dan Liris
		4. PT AK-Tekstil Solo
		5. PT Sekar Lima Pratama
		6. PT Sinar Surya Indah Lestari
		7. PT Sari Warna Asli
		8. PT Sri Rejeki Isman
		9. PT APAC Inti Corpora
		10. PT Theodore Pan Garmindo
		11. PT Hanil Indonesia
		12. PT Adikencana Mahkota Buana
		13. PT Mutu Gading Tekstil
		14. PT Bio Alam Lestari
		15. PT Usmanjaya Mekar Textil Industry
		16. PERPAMSI
		Layanan Job Fair:
		1. PT Unilab Perdana
		2. PT Analisis Anugerah Sempurna
		3. PT Indotech Scientific
		4. PT Primarajuli Sukses
		5. PT Ikova Amerta Indonesia
		6. PT Konimex
		7. PT Fortech Lingkungan Indonesia
		8. PT CS2 Pola Sehat
APP Jakarta	8	Layanan Pelatihan :
		1. PT Solid Logistic

		Layanan Pogram D1 :
		1. Asperindo Wilayah DKI Jakarta
		2. Asperindo Wilayah Sulawesi Selatan
		3. Asperindo Wilayah Kalimantan Selatan
		4. Asperindo Wilayah Bali
		5. Sumarecon Serong dan PT Sanken
		6. PT Petrokimia Gresik
		7. Pemda Sidrap dan Pinrang Sulawesi Selatan
ATI Makassar	9	Kerjasama:
		1. POLMAN Bandung (Pengembangan Vokasi Berwawasan Industri dan Teknologi)
		2. CV Kawan Lama (Tridharma Perguruan Tinggi)
		3. Dinas Tenaga Kerja Makassar (Pelaksanaan kegiatan pembinaan K3 dan ketenagakerjaan)
		4. PT MARI SEJAHTERA INDONESIA (Peningkatan mutu pendidikan dan keterampilan)
		5. BPOM (Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan)
		6. PT CITATAH (KKP, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)
		7. Fakultas Teknologi Industri UMI (Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan SDM di bidang Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Pertambangan, dan profesi insinyur)
		8. Rektor Universitas Fajar (Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat)
		9. Pemerintah Kecamatan Simbang Kabupaten Maros (Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat)
ATI Padang	19	Layanan pengabdian masyarakat kepada UKM:
		1. IKM Kelompok Tani Pembibitan Tanaman Bunga dan Buah, Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang. 085101890310
		2. CV. Keju Lasi, UKM pengolah susu sapi di Kabupaten Agam., Jorong Lasi Tuo, Nagari Lasi, Kecamatan Canduang – Kabupaten Agam.. 081319733582
		3. CV. Amna Lab Aromaterapi, Perumnas Taman Asri Halaban II Blok M No 12 Kec. Kubung, Kab. Solok.. Ika Ambarlina
		4. Kelompok Usaha Kerupuk Ramuak, VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman. 081267343373
		5. UKM Minyak Atsiri Desa Balai Batu Sandaran Kota Sawalunto
		6. IKM Setia, Jl. Adinegoro No.3A Gang Menara, Kel. Birugo, Kec. ABTB, Kota Bukittinggi. 0
		7. UD. RANTI, Desa Pasar Kubang, Kec. Lembah Segar, Kota Sawahlunto. 082387034913
		8. UKM Kanagarian Siguntur Kec Kot XI Tarusan Kab Pesisir

		Selatan
		9. UKM Karya di Kanagarian Sungai Buluh Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padan Pariaman
		Layanan Inkubator Bisnis kepada UKM dalam mendapatkan ijin PIRT dan pengembangan Produk:
		1. Dapur Uda Rauf
		2. D'Tri Cake and Brownies
		3. D'Irma Cake
		4. LMS Cake
		5. Nadra Cake & Cookies
		6. Kampuang Salero
		7. Sindy Snack
		8. Tingming
		9. Des Brownies & Cake
		10. COGAN
ATKY Yogyakarta	18	Layanan Pengujian :
		1. CV. Fajar Makmur
		2. Hasan Basalamah
		3. Syah Craft
		4. Ulil Aidil
		5. CV. Qita Mandiri Leather
		6. CV. Satria 2000 Leather
		7. Anggun Rotan
		8. Kias Leather
		9. CV. Berliano
		10. MG Company
		11. Kartika Jaya
		12. Sasa Design
		13. CV. Widi Rahayu
		14. Rosman Leather
		Layanan Program Kerjasama D1 :
		1. PT. Intidragon Suryatama
		2. PT. Karyamitra Budisentosa
		3. PT. Bintang Indokarya Gemilang
		4. PT. Dwi Prima Sentosa
PTKI Medan	5	Pendidikan dan Pelatihan:
		1. PT. SAFINDO RAYA (PJK3)
		2. PT UNILEVER OLEOCHEMICAL INDONESIA
		3. LPP AGRO
		4. POLITEKNIK KAMPAR
		Pengabdian Masyarakat bagi UKM:

		1. UKM Berkah Sale Desa Sambirejo
STMI Jakarta	20	1. PT. Asmar Nakama Partogi (Sosialisasi Hak Milik Industri) 2. PT. Laksana Teknik Makmur (Penyuluhan Hak Paten Komponen Otomotif, dll) 3. PT. Mada Wikri Tunggal (OEE dalam Implementasi TPM, dll) 4. PT. Wika Industri Manufaktur (Implementasi Sistem Penggerak Roda Belakang) 5. PT. Ganding Toolsindo (Penerapan K3 dan 5S, dll) 6. PT. Inti Ganda Perdana (Sosialisasi dan Implementasi Konsep Industri Hijau) 7. CV. Muda Teknindo (Desain Jig Positioning) 8. Bengkel Faris Jaya Motor (Implementasi 5R) 9. PT. Rekadaya Multi Adiprima (Audit 5S pada Divisi Non-Woven) 10. PT. Srikandi Diamond Motor (Sosialisasi untuk Meningkatkan Grit Pemasar) 11. Coctor Motor Jatiasih (Penerapan 5R) 12. Dealer AHM Bekasi (Penyuluhan Kinerja Keuangan) 13. Bengkel Mobil Wiwin Mardiono (Sosialisasi Sistem Informasi Peramalan Kebutuhan Spare Parts) 14. Bengkel Motor (Aplikasi Chatbot Konsultasi Predictive Maintenance) 15. Bengkel XYZ (Pembuatan Aplikasi Pendukung Keputusan) 16. Dealer Daihatsu Serpong (Sosialisasi Pentingnya Penentuan Harga dan Strategi Promosi) 17. Desa Cidokom Kab. Bogor (Peningkatan Kegiatan Pemasaran Produk Kursi dan Meja) 18. PT. Komatsu Indonesia (Penerapatan Tabel Standar Kerja Kombinasi) 19. Bengkel AHASS (Sosialisasi Penerapan Budaya 5R) 20. PT. Aristo Satria Mandiri (Analisis Proses Bisnis dengan BPMN)
STTT Bandung	32	1. Godhong Asri (Pelatihan transformasi 4.0) 2. Mekar Sejahtera (Pelatihan transformasi 4.0) 3. Rj Nenglis (pelatihan transformasi 4.0) 4. Rakuna (Pelatihan tranformasi 4.0) 5. Prodigy (Pelatihan transformasi 4.0) 6. CV Buana Sejahtera (Pelatihan transformasi 4.0) 7. Megana Kids Wear (Pelatihan transformasi 4.0) 8. Endomoda (Pelatihan transformasi 4.0) 9. Qitna Fashion (Pelatihan transformasi 4.0) 10. Endomoda (Pelatihan Tranformasi 4.0) 11. PT. ATEJA (Pengguna plattform T-Car dan peserta Job Fair)

		12. BIENSI FESYENINDO (Pengguna platform T-Car dan peserta Job Fair)
		13. PT. PELANGI ELASINDO (Pengguna platform T-Car dan peserta Job Fair)
		14. LOGO DE CORPS (Pengguna platform T-Car dan peserta Job Fair)
		15. BUSANA APPAREL GROUP (Pengguna platform T-Car dan peserta Job Fair)
		16. PT. JIALE INDONESIA (Pengguna platform T-Car dan peserta Job Fair)
		17. ARGO MANUNGGAL TRIASTA (Pengguna platform T-Car dan peserta Job Fair)
		18. DUNIATEX GROUP (Pengguna platform T-Car dan peserta Job Fair)
		19. GISTEX GROUP (Pengguna platform T-Car dan peserta Job Fair)
		20. PT. DHANAR MAS (Pengguna platform T-Car dan peserta Job Fair)
		21. LUCKY TEXTILE GROUP (Pengguna platform T-Car dan peserta Job Fair)
		22. PT. SINAR CONTINENTAL (Pengguna platform T-Car dan peserta Job Fair)
		23. PT. BEHAESTEX (Pengguna platform T-Car dan peserta Job Fair)
		24. PT. INDO TAICHEN (Pengguna platform T-Car dan peserta Job Fair)
		25. PT. DINASIRA SEMBADA (Pengguna platform T-Car dan peserta Job Fair)
		26. PT. GUNA MITRA PRIMA (Pengguna platform T-Car dan peserta Job Fair)
		27. PT. GOLDEN TEKSTIL INDONESIA
		28. PT. YOLITA JAYA INDONESIA
		29. AMEYA GROUP
		30. PT. PAN BROTHERS TBK & GROUP
		31. Balai Laboratorium Bea Cukai Kementerian Keuangan (PKM)
		32. PT SGS Indonesia (PKM)
Akom Surakarta	4	1. UKM Konveksi Total Sportswear Klaten (Rancang bangun alat inspeksi garmen dan pendampingan penghitungan kapasitas produksi)
		2. UKM Pembuatan Sarung Goyor Sragen (Penguatan kapasitas SDM)
		3. UKM Lurik Asri Tlingsing Klaten (Penyuluhan dan pendampingan K3 dan pengolahan limbah, Hibah bahan baku benang)
		4. UKM Konveksi Seyumicho Kartasura Sukoharjo (Pelatihan

		produktivitas industri, penataan mesin, penerapan 6S, ergonomi, dan K3)
PIL Morowali	1	CV. Cipta Sinergi Manufacturing (manuf SME 4.0)
Akom Bantaeng	1	Pendidikan : PT Schneider Indonesia dalam bentuk Webinar (Learning With Expert) sebanyak 6 kali pada tahun 2022
PIFPK Kendal	4	CV L'AMBIANCE SALATIGA Sentra IKM di Desa Pucang Sentra IKM di Desa Kumpulrejo Sentra IKM di Desa Kertosari
SMAK Bogor	1	PT Sigma Utama (Proyek penelitian bersama)
SMAK Makassar	1	LSP P-3 Telapi (Kerjasama penggunaan TUK)
SMTI Bandar Lampung	1	Layanan Analisa Produk PT Mahardika Aurora Sinergi
SMTI Makassar	1	Layanan pelatihan untuk pelaku usaha IKM pada olahan produk coklat dan turunannya Nama IKM: 1. Naarif Putra 2. Sejalan Drink 3. Kedai Yabie 4. Kevins Cookies 5. WiBy choco and cake 6. Chobana 7. IKM Nifar 8. MyOde Cake & Cookies 9. dinda cake 10. Lamada Food 11. Ghiokitchen 12. Kina Kitchen 13. Coklatku 14. Glascok
SMTI Padang	4	Layanan Pelatihan Untuk Pelaku Usaha IKM oleh TEFA - Sinovik Bidang Smart Controller Kubung Jamur dan Sewangi Berdaya Emas 1. Kelompok Tani Sereh Wangi Lubuk Limpato 2. Koperasi Serba Usaha Llaing Sepakat 3. Kelompok Tani Serai Wangi Nagari Mandeh 4. Kelompok Tani Serai Wangi Sabar Menanti
SMTI Pontianak	1	Layanan Perekaya Peralatan PT. IMF

SMTI Yogyakarta	1	Layanan pengujian briket arang dengan CV. Karya Perkakas Jogja
TOTAL	200	

- **Kendala:**

1. Keterbatasan komunikasi dengan pihak industri dan penyesuaian waktu industri
2. Beberapa ruang lingkup dalam MoU belum ditindaklanjuti

- **Tindak Lanjut:**

1. Terus berkoordinasi dengan industri dalam hal tindak lanjut pemanfaatan layanan

- **Faktor pendukung:**

1. Target indikator ini pada awalnya merupakan MoU dengan perusahaan, namun setelah dilakukan penyusunan pedoman kinerja pada rencana strategis BPSDMI, telah ditetapkan beberapa kriteria Perusahaan yang Memanfaatkan Layanan Industri dan Program Pengabdian Masyarakat sehingga satuan kerja dapat memasukkan beberapa perusahaan yang memanfaatkan layanan satuan kerja sebagai output sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan pada rencana strategis BPSDMI.

5. Nilai Minimum Akreditasi Program Studi di Politeknik

Akreditasi program studi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Indikator ini merupakan rata-rata nilai minimum akreditasi dari program studi dalam satu politeknik atau akademi komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah melakukan akreditasi lebih dari satu kali atau pernah melakukan reakreditasi hingga tahun 2022.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Nilai Minimum Akreditasi Program Studi di Politeknik sebesar 332.29 dari target 331 atau 100%. Indikator Kinerja Nilai Minimum Akreditasi Program Studi di Politeknik belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	Nilai Minimum Akreditasi Program Studi di Politeknik	Belum menjadi indicator kinerja			316 (B)	320	101,27	331 (B)	332.29	100	Nilai

Hingga akhir 2022, Nilai Minimum Akreditasi Program Studi di Politeknik senilai 332.29 atau mencapai 100% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022 yaitu senilai 331(B). Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 senilai 320. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai Nilai Minimum Akreditasi Program Studi di Politeknik senilai 361 (B). Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 100% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target senilai 361 (B).

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai rata-rata akreditasi program studi dari beberapa nilai akreditasi program studi diatas 300 yang ada di

satuan kerja Politeknik dan Akademi Komunitas. Bagi program studi yang nilainya di bawah 300, diminta untuk melakukan reakreditasi. Berdasarkan data hingga akhir triwulan IV 2022, diperoleh nilai rata-rata akreditasi program studi sebesar 332,29 dari target nilai 331 atau memperoleh capaian sebesar 100% dari target.

Terdapat 3 prodi baru yang belum memiliki nilai akreditasi dan 9 prodi dari 3 Politeknik dan Akademi Komunitas yang belum melakukan reakreditasi. Detail untuk capaian indikator kinerja Nilai minimum akreditasi program studi dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai capaian pada tahun ini terbilang sudah cukup baik, namun demikian tetap harus diperhatikan mengenai batas waktu/masa berlakunya nilai akreditasi tersebut dan diambil langkah-langkah perbaikan/peningkatan untuk perpanjangan akreditasi atau reakreditasi. Terdapat 1 program studi dari Politeknik STMI Jakarta yakni prodi Administrasi Bisnis Otomotif (D-IV) yang masa berlaku akreditasinya telah habis pada tanggal 27 Desember 2022 dengan nilai akreditasi sebesar 341 (B). Namun hingga saat laporan ini disusun, belum diperoleh informasi terkait nilai akreditasi terbaru atas prodi tersebut sehingga perhitungan masih mengasumsikan nilai akreditasi tetap.

Rincian capaian Nilai Akreditasi Program Studi di Politeknik Pendidikan Vokasi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Perguruan Tinggi	Program Studi	Strata	Peringkat	Nilai Akreditasi	Ket
1	Politeknik ATI Padang	Teknik Industri Agro	D-III	A	362	
		Analisis Kimia	D-III	B	351	
		Teknik Kimia Bahan Nabati	D-III	B	348	
		Manajemen Logistik Industri Agro	D-III	B	353	
		Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan	D-IV			prodi baru
2	Politeknik ATI Makassar	Teknik Industri Agro	D-III	B	347	
		Otomasi Sistem Permesinan	D-III	B	336	
		Teknik Manufaktur Industri Agro	D-III	A	361	
		Teknik Kimia Mineral	D-III	B	353	
3	Politeknik STTT	Kimia Tekstil	D-IV	A	364	
		Teknik Tekstil	D-IV	A	365	

	Bandung	Produksi Garmen	D-IV	A	376	
		Rekayasa Tekstil dan Apparel	S-II Terapan	Baik	264	
4	Politeknik AKA Bogor	Penjaminan Mutu Industri Pangan	D-III	B	318	
		Pengolahan Limbah Industri	D-III	Baik Sekali	345	
		Analisis Kimia	D-III	A	367	
		Nano				prodi baru
5	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	Agribisnis Kelapa Sawit	D-III	B	315	
		Teknik Mekanika	D-III	B	306	
		Teknik Kimia	D-III	B	312	
6	Politeknik ATK Yogyakarta	Teknologi Pengolahan Karet Dan Plastik	D-III	B	301	
		Teknologi Pengolahan Kulit	D-III	B	352	
		Teknologi Pengolahan Produk Kulit	D-III	B	312	
7	Politeknik STMI Jakarta	Teknik Kimia Polimer	D-IV	B	312	
		Sistem Informasi Industri Otomotif	D-IV	B	316	
		Administrasi Bisnis Otomotif	D-IV	B	341	Kadaluwarsa
		Teknik Industri Otomotif	D-IV	Baik Sekali	326	
		Teknologi Rekayasa Otomotif	D-IV	Baik	234	prodi baru
8	Politeknik APP Jakarta	Manajemen Logistik Industri Elektronika	D-III	B	316	
		Perdagangan Internasional Wilayah Asean Dan RRT	D-III	B	315	
		Manajemen Pemasaran Industri Elektronika	D-III	B	329	
9	Politeknik Industri Logam Morowali	Teknik Perawatan Mesin	D-III	Baik	216	belum reakreditasi
		Teknik Listrik dan Instalasi	D-III	Baik	205	belum reakreditasi
		Teknik Kimia Mineral	D-III	Baik	225	belum reakreditasi
10	Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal	Teknik Produksi Furnitur	D-III	Baik	211	belum reakreditasi
		Desain Furnitur	D-III	Baik	242	belum reakreditasi
		Manajemen Bisnis Industri Furnitur	D-III	Baik	228	belum reakreditasi
11	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta	Teknik Pembuatan Benang	D-II	Baik Sekali	316	
		Teknik Pembuatan Kain Tenun	D-II	Baik Sekali	321	
		Teknik Pembuatan Garmen	D-II	Baik Sekali	301	

12	Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng	Teknik Perawatan Mesin	D-II	Baik	202	belum reakreditasi
		Teknik Listrik dan Instalasi	D-II	Baik	272	belum reakreditasi
		Analisis Kimia	D-II	Baik	265	belum reakreditasi

Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga akan dapat mencapai target pada tahun 2024 sebesar 361 (A).

- **Kendala:**

1. Reakreditasi membutuhkan dokumen yang cukup banyak dan kompleks sehingga diperlukan waktu penyusunan yang cukup lama.

6. Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang Didesiminasikan Melalui Seminar Nasional dan Internasional

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan kewajiban penelitian tersebut perguruan tinggi dituntut untuk memiliki dosen yang kompeten serta mampu menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, mendiseminasikan hasil penelitian dan pada akhirnya menghasilkan berbagai proses dan produk teknologi, seni, dan budaya yang berujung antara lain pada Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian.

Revolusi Industri 4.0 atau Fourth Industry Revolution (4IR) yang telah digaungkan selama beberapa tahun terakhir tak hanya fokus pada pengembangan sektor industri. Lebih dari itu, revolusi industri juga memengaruhi berbagai bidang kehidupan, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, peningkatan keterampilan berbasis teknologi, serta persaingan di kancah perdagangan internasional. Peningkatan kualitas SDM bisa diwujudkan melalui penelitian terapan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Target penerapan hasil penelitian oleh Politeknik dan Akademi Komunitas adalah publikasi hasil penelitian melalui tulisan ilmiah prosiding seminar nasional / internasional, serta jurnal ilmiah nasional terakreditasi / bereputasi internasional.

Indikator ini merupakan jumlah Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang Didesiminasikan Melalui Seminar Nasional dan Internasional di oleh polieteknik dan akademi komunitas di lingkungan kementerian perindustrian.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang Didesiminasikan Melalui Seminar Nasional dan Internasional di Politeknik sebesar 222 penelitian atau 148% dari target 150 penelitian. Indikator Kinerja Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang Didesiminasikan Melalui Seminar Nasional dan Internasional telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2019			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Belum menjadi Indikator Kinerja			120	126	105	150	222	148	Penelitian

Hingga akhir 2022, jumlah Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional adalah sebanyak 222 penelitian atau mencapai 148% dari target Perjanjian Kinerja

BPSDMI tahun 2022 yaitu sebanyak 150 penelitian. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 126 penelitian. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai jumlah Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional sebanyak 200 penelitian. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 148% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 200 penelitian. Rincian capaian Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang Didesiminasikan Melalui Seminar Nasional dan Internasional sebagai berikut:

No	Perguruan Tinggi	Seminar nasional	Seminar Internasional	Jurnal Nasional	Jurnal Internasional
1	Politeknik ATI Makassar	0	2	33	2
2	Politeknik STMI Jakarta	0	0	13	2
3	Politeknik APP Jakarta	0	0	3	1
4	Politeknik STTT Bandung	0	46	2	3
5	Politeknik Industri Logam Morowali	0	0	0	0
6	Politeknik AKA Bogor	0	0	16	13
7	Akom Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta	3	0	7	0
8	PTKI Medan	0	1	11	6

9	Politeknik ATI Padang	0	1	23	1
10	Politeknik Industri Furnitur dan Produk Kayu Kendal	0	0	1	0
11	Politeknik ATK Yogyakarta	1	4	18	6
12	Akom Industri Manufaktur Bantaeng	0	1	2	0
TOTAL		222			

- **Kendala:**

1. Penelitian masih tentang penelitian dasar dan berproses ke applied research.

- **Tindak Lanjut:**

1. Mendorong para dosen untuk melakukan applied research

Inkubator Bisnis Industri yang Tumbuh

Program Inkubator Bisnis merupakan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada Peserta Inkubasi (Tenant). Tenant inkubator bisnis pada balai diklat dan Pendidikan tinggi adalah masyarakat (umum dan mahasiswa, alumni) yang telah memiliki prospektif usaha. Adapun tahapan kegiatan inkubator bisnis di balai diklat dan Pendidikan tinggi, meliputi tahap pra inkubasi, tahap inkubasi, dan tahap pasca inkubasi. Peserta inkubasi terdiri dari peserta yang sudah memiliki usaha sebelumnya ataupun mulai dari awal. Output dari inkubator bisnis ini adalah tenant yang memiliki produk yang siap di pasarkan.

Indikator ini merupakan jumlah Inkubator Bisnis Industri yang Tumbuh yang dilaksanakan oleh BDI Jakarta, BDI Yogyakarta, BDI Denpasar, dan BDI Makassar, STTT Bandung, AKA Bogor, STMI Jakarta selaman tahun 2022

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Inkubator Bisnis Industri

yang Tumbuh sebanyak 76 tenant atau 152% dari target 50 tenant. Indikator Kinerja Inkubator Bisnis Industri yang Tumbuh telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Inkubator Bisnis Industri yang Tumbuh telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	Inkubator Bisnis industri yang tumbuh	3	3	100	34	39	114,71	50	76	152	Tenant

Hingga akhir 2022, jumlah Inkubator Bisnis industri yang tumbuh adalah sebanyak 76 tenant atau mencapai 152% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022 yaitu sebanyak 50 tenant. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 39 tenant. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai jumlah Inkubator Bisnis industri yang tumbuh sebanyak 70 tenant. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 152% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 70 tenant. Rincian capaian Inkubator Bisnis Industri yang Tumbuh sebagai berikut:

No	Satker Pembina	Jumlah Tenant	Karyawan
1	BDI YOGYAKARTA	3	21

2	BDI MAKASSAR	10	47
3	BDI JAKARTA	10	32
4	BDI DENPASSAR	24	74
5	STTT BANDUNG	20	71
6	AKA BOGOR	3	9
7	STMI JAKARTA	6	155
TOTAL		76	409

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 152% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja dan Kementerian Perindustrian sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga akan dapat mencapai target pada tahun 2024 sebesar 70 tenant.

- **Kendala**

1. Anggaran yang terbatas menyebabkan wilayah peserta incubator bisnis hanya berada pada sekitar satuan kerja Pembina.

- **Tindak Lanjut**

1. Mendorong satuan kerja politeknik yang belum memiliki kegiatan incubator bisnis untuk menjadi pembina indkubator bisnis

• **Perspektif Learn & Growth**

Sasaran Program 5 Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu:

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2020		2021		2022 TW IV			Keterangan	Satuan
			T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP5	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	Belum Menjadi Indikator Kinerja		50	81.24	60	70,33	117		Persen

1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Nilai capaian kinerja dari persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Kemenperin diperoleh dengan membandingkan realisasi anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk dalam negeri dengan total pagu anggaran penggunaan produk dalam negeri berdasarkan akun.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI sebesar 70.33% atau 117% dari target 60%. Indikator Kinerja Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	Belum menjadi Indikator Kinerja			50	81.24	162.5	60	70,33	117	Persen

Hingga akhir 2022, Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI sebesar

70,33% atau mencapai 117% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022 yaitu sebesar 50%. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 81,24%. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI sebesar 80%. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 117% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 80%. Data Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI diperoleh dari intranet kementerian perindustrian pada menu Emonitoring-APBN sebagai berikut:

Intranet Kemenperin							Bintang Nugroho
No.	Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi PDN	Realisasi TKDN	Realisasi Impor	% Realisasi PDN + TKDN	
1.	Sekretariat Jenderal	103.599.514.000	98.264.724.159	763.754.937	532.580.144	95,59%	
2.	Direktorat Jenderal Industri Agro	40.564.632.000	36.910.251.029	0	2.949.286.832	90,99%	
3.	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	50.201.358.000	48.529.231.405	869.194.000	40.594.508	98,40%	
4.	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	61.483.182.000	52.912.268.833	0	5.903.815.967	86,06%	
5.	Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka	218.805.051.000	213.965.759.602	79.913.165	2.215.080.817	97,82%	
6.	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	35.138.800.000	28.868.267.725	0	5.871.194.765	82,15%	
7.	Inspektorat Jenderal	8.280.422.000	7.708.856.545	544.000.000	9.986.973	99,67%	
8.	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	178.837.219.000	159.201.545.328	7.473.008.115	6.886.023.099	93,20%	
9.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	323.513.508.000	209.790.332.073	17.806.556.768	10.782.760.841	70,35%	
Total		1.020.423.686.000	856.151.236.699	27.536.426.985	35.191.323.946	86,60%	

- **Kendala:**

1. Belum adanya bimbingan teknis oleh Biro Umum terkait cara menghitung indikator ini sehingga masih banyak satuan kerja yang kurang memahami cara perhitungannya, selain itu pengadaan yang ada ada BPSDMI merupakan pengadaan alat praktek yang mirip dengan yang dipakai oleh industri sehingga alat tersebut kebanyakan memiliki kandungan impor yang cukup tinggi.
2. Masih terdapat banyak data yang belum masuk dalam perhitungan realisasi P3DN padahal telah dilakukan update data pada akun PPK.

Sasaran Program 6 Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima memiliki 3 Indikator Kinerja yaitu:

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2020		2021		2022 TW IV			Keterangan	Satuan
			T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP6	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1 Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Belum Menjadi Indikator Kinerja		72	70	74	79,15	107		Nilai
		2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Belum Menjadi Indikator Kinerja		72	73,15	74	76,21	103		Nilai
		3 Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	Belum Menjadi Indikator Kinerja		75	69	77	69	90		Nilai

1. Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan kementerian perindustrian wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan kementerian perindustrian bertujuan untuk memberikan motivasi kepada

satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tepat waktu.

Penilaian Laporan Keuangan dari Biro Keuangan Kementerian Perindustrian dengan lingkup yang dinilai antara lain: Kelengkapan Laporan Keuangan yang meliputi (penjelasan umum, penjelasan laporan operasional, penjelasan laporan perubahan ekuitas, pengungkapan penting lainnya), kelengkapan lampiran meliputi (lampiran BMN dan Lapiram E Rekon). Indikator ini merupakan Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan Kementerian Perindustrian.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 79,15 atau 107% dari target nilai 74. Indikator Kinerja Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Belum menjadi Indikator Kinerja			72	70	97,22	74	79,15	107	Nilai

Hingga akhir 2022, Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sebesar 79,15 atau mencapai 107% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022 yaitu sebesar 74. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 70. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI sebesar 78. Target tersebut

diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 107% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 78.

Nilai ini disampaikan dalam surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Perindustrian Nomor: B857/SJ-IND.3/KU/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang hasil penyampaian hasil penilaian laporan keuangan tingkat satker dan unit eselon I TA 2021. Dengan isian sebagai berikut:

Lampiran III Surat : Penyampaian Hasil Penilaian
Laporan Keuangan Tingkat
Satker dan Unit Eselon I TA
2021
Nomor : B857/SJ-IND.3/KU/VIII/2022
Tanggal : 22 Agustus 2022

NILAI LAPORAN KEUANGAN TA 2021 TINGKAT UNIT ESELON I

NO	ESELON I	KESESUAIAN SAP	KECUKUPAN INFORMASI	EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN	KETAATAN PERATURAN	TOTAL
1	IKMA	11,00	61,80	2,00	19,50	94,30
2	BSKJI	14,00	60,40	2,00	17,50	93,90
3	ITJEN	13,00	61,15	2,00	16,50	92,65
4	SETJEN	10,00	63,00	2,00	17,50	92,50
5	ILMATE	14,00	62,50	2,00	14,00	92,50
6	KPAII	15,00	57,50	2,00	17,50	92,00
7	IKFT	15,00	55,15	2,00	16,50	88,65
8	AGRO	14,00	53,50	2,00	15,50	85,00
9	BPSDMI	12,00	50,15	2,00	15,00	79,15

- **Kendala:**

1. Memiliki satuan kerja yang banyak di antara eselon 1 lain;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia;
3. Arahan dari biro keuangan/apk/BPK harus melalui eselon 1 dahulu, sehingga pengerjaan lebih terlambat, pengumpulan data yang dibutuhkan sulit karena harus berkoordinasi dengan satker lain;
4. Penyusunan LK eselon 1 baru bisa dilakukan setelah satker selesai,

sehingga jika satker masih belum selesai eselon 1 akan terhambat.

2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.

Perhitungan nilai SAKIP Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Indikator ini merupakan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian khususnya Inspektorat I bagi BPSDMI.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 76,21 atau 102,98% dari nilai 74. Indikator Kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C%	T	R	C%	
Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Belum menjadi Indikator Kinerja			72	73,15	101,60	74	76,21	103	Persen

Hingga akhir 2022, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sebesar 76,21 atau mencapai 103% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022 yaitu sebesar 74. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 73,15. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sebesar 78. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 103% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 78. Nilai ini disampaikan dalam surat Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor: 182/IJ-IND/PW/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada BPSDMI. Dengan isian sebagai berikut:

Nomor : 182 /IJ-IND/PW/VI/2022 Jakarta, 28 Juni 2022
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Hal : Hasil Evaluasi atas Implementasi
SAKIP pada BPSDMI

Yth. Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Industri
di-
JAKARTA

Sehubungan dengan telah selesai dilaksanakannya Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2021 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri oleh Tim Evaluasi SAKIP sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 614/IJ-IND/ST/IV/2022 tanggal 25 April 2022 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dapat kami sampaikan hasil evaluasi SAKIP pada BPSDMI sebesar **76,10 (BB)**.

- **Kendala:**

1. Terdapat indikator yang belum smart indicator, namun merupakan indikator yang turun dari kementerian perindustrian ke tetapi unit-unit pusat maupun satuan kerja telah memiliki tugas pokok fungsi masing-masing, sehingga beberapa indikator tersebut di ampu oleh Sekretariat BPSDMI walaupun tidak sesuai dengan tupoksi Sekretariat;
2. Memiliki satuan kerja yang banyak sehingga pengumpulan data memakan waktu yang lebih lama dari eselon 1 lain

3. Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri

Penilaian kearsipan diselenggarakan oleh Biro Umum Kemenperin tiap tahun dengan tim penilai berasal dari arsiparis tiap satuan pusat dan satuan kerja daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Indikator ini merupakan Nilai kearsipan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang dilaksanakan oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Nilai Kearsipan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 69 atau 90% dari nilai 77. Indikator Kinerja Nilai Kearsipan Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Industri belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C%	T	R	C%	
Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	Belum menjadi Indikator Kinerja			75	69	92	77	69	90	Persen

Hingga akhir 2022, Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri sebesar 77 atau mencapai 90% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022 yaitu sebesar 75. Capaian indikator ini di tahun 2022 sama dengan tahun 2021 sebanyak 69 (sesuai dengan arahan dari Biro Umum Kementerian Perindustrian bahwa pada tahun 2022 nilai capaian unit pusat merupakan nilai capaian unit pusat di tahun 2021. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri sebesar 80. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 90% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 80. Nilai ini disampaikan dalam surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor: B/3/SJ-IND/KR/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2021. Dengan isian sebagai berikut:

HASIL VERIFIKASI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL 2021
Sesuai BA penetapan hasil pengawasan kearsipan Internal
Nomor AK.01.00/238/2021

PERINGKAT	KATEGORI UNIT KEARSIPAN	Nilai Verifikasi ANRI
1	Biro Umum	94,18
2	Ses Ditjen ILMATE	90,91
3	Sekretariat Inspektorat Jenderal	88
4	Ses Ditjen IKFT	84
5	Ses BSKJI	76
6	Ses Ditjen Ind Agro	74
7	Ses Ditjen IKMA	73
8	Ses BPSDMI	69
9	Ses Ditjen KPAIL	50

- **Kendala:**

1. Belum adanya ruangan yang dikhususkan untuk arsip terutama pada bpsdmi pusat yang ada serta kurangnya tenaga arsiparis di lingkungan BPSDMI.

Sasaran Program 7 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu:

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2020		2021		2022 TW IV			Keterangan	Satuan
			T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP7	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	1 Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Belum Menjadi Indikator Kinerja		71	66,43	73	54.99	75		Nilai

1. Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI

Indeks profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indikator ini merupakan Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI yang di dapatkan dari Biro OSDM Kementerian Perindustrian.

Capaian atau realisasi indikator Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI pada tahun 2022 adalah 54,99 atau 75% dari target 73, nilai berasal dari aplikasi BKN yaitu mySPAK. Indikator Kinerja Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C%	T	R	C%	
Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI	Belum menjadi Indikator Kinerja			71	66,43	93,56	73	54.99	75	Indeks

Hingga akhir 2022, Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI sebesar 54,99 atau mencapai 75% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022 yaitu sebesar 73. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 66,44. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI 80. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 75% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 80. Nilai ini disampaikan dalam Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Perindustrian Nomor: 99/SJ-IND.2/KP/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang penyampaian nilai indeks profesionalitas ASN. Dengan isian rata-rata indeks profesionalitas ASN

yang telah direkap dalam lingkup eselon I BPSDMI sebagai berikut:

No	Nama Satker	IP ASN
1	Ses BPSDMI	43,35
2	Pusdiklat	46,4
3	Pusbindiklat	44,87
4	BDI Medan	56,83
5	BDI Padang	63,7
6	BDI Jakarta	51,25
7	BDI Yogyakarta	53,75
8	BDI Surabaya	70,92
9	BDI Makassar	56,48
10	BDI Denpasar	57,54
11	PPVI	49,47
12	Poltek STMI Jakarta	48,48
13	Poltek STTT Bandung	52,89
14	Poltek AKA Bogor	50,07
15	PTKI Medan	47,44
16	Poltek ATI Padang	56,84
17	Poltek ATK Yogyakarta	53,65
18	Poltek APP Jakarta	59,51
19	Poltek ATI Makassar	60,85
20	SMAK Bogor	55,61
21	SMAK Padang	53,09
22	SMAK Makassar	62,14
23	SMTI Banda Aceh	56,48
24	SMTI Makassar	56,44
25	SMTI Yogyakarta	67,65
26	SMTI Bandar Lampung	62,12
27	SMTI Padang	54,71
28	SMTI Pontianak	52,54
29	Akom Surakarta	60,47
30	PIL Morowali	48,24
31	PIFPK Kendal	51,04
32	Akom Bantaeng	54,88
	Rata-rata BPSDMI	54,99

Belum tercapainya indikator ini diantaranya karena terdapat pegawai yang tidak melakukan updating data terkait keikutsertaan diklat (kompetensi).

- **Kendala:**
 1. Belum updatenya aplikasi mySPAK
- **Tindak Lanjut:**
 1. Mendorong dan memotivasi pegawai untuk mengupdate data diri pada aplikasi BKN

Sasaran Program 8 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu:

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2020		2021		2022 TW IV			Keterangan	Satuan
			T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Belum Menjadi Indikator Kinerja		91,5	61,49	92	88.66	96		Persen
		2 Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Belum Menjadi Indikator Kinerja		3	2,77	3	2,85	95		Level

1. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti

Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.

Indikator ini merupakan persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang telah Ditindaklanjuti oleh BPSDMI terhadap rekomendasi dari temuan Inpektorat Jenderal dari Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat I bagi BPSDMI.

Capaian atau realisasi indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti tahun anggaran 2022 pada 2022 sebesar 88.66% atau 96% dari target 92%. Sejumlah 172 temuan telah

ditindaklanjuti (167 temuan telah sesuai rekomendasi dan 5 temuan belum sesuai rekomendasi) dari total 194 temuan yang ada pada unit pusat maupun satuan kerja daerah di lingkungan BPSDMI.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Belum menjadi Indikator Kinerja			91,5	61,49	67,20	92	88,66	96	Persen

Hingga akhir 2022, Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sebesar 88,66 atau mencapai 96% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022 yaitu sebesar 92. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 61,49. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai jumlah Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI 93. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 96% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 93. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	Eselon I	Binaan	Jml Temuan	Nilai (Rp)	Jml Tindak Lanjut	Nilai (Rp) yang telah ditindaklanjuti	Saldo Temuan	Nilai (Rp) yang belum ditindaklanjuti	Total Rekomendasi	Sesuai Rekomendasi	Belum Sesuai Rekomendasi	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Presentase
1	BPSDMI	Total	119	57.742.965	102	57.742.965	17	-	194	167	5	22	0	88,66%
		-	25	-	18	-	7	-	35	25	3	7	0	
		BDI	20	46.006.400	15	46.006.400	5	-	37	27	1	9	0	

	UP	74	11.736.565	69	11.736.565	5	-	122	115	1	6	0	
TOTAL		119	57742965,08	102	57742965,08	17	0	194	167	5	22	0	88,66%

- **Kendala:**

1. Penyampaian pemenuhan bukti tindak lanjut ke Inspektorat Jenderal atas saldo temuan yang ada belum maksimal;
2. Belum ada update terbaru dari Inspektorat Jenderal tentang pemenuhan bukti tindak lanjut yang telah dilakukan.

2. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)

Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi.

Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1,2,3,4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.

Indikator MRI selama ini telah dilaksanakan namun hanya memiliki nilai agregat untuk tingkat kementerian yaitu 2,85. Sehingga nilai ini pula yang dijadikan capaian oleh BPSDMI. Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) senilai 2,85 level atau 95% dari target 3 level.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Belum menjadi Indikator Kinerja			3	2,77	92,33	3	2,85	95	Level

Hingga akhir 2022, Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) sebesar 2,85 atau mencapai 95% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022 yaitu sebesar 3. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami

peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 2,77. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai level Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) 4. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 95% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 4. Nilai ini disampaikan dalam surat Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor: B/428/SJ-IND/KU/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian tahun 2021/2022. Dengan isian sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	3	1,200
2.	Struktur dan Proses	2	0,903
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	2	0,960
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	2	3,063
	- MRI	2	2,850
	- IEPK	3	3,650

- **Kendala:**

1. Penilaian dikeluarkan oleh inspektorat jenderal pada akhir tahun untuk level kementerian, dan sama bagi seluruh unit dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian

- **Tindak Lanjut**

1. Berkoordinasi dengan inspektorat jenderal

Sasaran Program 9 Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu:

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja	2020		2021		2022 TW IV			Keterangan	Satuan
			T	R	T	R	T	R	C (%)		
SP9	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1 Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	Belum Menjadi Indikator Kinerja		72	62,5	74	81	107		Persen

1. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Penyusunan regulasi bidang industri pengolahan nonmigas diharapkan dapat sejalan dengan kebijakan presiden dalam mendorong daya saing industri melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Oleh sebab itu setiap regulasi yang disusun oleh Kementerian Perindustrian diharapkan efektif dan mencapai tujuan dari regulasi tersebut disusun. Efektivitas regulasi yang disusun diukur melalui indikator kinerja yaitu efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin

Indikator ini merupakan persentase antara regulasi yang telah ditetapkan di lingkungan BPSDMI dan telah diterapkan terhadap seluruh regulasi yang telah ditetapkan oleh BPSDMI.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI sebesar 81% atau 107% dari target 74%. Dengan rincian regulasi yang dilakukan pengukuran: Indikator ini merupakan persentase antara regulasi yang telah ditetapkan di lingkungan BPSDMI dan telah diterapkan terhadap seluruh regulasi yang telah ditetapkan oleh BPSDMI.

Realisasi Indikator Kinerja

SP	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	

Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	Belum menjadi Indikator Kinerja	72	62,5	86,68	74	81	107	Persen
--	---	---------------------------------	----	------	-------	----	----	-----	--------

Hingga akhir 2022, I Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI sebesar 81 atau mencapai 107% dari target Perjanjian Kinerja BPSDMI tahun 2022 yaitu sebesar 74. Capaian indikator ini di tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 62,5. Adapun target jangka menengah indikator ini berdasarkan Renstra BPSDMI tahun 2020-2024 adalah pada tahun 2024 tercapai Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI 78. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 107% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja BPSDMI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga diharapkan pada tahun 2024 akan dapat mencapai target 78. Dengan rincian sebagai berikut:

No	KKNI	IER
1.	KKNI Bidang Analisis Kimia (Permenperin No. 8 Tahun 2019)	73%
2.	KKNI Bidang Industri Alat Berat (Permenperin No. 40 Tahun 2020)	80%
3.	KKNI Bidang Industri Garmen (Permenperin No. 35 Tahun 2020)	74%
4.	KKNI Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang Dari Logam Subbidang Pengelasan (Permenperin No. 50 Tahun 2018)	96%
Total IER		81%

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 109% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja dan Kementerian Perindustrian sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun

2022 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga akan dapat mencapai target pada tahun 2024 sebesar 78%.

- **Kendala:**

1. Respon dari industri yang masih cukup lambat untuk mengisi kuisioner

3.2 Realisasi Anggaran 2022

Penyerapan anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri tahun 2022 tidak dapat dipisahkan secara terperinci antara suatu program inisiatif atau kegiatan hanya mendukung pencapaian sasaran strategis ataupun satu indikator kinerja. Hal disebabkan karena beberapa program inisiatif atau kegiatan yang dilaksanakan mendukung secara simultan untuk pencapaian beberapa sasaran strategis atau indikator kinerja. Realisasi anggaran yang belum tercapai sepenuhnya namun telah mendekati 100% yang ditetapkan ini diantaranya disebabkan oleh adanya beberapa satuan kerja yang realisasi penerimaan PNBPNya belum maksimal.

Selama tahun 2022, realisasi anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri adalah Rp. 927.120.118.900 dari pagu anggaran sebesar Rp. 945.299.536.000 atau sebesar 98,08% dari total pagu Tahun 2022 yang digunakan untuk melaksanakan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Program Dukungan Manajemen BPSDMI, dengan rincian sebagai berikut:

- **Berdasarkan Satuan Kerja:**

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
019.10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	945.299.536.000	927.120.118.900	18.179.417.100	98,08 %
579331	POLITEKNIK AKA BOGOR	40.274.610.000	37.237.731.677	3.036.878.323	92,46 %

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
579332	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMAK BOGOR	23.858.668.000	21.818.106.808	2.040.561.192	91,45 %
579333	POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA	32.455.971.000	30.518.739.614	1.937.231.386	94,03 %
579334	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI YOGYAKARTA	19.253.783.000	19.090.716.517	163.066.483	99,15 %
579335	POLITEKNIK ATI MAKASSAR	27.720.371.000	27.630.409.717	89.961.283	99,68 %
579336	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI MAKASSAR	18.103.360.000	17.966.558.937	136.801.063	99,24 %
579337	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMAK MAKASSAR	17.826.142.000	17.805.381.864	20.760.136	99,88 %
579338	POLITEKNIK STTT BANDUNG	35.549.966.000	35.036.277.266	513.688.734	98,56 %
579339	BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA	34.661.180.000	34.416.257.857	244.922.143	99,29 %
579340	BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN	18.132.882.000	17.576.289.395	556.592.605	96,93 %
579341	BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR	28.806.130.000	28.473.556.828	332.573.172	98,85 %
579342	BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR	26.014.520.000	25.942.088.882	72.431.118	99,72 %
579343	BALAI DIKLAT INDUSTRI PADANG	18.834.340.000	18.748.454.702	85.885.298	99,54 %
579344	BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA	31.802.948.000	31.653.900.499	149.047.501	99,53 %
579345	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI BANDA ACEH	17.028.434.000	16.607.913.971	420.520.029	97,53 %
579346	POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN	29.250.485.000	29.119.851.342	130.633.658	99,55 %
579347	POLITEKNIK INDUSTRI LOGAM MOROWALI	13.164.203.000	11.909.004.091	1.255.198.909	90,47 %
579348	AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFaktur BANTAENG	12.281.607.000	12.276.563.208	5.043.792	99,96 %

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
579349	POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU KENDAL	13.404.240.000	13.362.093.707	42.146.293	99,69 %
579350	POLITEKNIK STMI JAKARTA	35.388.365.000	34.054.508.554	1.333.856.446	96,23 %
579351	POLITEKNIK APP JAKARTA	30.762.857.000	30.479.972.770	282.884.230	99,08 %
579352	AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA	16.499.827.000	16.311.113.464	188.713.536	98,86 %
579355	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI PADANG	18.780.408.000	17.808.777.788	971.630.212	94,83 %
579356	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI BANDAR LAMPUNG	19.400.851.000	19.122.077.537	278.773.463	98,56 %
579357	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI PONTIANAK	17.960.260.000	17.802.091.757	158.168.243	99,12 %
579358	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMAK PADANG	23.254.577.000	23.001.373.446	253.203.554	98,91 %
579359	POLITEKNIK ATI PADANG	30.583.579.000	30.500.717.624	82.861.376	99,73 %
579360	BALAI DIKLAT INDUSTRI JAKARTA	35.982.083.000	35.869.519.294	112.563.706	99,69 %
579361	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	258.262.889.000	254.980.069.784	3.282.819.216	98,73 %

Sumber: SatuDJA

- Berdasarkan rincian output:

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
019.10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	945.299.536.000	927.120.118.900	18.179.417.100	98,08 %
4957.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.000.000.000	1.928.657.393	71.342.607	96,43 %
4957.BDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	2.198.454.000	2.143.138.847	55.315.153	97,48 %

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
4957.DCH	Pelatihan Bidang Industri	2.000.000.000	1.988.787.368	11.212.632	99,44 %
4957.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	1.398.374.000	1.331.737.377	66.636.623	95,23 %
4957.PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	3.000.000.000	2.957.445.515	42.554.485	98,58 %
4957.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	3.000.000.000	2.977.591.245	22.408.755	99,25 %
4957.RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	47.728.889.000	47.709.733.300	19.155.700	99,96 %
4957.RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	304.998.000	304.627.265	370.735	99,88 %
4957.SCH	Pelatihan Bidang Industri	169.469.499.000	168.005.166.314	1.464.332.686	99,14 %
4958.ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	435.000.000	432.128.433	2.871.567	99,34 %
4958.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	14.842.877.000	14.129.189.569	713.687.431	95,19 %
4958.RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	13.705.313.000	13.631.144.059	74.168.941	99,46 %
4958.SAG	Pendidikan Vokasi Bidang Industri	87.735.844.000	84.737.975.389	2.997.868.611	96,58 %
4959.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	5.962.145.000	5.901.485.937	60.659.063	98,98 %
4959.PEC	Kerja sama	3.000.000.000	2.992.103.169	7.896.831	99,74 %
4959.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	77.520.349.000	77.478.067.868	42.281.132	99,95 %
4959.SAG	Pendidikan Vokasi Bidang Industri	35.040.319.000	33.994.792.133	1.045.526.867	97,02 %
4960.EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	13.000.000.000	12.973.323.910	26.676.090	99,79 %
6043.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	31.843.043.000	31.154.225.968	688.817.032	97,84 %
6043.EAD	Layanan Sarana Internal	4.666.124.000	4.661.414.837	4.709.163	99,90 %
6043.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	423.744.708.000	413.077.271.029	10.667.436.971	97,48 %

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
6043.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.703.600.000	2.610.111.975	93.488.025	96,54 %

- Berdasarkan indikator kinerja perjanjian kinerja BPSDMI

Secara keseluruhan seluruh pagu anggaran tahun 2022 yang dimiliki oleh BPSDMI yaitu sebesar Rp. 945.299.536.000 dengan realisasi anggaran tahun 2022 Rp. 927.299.536.000 (98.08%) bertujuan untuk memenuhi target perjanjian kinerja BPSDMI yang telah ditetapkan. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang di dukung oleh beberapa kegiatan rincian output (KRO) dengan subkomponen yang berbeda sehingga terjadi pengulangan isian pagu, terdapat pula indikator yang di dukung oleh KRO yang sama sehingga dilakukan penggabungan.

Selain itu terdapat indikator yang hanya di dukung beberapa subkomponen dalam satu KRO akan tetapi data realisasi anggaran yang tersedia hingga saat ini hanya mencapai level KRO, sehingga hampir semua indikaor memiliki realisasi yang digabungkan dengan indikaor lain. Dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Tujuan/Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan	Capaian 2022	% RO		Realisasi Anggaran	% Anggaran	
	Tuajaun	Tersedianya SDM Industri yang Kompeten	30.000	Orang	40.382	135%	945.299.536.000	927.120.658.900	98,08%	
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	20,84	Juta Orang	19,11	92%	7.109.389.000	7.007.273.589	98,56%
			4957.FAI.001.052 Menyelenggarakan Kerja Sama Pendidikan Non Formal dengan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Lembaga Non-Pendidikan					1.398.374.000	1.331.737.377	95,23%
			4959.PEC.001.051 Menyelenggarakan Program SMK yang Link And Match dengan Industri					3.000.000.000	2.992.103.169	99,74%
			4959.FAI.001.051 Meningkatkan Akreditasi SMK					2.711.015.000	2.683.433.043	98,98%
		2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	14,96	Persen	14,13	94%	6.220.720.000	6.071.178.233	97,60%
			4958.SAG.001.054 Melaksanakan Sertifikasi Lulusan					1.639.749.000	1.630.875.182	99,46%
			4958.SAG.002.053 Melaksanakan Sertifikasi Lulusan					919.267.000	887.856.330	96,58%

	4959.SAG.001.053 Melaksanakan Sertifikasi Lulusan					3.661.704.000	3.552.446.721	97,02%
3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	115,77	Rp Juta /orang/ tahun	114,3	99%	13.203.307.000	13.032.535.255	98,71%
	4957.SCH.001.099 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi)					10.574.984.000	10.485.538.884	99,15%
	4958.SAG.001.055 Menyelenggarakan Inkubator Bisnis					670.261.000	647.358.680	96,58%
	4959.SAG.001.055 Menyelenggarakan Pilot Project Dual Sistem					1.958.062.000	1.899.637.691	97,02%
4	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	25.800	Orang	27.769	108%	154.694.515.000	153.386.080.982	99,15%
	4957.SCH.001.051 Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil)					44.497.964.000	44.121.592.221	99,15%
	4957.SCH.001.052 Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Alas Kaki					22.873.227.000	22.679.761.134	99,15%
	4957.SCH.001.054 Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Bordir dan Kerancang					12.069.204.000	11.967.120.503	99,15%
	4957.SCH.001.055 Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Plastik					907.792.000	900.113.732	99,15%
	4957.SCH.001.057 Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Elektronika					8.274.209.000	8.204.224.253	99,15%
	4957.SCH.001.058 Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Petrokimia					1.995.000	1.978.126	99,15%

	4957.SCH.001.059 Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Animasi					10.608.104.000	10.518.378.749	99,15%
	4957.SCH.001.060 Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Rumput Laut					7.649.313.000	7.584.613.735	99,15%
	4957.SCH.001.061 Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Kakao					8.013.763.000	7.945.981.152	99,15%
	4957.SCH.001.062 Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Kemasan					4.192.036.000	4.156.579.006	99,15%
	4957.SCH.001.063 Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Pengelasan Galangan Kapal					7.590.895.000	7.526.689.845	99,15%
	4957.SCH.001.065 Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Semen					1.600.000	1.586.467	99,15%
	4957.SCH.001.067 Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Furniture					932.867.000	924.976.643	99,15%
	4957.SCH.001.068 Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Kimia					1.647.706.000	1.633.769.406	99,15%
	4957.SCH.001.072 Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Produk Karet					1.114.208.000	1.104.783.828	99,15%
	4957.SCH.001.097 Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri					24.319.632.000	24.113.932.180	99,15%
5	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	79%	Persen	100%	127%	109.985.418.000	107.149.190.933	97,42%

			4958.SAG.001.051 Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem					61.011.285.000	58.926.574.717	96,58%
			4958.SAG.002.051 Menyelenggarakan Program Pendidikan D1-D2 Industri					21.556.294.000	20.819.731.448	96,58%
			4959.SAG.001.051 Menyelenggarakan Pendidikan Menengah Kejuruan Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem					27.417.839.000	27.402.884.768	99,95%
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	400	Orang	483	121%	4.200.000.000	4.133.546.448	98,42%
			4957.SCH.005.051 Tenaga Kerja Industri 4.0					4.200.000.000	4.133.546.448	98,42%
		2	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	5	Implementasi	37	740%	4.181.158.000	4.043.633.872	96,71%
			4958.SAG.002.052 Menyelenggarakan Teaching Factory					516.281.000	498.640.062	96,58%
			4958.SAG.001.056 Fasilitas Silver Expert					583.858.000	563.908.006	96,58%
			4958.SAG.001.053 Menyelenggarakan Teaching Factory					838.849.000	810.186.153	96,58%
			4958.FAI.001.056 Menyelenggarakan Rintisan Gelar Dosen					165.000.000	157.066.334	95,19%
			4959.SAG.001.054 Fasilitas Silver Expert					1.046.968.000	1.015.728.753	97,02%
			4959.SAG.001.052 Menyelenggarakan Teaching Factory					955.746.000	927.228.619	97,02%
			4959.FAI.001.052 Menyelenggarakan Penelitian Teknis Industri Terapan					10.586.000	10.076.995	95,19%
			4959.FAI.001.053 Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat					63.870.000	60.798.950	95,19%
		3	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	70	Persen	93,9	134%	47.728.889.000	47.509.935.461	99,54%
			4957.RAH.001.057 Gedung dan Bangunan					45.209.444.000	44.990.557.217	99,52%
			4957.RAH.001.058 Peralatan dan Mesin					2.519.445.000	2.519.378.244	100,00%

SP3	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	85	Persen	96,91	114%	11.114.211.000	11.098.399.090	99,86%
			4960.EAM.001.051 Menyelenggarakan Diklat Struktural					4.989.031.000	4.983.121.225	99,88%
			4960.EAM.001.053 Menyelenggarakan Diklat Teknis Industri					624.387.000	624.185.500	99,97%
			4960.EAM.002.051 Menyelenggarakan Pendidikan Rintisan Gelar					5.065.783.000	5.056.202.365	99,81%
			4960.EAM.002.052 Pengembangan kompetensi					435.010.000	434.890.000	99,97%
		2	Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional	75	Persen	93,15	124%	1.885.789.000	1.879.909.820	99,69%
			4960.EAM.001.052 Menyelenggarakan Diklat Fungsional Industri					1.414.459.000	1.411.015.000	99,76%
			4960.EAM.001.054 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Aparatur					471.330.000	468.894.820	99,48%
SP4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	1	Infrastruktur kompetensi industri	8	SKKNI	9	113%	3.435.000.000	3.389.573.948	98,68%
			4957.PBK.001.051 Menyusun RSKKNI Sektor Industri					3.000.000.000	2.957.445.515	98,58%
			4958.ABK.001.051 Menyusun RSKKNI Sektor Industri					435.000.000	432.128.433	99,34%
		2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri	20	LSP dan TUK	26	130%	2.000.000.000	1.928.657.393	96,43%
			4957.BDB.001.051 Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sektor Industri					2.000.000.000	1.928.657.393	96,43%
		3	Asesor kompetensi dan lisensi	145	Asesor	192	132%	2.000.000.000	1.988.787.368	99,44%
			4957.DCH.001.051 Menyelenggarakan Diklat Asesor Kompetensi					1.261.210.000	1.256.573.308	99,63%
			4957.DCH.001.052 Menyelenggarakan Diklat RCC Asesor Kompetensi					738.790.000	732.214.060	99,11%
		4	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	8	Perusahaan	200	2500%	4.185.967.000	4.105.117.755	98,07%

			4958.RBJ.001.058 Gedung dan Bangunan					1.620.064.000	1.607.622.925	99,23%
			4958.RBJ.002.059 Peralatan Pendidikan Vokasi					7.405.249.000	7.348.381.334	99,23%
			4959.RBI.001.058 Gedung dan Bangunan					75.741.796.000	75.700.484.926	99,95%
			4959.RBI.002.059 Peralatan Pendidikan Vokasi					1.778.553.000	1.777.582.942	99,95%
			6043.EAD.001.051 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran					1.500.000.000	1.498.486.164	99,90%
			6043.EAD.002.051 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran					2.330.924.000	2.328.571.576	99,90%
			6043.EAD.003.051 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran					765.200.000	764.427.742	99,90%
			6043.EAD.004.051 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran					70.000.000	69.929.354	99,90%
			6043.EBB.002.051 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran					706.000.000	705.287.488	99,90%
			6043.EBB.004.051 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran					1.997.600.000	1.995.583.975	99,90%
SP6	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif efisien dan berorientasi pada layanan prima	1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	74	Nilai	79,15	107%	4.231.413.000	4.139.880.625	97,84%
			6043.EAB.001.054 Pengelolaan keuangan					2.467.978.000	2.414.591.605	97,84%
			6043.EAB.002.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan					816.764.000	799.096.061	97,84%
			6043.EAB.003.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan					775.850.000	759.067.097	97,84%
			6043.EAB.004.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan					170.821.000	167.125.863	97,84%
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	74	Nilai	76,21	103%	5.598.237.000	5.477.137.990	97,84%
			6043.EAB.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran					3.043.347.000	2.977.514.433	97,84%
			6043.EAB.002.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran					558.808.000	546.720.070	97,84%

			6043.EAB.003.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran					794.265.000	777.083.751	97,84%
			6043.EAB.004.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran					1.201.817.000	1.175.819.735	97,84%
		3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	77	Nilai	69	90%	4.332.778.000	4.239.052.935	97,84%
			6043.EAB.001.058 Pelayanan umum dan perlengkapan					4.332.778.000	4.239.052.935	97,84%
SP7	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI	73	Indeks	54,99	75%	6.848.713.000	6.700.564.151	97,84%
			6043.EAB.002.054 Pengelolaan kepegawaian					3.151.644.000	3.083.468.792	97,84%
			6043.EAB.003.054 Pengelolaan kepegawaian					1.984.402.000	1.941.476.143	97,84%
			6043.EAB.004.054 Pengelolaan kepegawaian					1.712.667.000	1.675.619.215	97,84%
SP8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	92	Persen	88,66	96%	3.078.342.000	3.011.752.434	97,84%
			6043.EAB.002.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan					1.006.127.000	984.362.830	97,84%
			6043.EAB.003.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan					1.337.740.000	1.308.802.499	97,84%
			6043.EAB.004.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan					734.475.000	718.587.106	97,84%
		2	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	3	Level	2,85	95%	5.127.044.000	5.016.137.664	97,84%
			6043.EAB.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi					1.881.518.000	1.840.817.692	97,84%
			6043.EAB.002.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi					1.502.935.000	1.470.424.061	97,84%
			6043.EAB.003.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi					1.352.830.000	1.323.566.077	97,84%
			6043.EAB.004.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi				389.761.000	381.329.833	97,84%	
SP9	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	76	Persen	81	107%	2.626.516.000	2.569.700.169	97,84%

		6043.EAB.001.057 Pengelolaan kepegawaian					2.626.516.000	2.569.700.169	97,84%
		6043.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan					312.475.205.000	303.079.853.480	96,99%
		6043.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor					111.269.503.000	109.997.957.549	98,86%
		4957.PDI.001.051 Menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri					3.000.000.000	2.977.591.245	99,25%

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPSDMI berusaha memaksimalkan pencapaian kinerja, baik terhadap output, maupun outcome. Adapun salah satu upaya dalam memaksimalkan capaian tersebut adalah melaksanakan efisiensi sumber daya, agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja dan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan capaian efisiensi sumber daya pada BPSDMI, salah satunya karena adanya refocusing/realokasi anggaran/program/kegiatan yang disesuaikan dengan sasaran pembangunan nasional atau isu aktual terkini.

Pada awal tahun 2022, BPSDMI telah menetapkan Perjanjian Kinerja beserta anggaran yang menyertainya sebesar Rp. 982.000.000.000,-. Anggaran tersebut dipergunakan untuk dapat mewujudkan capaian target yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja BPSDMI Tahun 2022.

Dengan adanya penambahan pagu dari hibah luar negeri dan pagu BLU serta penarikan blokir automatic adjustment maka pagu akhir dari BPSDMI berubah menjadi Rp. 945.299.536.000,-. Dengan alokasi anggaran sebesar ini akan dapat mempengaruhi tingkat capaian target yang telah diperjanjikan. BPSDMI telah berusaha semaksimal mungkin dalam pelaksanaan tugasnya sehingga pada akhir tahun anggaran 2022 dapat merealisasikan 98,08 % anggarannya untuk mencapai target realisasi fisik sebesar 100 (seratus) persen dalam usaha memenuhi target Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dari data yang tersedia secara hitungan kasar dapat diperoleh kinerja efisiensi anggaran untuk mencapai target kinerja tahun 2022 adalah :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Kinerja} &= \frac{(\text{pagu awal}-\text{realisasi pagu akhir})}{\text{pagu awal}} \times 100 \% \\ \text{Efisiensi Anggaran} &= \frac{(982.000.000.000-945.299.536.000)}{982.000.000.000} \times 100 \% \\ &= 3.74\% \end{aligned}$$

Sebagaimana terlihat pada perhitungan di atas, nilai kinerja efisiensi anggaran BPSDMI Tahun 2022 adalah sebesar 3.74 %, dimana persentase tersebut ini termasuk anggaran yang tidak terealisasi sebesar 1,92% dari pagu akhir perubahan yaitu Rp. 18.178.877.100,-

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya per Indikator

Kode	Tujuan/Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	Satuan	Pagu	Realisasi	Efisien Anggaran / target	Efisien Anggaran / realisasi target	Efisiensi
Tj	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional	1 Tersedianya SDM Industri yang kompeten	30000	40382	Orang	945.299.536.000	927.120.658.900	31.509.985	23.408.933	8.101.051
PERSPEKTIF STAKEHOLDER										
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	1 Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	20,84	19,11	Juta Orang	7.109.389.000	7.007.273.589	341.141.507	372.024.542	- 30.883.035
		2 Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	14,96	14,13	Persen	6.220.720.000	6.071.178.233	415.823.529	440.249.115	- 24.425.586
		3 Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	115,8	114,3	Rp Juta /orang/ tahun	13.203.307.000	13.032.535.255	114.047.741	115.514.497	- 1.466.756
		4 Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	25.700	27.769	Orang	154.694.515.000	153.386.080.982	6.019.242	5.570.763	448.479
		5 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	79%	100%	Persen	109.985.418.000	107.149.190.933	139.222.048.101	109.985.418.000	29.236.630.101
PERSPEKTIF CUSTOMER										
SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1 SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	400	483	Orang	4.200.000.000	4.133.546.448	10.500.000	8.695.652	1.804.348
		2 Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	5	37	Implementasi	4.181.158.000	4.043.633.872	836.231.600	113.004.270	723.227.330
		3 Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	70	94	Persen	47.728.889.000	47.509.935.461	681.841.271	508.294.878	173.546.394

SP3	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	85	97	Persen	11.114.211.000	11.098.399.090	130.755.424	114.685.904	16.069.519
		2	Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional	75	93	Persen	1.885.789.000	1.879.909.820	25.143.853	20.244.648	4.899.205
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS											
SP4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	10	9	SKKNI	3.435.000.000	3.389.573.948	343.500.000	381.666.667	- 38.166.667
		2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri	20	26	LSP dan TUK	2.000.000.000	1.928.657.393	100.000.000	76.923.077	23.076.923
		3	Asesor kompetensi dan lisensi	300	192	Asesor	2.000.000.000	1.988.787.368	6.666.667	10.416.667	- 3.750.000
		4	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	8	200	Perusahaan	4.185.967.000	4.105.117.755	523.245.875	20.929.835	502.316.040
		5	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	331	332	Nilai	4.893.052.000	4.657.780.246	14.782.634	14.725.246	57.388
		6	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	150	222	Penelitian	8.775.532.000	8.353.579.646	58.503.547	39.529.423	18.974.123
		7	Inkubator Bisnis industri yang tumbuh	50	76	Tenant	2.198.454.000	2.143.138.847	43.969.080	28.927.026	15.042.054
PERSPEKTIF LEARN & GROWTH											

SP5	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	60	70	Persen	98.900.384.000	98.776.125.492	1.648.339.733	1.406.233.243	242.106.490
SP6	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	74	79	Nilai	4.231.413.000	4.139.880.625	57.181.257	53.460.682	3.720.575
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	74	76	Nilai	5.598.237.000	5.477.137.990	75.651.851	73.458.037	2.193.814
		3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	77	69	Nilai	4.332.778.000	4.239.052.935	56.269.844	62.793.884	- 6.524.040
SP7	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI	73	55	Indeks	6.848.713.000	6.700.564.151	93.817.986	124.544.699	- 30.726.713
SP8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	92	89	Persen	3.078.342.000	3.011.752.434	33.460.239	34.720.753	- 1.260.514
		2	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	3	3	Level	5.127.044.000	5.016.137.664	1.709.014.667	1.798.962.807	- 89.948.140
SP9	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	76	81	Persen	2.626.516.000	2.569.700.169	34.559.421	32.426.123	2.133.298

3.4 Kendala dan Tindak Lanjut

3.4.1 Kendala

Kendala yang dihadapi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian dalam pelaksanaan program dan tahun 2022 antara lain:

1. Terdapat keditaksesuaian target perjanjian kinerja BPSDMI dengan target yang telah disesuaikan dengan anggaran yang di dapatkan oleh BPSDMI (target volume output RKAKL)
2. Terdapat pengembalian bank garansi pada pengerjaan pematangan lahan proyek SBSN Pembangunan Gedung SMK-SMAK Bogor sehingga penyerapan anggaran belum maksimal.
3. Terdapat penarikan blokir automatic adjustment oleh Kementerian Keuangan sehingga output yang dihasilkan belum maksimal

3.4.2 Tindak Lanjut

Langkah tindak lanjut yang harus dilakukan berkaitan dengan kendala pelaksanaan antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan biro perencanaan terkait penyesuaian target.
2. Melakukan luncuran dan yang dikembalikan bank garansi ke tahun 2023.

BAB IV

P E N U T U P

Capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) selama tahun anggaran 2022, relatif cukup baik meskipun ada beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 beberapa indikator mengalami peningkatan. Walaupun demikian, BPSDMI tidak akan berpuas diri dengan pencapaian tersebut. Karena di masa yang akan datang, masih banyak tantangan yang akan dihadapi, seiring dengan adanya kebijakan- kebijakan baru khususnya di bidang pengembangan SDM Industri.

Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 merupakan laporan tahun ke empat periode Renstra 2020-2024. Untuk itu diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan balikan (feed back), dan mendorong Aparat BPSDMI agar berusaha sungguh-sungguh, sehingga dapat mewujudkan BPSDMI menjadi lembaga yang dikenal berkualitas baik, dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri di lingkungan Kementerian. Di samping itu juga memiliki kepeloporan, daya saing, dan daya tarik dalam pengelolaan diklat. Aspirasi seperti ini menyiratkan pesan, agar BPSDMI mampu berinteraksi dan bersinergi secara produktif dengan lingkungan.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi BPSDMI untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang. BPSDMI akan selalu berusaha mengembangkan secara berkelanjutan program diklat yang profesional, pelayanan diklat yang prima, widyaiswara yang kompeten, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pembelajaran mutakhir. Dan juga secara berkelanjutan akan menyediakan sarana dan prasarana diklat yang nyaman.